



DAYA SAING DAN POTENSI EKONOMI DAERAH

KONSEP, PENGUKURAN, DAN ANALISISNYA DI PROVINSI JAMBI



Lestari Agusalm

DAYA SAING DAN
POTENSI EKONOMI DAERAH
KONSEP, PENGUKURAN, DAN ANALISISNYA DI PROVINSI JAMBI

Lestari Agusalim



DAYA SAING & POTENSI EKONOMI DAERAH
Konsep, Pengukuran, dan Analisisnya di Provinsi Jambi

Penulis : LESTARI AGUSALIM

ISBN : 978-623-495-203-2

Copyright © September 2022

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm; Hal: xii + 214

Isi merupakan tanggung jawab penulis.
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : Fahrul Andriansyah
Penata isi : Zulya Rachma Bahar

Cetakan 1, September 2022

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
CV. Literasi Nusantara Abadi
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11
Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: penerbitlitnus@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya buku ini bisa diselesaikan pada waktunya. Penulisan buku ini didasarkan pada niat untuk ikut serta dalam memberikan sumbang saran kepada semua pihak dalam rangka menganalisis daya saing dan potensi ekonomi, khususnya di Provinsi Jambi.

Di dalam buku, pembaca disajikan pembahasan mengenai konsep daya saing, pembangunan wilayah, potensi ekonomi, pembangunan ekonomi, pemodelan dan analisis daya saing dan potensi ekonomi Provinsi Jambi, serta strategi peningkatan daya saing ekonomi Provinsi Jambi.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bappeda Pemerintah Provinsi Jambi yang telah membantu memfasilitasi dan mendanai penyusunan dokumen penyusunan dokumen pemetaan daya saing ekonomi Provinsi Jambi tahun 2018. Terima pula kepada PT Sinergi Visi Utama yang telah bersedia bermitra dengan penulis dalam berbagai kegiatan penyusunan dokumen pembangunan ekonomi daerah.

Penulis menyadari bahwa buku ini tentu saja masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan karena menyangkut ketersediaan waktu dan data. Masukan dan kritik yang konstruktif dari pembaca akan sangat berguna untuk penyempurnaan buku ini ke depannya. Semoga buku ini dapat memberikan gambaran dan acuan dalam membuat strategi dan kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi berbasiskan potensi ekonomi lokal.

Jakarta, 10 September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR — iii

DAFTAR ISI — v

DAFTAR GAMBAR — ix

DAFTAR TABEL — xi

1.

PENDAHULUAN — 1

2.

KONSEP DAYA SAING — 5

Daya Saing Global — 5

Daya Saing Daerah — 7

Indikator Utama dan Prinsip Daya Saing Daerah — 10

Aspek Daya Saing Daerah — 15

3.

POTENSI EKONOMI — 19

Teori Basis Ekonomi — 19

Potensi Ekonomi Daerah — 20

Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Basis — 22

4.

PEMBANGUNAN WILAYAH — 25

Konsep Wilayah — 25

Strategi Pembangunan Wilayah — 28

Kebijakan Pembangunan Wilayah — 29

Ketimpangan Pembangunan Wilayah — 31

5.

PEMBANGUNAN EKONOMI — 35

Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi — 37

Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah — 46

6.

PEMODELAN EKONOMI PROVINSI JAMBI — 69

Kerangka Pemikiran — 69

Data — 70

Pengukuran Daya Saing Daerah — 71

Pengukuran Potensi Ekonomi Daerah — 75

Analisis SWOT — 79

7.

PEREKONOMIAN PROVINSI JAMBI — 81

Pertumbuhan Ekonomi — 82

Pendapatan Per Kapita — 85

Inflasi — 86

Indeks Pembangunan Manusia — 87

Kemiskinan — 88

Pengangguran — 89

Ketimpangan — 91

Investasi — 92

8.

DAYA SAING EKONOMI PROVINSI JAMBI — 103

Daya Saing Provinsi Jambi dan Provinsi
Lainnya di Indonesia — 104

Daya Saing Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi — 126

9.

POTENSI EKONOMI PROVINSI JAMBI — 135

 Analisis *Loqation Quotient* (LQ) — 135

 Analisis Tipologi Klassen — 139

 Analisis *Shift Share* (SS) — 142

 Produk Unggulan Daerah Provinsi Jambi — 144

10.

STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING
PROVINSI JAMBI — 151

 Analisis SWOT Provinsi Jambi — 151

 Strategi Kebijakan Provinsi Jambi — 155

11.

PENUTUP — 163

DAFTAR PUSTAKA — 165

LAMPIRAN — 171

PROFIL PENULIS — 213

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 6.1. Kerangka Berpikir — 71
- Gambar 6.2. Model Analisis *Shift Share* — 79
- Gambar 7.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2011-2017 — 83
- Gambar 7.2. Realisasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2012-2021 — 84
- Gambar 7.3. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dengan Pendekatan Produksi Tahun 2013-2017 — 85
- Gambar 7.4. Rata-Rata *Share* Provinsi Jambi Tahun 2011-2017 — 86
- Gambar 7.5. Perkembangan PDRB Per kapita dan Target (dalam juta rupiah) — 87
- Gambar 7.6. Perkembangan Inflasi dan Target Tahun 2012-2021 — 87
- Gambar 7.7. Perkembangan IPM Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2011-2016 — 88
- Gambar 7.8. Pola Spasial IPM Tahun 2016 — 88
- Gambar 7.9. Perkembangan Angka Kemiskinan Provinsi Jambi, Nasional dan Gap antara Jambi-Nasional Tahun 2011-2017 — 89
- Gambar 7.10. Pola Spasial Angka Kemiskinan 2017 — 90
- Gambar 7.11. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi, Nasional dan Gap Jambi-Nasional Tahun 2011-2017 — 90
- Gambar 7.12. Pola Spasial TPT 2017 — 91
- Gambar 7.13. Perkembangan Indeks Gini Provinsi Jambi Tahun 2012-2021 — 92
- Gambar 7.14. Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Jambi Tahun 2013-2021 — 93
- Gambar 7.15. Perkembangan PMTB Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 — 93

- Gambar 7.16 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan ICOR di Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 (dengan Pendekatan Investasi = PMTB) — 97
- Gambar 7.17 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan ICOR di Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 (dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori) — 98
- Gambar 8.1 Peta Daya Saing Wilayah Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indikator *Input-Output* — 127
- Gambar 8.2 Peta Daya Saing Wilayah Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Berdasarkan Indikator *Input-Output* — 134
- Gambar 10.1 Keterkaitan antara indikator yang memiliki daya saing rendah dengan strategi yang ditetapkan — 163

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Peringkat Daya Saing Daerah Provinsi di Pulau Sumatra — 3
- Tabel 5.1 Kemampuan Keuangan Daerah Dilihat Berdasarkan Rasio PAD — 68
- Tabel 6.1. Kriteria Tipologi Klassen — 77
- Tabel 6.2. Diagram Matriks SWOT — 80
- Tabel 7.1 Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 — 93
- Tabel 7.2 Kalkulasi Nilai ICOR Provinsi Jambi 2013-2017 (dengan Pendekatan Investasi = PMTB) — 95
- Tabel 7.3 Kalkulasi Nilai ICOR Provinsi Jambi 2013-2017 (dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori) — 97
- Tabel 7.4 Nilai ICOR di Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha Pada Lag 0, Tahun 2013-2017 — 98
- Tabel 7.5 Kebutuhan Investasi untuk Setiap Target Pertumbuhan Ekonomi Berdasar RPJMD Perubahan Provinsi Jambi Tahun 2018-2021 — 100
- Tabel 8.1 Tingkat Daya Saing *Input* Provinsi di Indonesia Berdasarkan Variabel Lingkungan Usaha Produktif — 105
- Tabel 8.2 Tingkat Daya Saing *Input* Provinsi di Indonesia Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah — 108
- Tabel 8.3 Tingkat Daya Saing *Input* Provinsi di Indonesia Berdasarkan Variabel Sumber Daya Manusia — 110
- Tabel 8.4 Tingkat Daya Saing *Input* Provinsi di Indonesia Berdasarkan Variabel Infrastruktur dan Sumber Daya Alam — 113
- Tabel 8.5 Tingkat Daya Saing *Input* Provinsi Secara Keseluruhan di Indonesia — 116
- Tabel 8.6 Tingkat Daya Saing *Output* Provinsi Secara Keseluruhan di Indonesia — 121
- Tabel 8.7 Tingkat Daya Saing *Input Output* Provinsi Secara Keseluruhan di Indonesia — 123

| | |
|------------|--|
| Tabel 8.8 | Tingkat Daya Saing <i>Input</i> Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Berdasarkan Variabel Lingkungan Usaha Produktif — 127 |
| Tabel 8.9 | Tingkat Daya Saing <i>Input</i> Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah — 128 |
| Tabel 8.10 | Tingkat Daya Saing <i>Input</i> Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Berdasarkan Variabel Sumber Daya Manusia — 128 |
| Tabel 8.11 | Tingkat Daya Saing <i>Input</i> Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Berdasarkan Variabel Infrastruktur dan Sumber Daya Alam — 129 |
| Tabel 8.12 | Tingkat Daya Saing <i>Input</i> Kabupaten/Kota Secara Keseluruhan di Provinsi Jambi — 130 |
| Tabel 8.13 | Tingkat Daya Saing <i>Output</i> Kabupaten/Kota Secara Keseluruhan di Provinsi Jambi — 131 |
| Tabel 8.14 | Tingkat Daya Saing <i>Input Output</i> Kabupaten/Kota Secara Keseluruhan di Provinsi Jambi — 132 |
| Tabel 9.1 | Hasil Perhitungan Nilai <i>Location Quotient</i> Per Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi 2010-2017 — 137 |
| Tabel 9.2 | Hasil Perhitungan Nilai <i>Tipologi Klassen</i> Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2017 — 140 |
| Tabel 9.3 | Produk Unggulan Daerah Provinsi Jambi — 144 |
| Tabel 10.1 | Analisis SWOT dan Strategi — 156 |



1. PENDAHULUAN

Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu negara dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Daya saing diidentifikasi dengan masalah produktivitas, yakni dengan melihat tingkat *output* yang dihasilkan untuk setiap *input* yang digunakan. Meningkatnya produktivitas ini disebabkan oleh peningkatan jumlah *input* fisik modal dan tenaga kerja, peningkatan kualitas *input* yang digunakan dan peningkatan teknologi (Porter, 2008).

Abdullah *et al.*, (2002) menyatakan daya saing ekonomi menunjukkan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik. Daya saing daerah mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada aras mikro perusahaan. Hal ini mendefinisikan daya saing daerah sebagai “kemampuan suatu perekonomian” dari pada “kemampuan sektor swasta atau perusahaan”. Pelaku ekonomi bukan hanya perusahaan tetapi meliputi rumah tangga, pemerintah, dan agen-agen ekonomi lainnya. Tujuan akhir dari peningkatan wilayah atau daya saing perekonomian adalah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut (Abdullah *et al.*, 2003).

Dinamika perkembangan ekonomi global terutama di era revolusi industri ke-4 memberikan sinyal akan pentingnya peningkatan daya saing, di tingkat regional, Indonesia secara menyeluruh harus dihadapkan dengan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang pelaksanaannya telah dimulai pada tanggal 31 Desember 2015.

Masyarakat Ekonomi ASEAN akan menjadi tantangan tersendiri bagi Bangsa Indonesia dengan transformasi kawasan ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi, sekaligus menjadikan kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan kompetitif. Pemberlakuan MEA dapat pula dimaknai sebagai harapan akan prospek dan peluang bagi kerja sama ekonomi antar kawasan dalam skala yang lebih luas, melalui integrasi ekonomi regional kawasan Asia Tenggara, yang ditandai dengan terjadinya arus bebas (*free flow*): barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal.

Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia sejatinya memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan dengan meningkatkan skala ekonomi dalam negeri, sebagai basis memperoleh keuntungan, dengan menjadikannya sebagai momentum memacu pertumbuhan ekonomi.

Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi peluang karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Pada sisi investasi, dengan dukungan birokrasi pada aspek kelembagaan dan sumber daya manusianya, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI).

Meningkatnya investasi diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human kapital*) dan mengatasi masalah tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan yang menjadi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam laporan indeks daya saing wilayah edisi 2021, peringkat daya saing Indonesia pada tahun 2021 berada pada posisi 37, naik 3 peringkat dibandingkan tahun lalu yang berada di posisi 40. Meski naik ke posisi 37, peringkat daya saing Indonesia masih di bawah 3 negara tetangga di ASEAN yaitu Thailand yang berada di posisi 28, Malaysia di posisi 25, dan Singapura di posisi 5. Namun, Indonesia masih berada di atas Vietnam

yang berada di posisi 55 dan Filipina di posisi 56 serta Brunei Darussalam di posisi 46. (IMD *World Competitiveness Ranking*, 2021).

Tabel 1.1 menunjukkan pada level provinsi, Sumatera Selatan yang menduduki posisi keempat secara nasional, adalah satu-satunya provinsi di Sumatera yang masuk dalam 5 besar provinsi dengan daya saing tertinggi. Provinsi Jambi berada pada posisi ke-11 secara nasional, dan menempati urutan ketiga di Pulau Sumatera.

Tabel 1.1 Peringkat Daya Saing Daerah Provinsi di Pulau Sumatra

| No. | Provinsi | Peringkat Daya Saing Daerah |
|-----|---------------------------|-----------------------------|
| | | 2020 |
| 1 | Sumatera Selatan | 4 |
| 2 | Kepulauan Riau | 7 |
| 3 | Jambi | 11 |
| 4 | Kepulauan Bangka Belitung | 12 |
| 5 | Bengkulu | 13 |
| 6 | Nanggroe Aceh Darussalam | 15 |
| 7 | Lampung | 16 |
| 8 | Riau | 19 |
| 9 | Sumatera Utara | 20 |
| 10 | Sumatera Barat | 31 |

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (2021)

Demi meningkatkan daya saing, pemerintah pusat terus meningkatkan komitmennya dalam mendukung optimalisasi daya saing guna memacu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan hal ini jugalah yang mendasari terbitnya Inpres No. 6 Tahun 2014 pada 1 September 2014. Melalui Inpres tersebut, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada jajaran pemerintah di seluruh Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan daya saing nasional dan dalam menghadapi globalisasi yang semakin meluas dengan cepat yang didorong oleh perubahan perkembangan teknologi. Berdasarkan latar belakang tersebut, pemerintah daerah Provinsi Jambi mengambil inisiatif untuk melakukan pemetaan daya saing daerah di dalam wilayah administrasinya. Dengan melakukan pemetaan daya saing, selanjutnya dapat dirumuskan strategi

agar Provinsi Jambi mampu berkontribusi besar dalam peningkatan daya saing nasional.

Maksud dari penulisan buku daya saing dan potensi ekonomi daerah Provinsi Jambi adalah untuk menganalisis pola perubahan dan pertumbuhan sektoral dalam perekonomian, serta menentukan sektor-sektor unggulan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan. Adapun tujuan penulisan buku ini adalah untuk: (1) mengetahui tingkat daya saing daerah Provinsi Jambi, (2) menganalisis potensi daya saing daerah Provinsi Jambi, dan (3) memberikan rekomendasi peningkatan daya saing daerah Provinsi Jambi.

Mengacu pada tujuan tersebut, maka sasaran yang diharapkan dapat tercapai dalam penulisan buku daya saing dan potensi ekonomi daerah Provinsi Jambi penulisan buku daya saing dan potensi ekonomi daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut: (1) teridentifikasi daya saing ekonomi Provinsi Jambi, (2) teridentifikasi potensi ekonomi daerah Provinsi Jambi, dan (3) tersedianya rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing daerah Provinsi Jambi.



2. KONSEP DAYA SAING

Konsep daya saing daerah berkembang dari konsep daya saing yang digunakan untuk perusahaan dan negara. Selanjutnya konsep tersebut dikembangkan untuk tingkat negara sebagai daya saing global, khususnya melalui lembaga *World Economic Forum (Global Competitiveness Report)* dan *International Institute for management Development (World Competitiveness Yearbook)*. Daya saing ekonomi suatu negara sering kali merupakan cerminan dari daya saing ekonomi daerah secara keseluruhan. Di samping itu, dengan adanya tren desentralisasi, maka makin kuat kebutuhan untuk mengetahui daya saing pada tingkat daerah (PPSK BI, 2008).

Daya Saing Global

Terdapat berbagai konsep dan pengertian mengenai daya saing. Pengertian daya saing mulai berkembang setelah Porter (1990) mendefinisikan daya saing nasional. Porter (1990) mendefinisikan daya saing nasional sebagai: *“luaran dari kemampuan suatu negara untuk berinovasi dalam rangka mencapai, atau mempertahankan posisi yang menguntungkan dibandingkan dengan negara lain dalam sejumlah sektor-sektor kuncinya.”* Secara eksplisit, Porter (1990) menyatakan bahwa konsep daya saing yang diterapkan pada

level nasional tak lain adalah “produktivitas” yang didefinisikannya sebagai nilai *output* yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Bank Dunia menyatakan hal yang relatif sama dimana “daya saing mengacu kepada besaran serta laju perubahan nilai tambah per unit *input* yang dicapai oleh perusahaan”.

Menurut Cho (2003), definisi daya saing yang paling populer pada tingkat nasional juga dapat ditemukan dalam Laporan Komisi Kemampuan Bersaing Presiden yang ditulis untuk pemerintahan Reagan pada tahun 1984 yaitu sebagai berikut: “Kemampuan bersaing sebuah negara adalah derajat di mana negara itu dapat, di bawah keadaan pasar yang bebas dan adil, menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi uji pasar internasional sementara secara simultan melakukan perluasan pendapatan riil dari para warga negaranya. Kemampuan bersaing pada tingkat nasional didasarkan pada kinerja produktivitas superior” (Cho, 2003).

World Economic Forum (WEF), suatu lembaga internasional yang secara rutin menerbitkan “*Global Competitiveness Report*”, mendefinisikan daya saing nasional sebagai “kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.” Kunci utama sebagai faktor penentu daya saing nasional adalah kebijakan-kebijakan yang tepat, institusi- institusi yang sesuai, serta karakteristik-karakteristik ekonomi lain yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Internasional Institute for Management Development (IMD) dengan publikasinya “*World Competitiveness Yearbook*” mendefinisikan daya saing nasional sebagai “kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, globality dan proximity, serta dengan mengintegrasikan hubungan-hubungan tersebut ke dalam suatu model ekonomi dan sosial.” Akan tetapi, baik Bank Dunia, Porter serta literatur-literatur mengenai daya saing memandang bahwa daya saing tidak secara sempit mencakup hanya sebatas tingkat efisiensi suatu perusahaan. Daya saing mencakup aspek yang lebih luas, tidak berkuat hanya pada level mikro perusahaan, tetapi juga mencakup aspek diluar perusahaan seperti iklim berusaha (*business environment*) yang jelas-jelas diluar kendali perusahaan. Aspek-aspek tersebut dapat bersifat *firm-specific*, *region-specific*, dan bahkan *country-specific* (BI-PPSK-FE UNPAD, 2002).

Martin (2003) menyatakan konsep dan definisi daya saing suatu negara atau suatu daerah mencakup beberapa elemen utama sebagai berikut:

1. Meningkatnya taraf hidup masyarakat.
2. Mampu berkompetisi dengan daerah maupun daerah lain.
3. Mampu memenuhi kewajibannya baik domestik maupun internasional.
4. Dapat menyediakan lapangan kerja.
5. Pembangunan yang berkesinambungan dan tidak membebani generasi yang akan datang (Martin, 2003, dalam PPSK-BI, 2008).

Dari berbagai pengertian daya saing di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat konsensus yang secara tegas mendefinisikan daya saing. Walaupun demikian, hampir semua ahli memiliki kesamaan pandangan mengenai apa saja yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing (Sachs *et al.*, 2000 dalam Abdullah *et al.*, 2002). Oleh karena itu, masih terdapat banyak kemungkinan para ahli dan peneliti untuk mengeksplorasi hal-hal apa saja yang menjadi faktor-faktor penentu daya saing suatu negara.

Daya Saing Daerah

Berbagai literatur yang membahas tentang konsep dan definisi daya saing daerah. Pembahasan mengenai daya saing daerah lebih banyak didominasi oleh laporan atau publikasi terbitan dari kawasan Eropa. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya keinginan dari negara-negara kawasan Eropa untuk mempersempit jarak peringkat daya saing mereka dengan Amerika Serikat, dan semakin meningkatnya konsensus yang menyatakan bahwa daerah merupakan unit spasial utama yang paling penting untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara.

Daya saing daerah menurut definisi yang dibuat Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI) adalah *“kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional.”* Sementara itu Centre for Urban and Regional Studies (CURDS), Inggris mendefinisikan daya saing daerah sebagai *“kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya.”*

The European Commission mendefinisikan daya saing sebagai “kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, diiringi dengan kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, lebih umumnya adalah kemampuan (*regions*) untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi sementara terekspos pada daya saing eksternal” (*European Commission*, 1999 dalam Garnier, Martin dan Tyler, 2004). Sementara Huggins (2007) dalam publikasi “*UK Competitiveness Index*” mendefinisikan daya saing daerah sebagai “kemampuan dari perekonomian untuk menarik dan mempertahankan perusahaan-perusahaan dengan kondisi yang stabil atau dengan pangsa pasar yang meningkat dalam aktivitasnya, dengan tetap mempertahankan atau meningkatkan standar kehidupan bagi semua yang terlibat di dalamnya.” Dalam pengertian daya saing ini, secara tersirat dinyatakan pula bahwa kondisi perekonomian yang kondusif merupakan suatu syarat mutlak untuk meningkatkan daya saing daerah.

Studi mengenai daya saing daerah juga dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi daerah. Studi KPPOD (2005) ini di fokuskan pada daya saing investasi untuk tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2005, studi yang dilakukan oleh KPPOD ini melibatkan 228 kabupaten di Indonesia. KPPOD (2005) ini menyatakan bahwa investasi yang akan masuk ke suatu daerah akan bergantung pada daya saing investasi yang di miliki oleh daerah yang bersangkutan.

Hasil temuan KPPOD menyebutkan bahwa ada dua karakteristik yang umumnya dimiliki oleh daerah-daerah yang mempunyai daya saing tinggi. *Pertama*, daerah-daerah tersebut memiliki kondisi perekonomian yang baik. *Kedua*, adalah daerah-daerah dengan kondisi keamanan, politik, sosial dan budaya yang kondusif. Kondisi perekonomian daerah yang baik dan ditunjang oleh kondisi keamanan, politik, sosial budaya dan birokrasi yang ramah terhadap kegiatan usaha, akan menciptakan daya saing investasi daerah. Kondisi yang baik pada faktor-faktor tersebut akan semakin mempengaruhi daya saing investasi daerah jika didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang cukup dengan kualitas yang baik dan infrastruktur fisik pendukung kegiatan usaha yang memadai (KPPOD, 2005).

Martin dan Tyler (2003) menyebutkan argumen mengapa daerah maupun negara saling berkompetisi:

1. Untuk investasi, melalui kemampuan daerah untuk menarik masuknya modal asing, swasta, dan modal publik;
2. Untuk tenaga kerja, dengan kemampuan untuk menarik masuknya tenaga kerja yang terampil, *entrepreneur-entrepreneur* dan tenaga kerja yang kreatif, dengan cara menyediakan lingkungan yang kondusif dan pasar tenaga kerja domestik.
3. Untuk teknologi, melalui kemampuan daerah untuk menarik aktivitas inovasi dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari konsep dan definisi mengenai daya saing di atas, terdapat kesamaan esensi yang cukup jelas antara daya saing daerah dan daya saing nasional. Dapat diambil satu kesimpulan bahwa dalam mendefinisikan daya saing perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih mendefinisikan daya saing sebagai “kemampuan suatu perekonomian” daripada “kemampuan sektor swasta atau perusahaan.”
2. Pelaku ekonomi (*economic agent*) bukan hanya perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semuanya berpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri peran besar sektor swasta perusahaan dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing.
3. Tujuan dan hasil akhir meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan (*level of living*) adalah konsep yang maha luas yang pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat.
4. Kata kunci dari konsep daya saing adalah “kompetisi.” Disini lah peran keterbukaan terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan. Kata “daya saing” menjadi kehilangan maknanya pada perekonomian yang tertutup.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, akhirnya PPSK-BI mendefinisikan daya saing daerah sebagai: “kemampuan perekonomian daerah dalam

mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.” (Abdullah *et al.*, 2002).

Indikator Utama dan Prinsip Daya Saing Daerah

Penentuan indikator utama daya saing daerah merupakan bagian yang penting dalam analisis daya saing ekonomi daerah. Pemahaman indikator utama daya saing ekonomi daerah yang terbatas dan tidak secara komprehensif menjadikan tidak adanya keseragaman pemahaman yang benar oleh *stakeholders* di tingkat pemerintah daerah dan pada gilirannya akan dapat menyebabkan adanya perbedaan analisis dan kesimpulan terhadap tingkat daya saing yang dimiliki oleh suatu daerah (Hidayat, 2012).

Irawati *et al.*, (2012) dalam penelitiannya yang mengukur tingkat daya saing daerah menggunakan variabel perekonomian daerah, variabel infrastruktur, sumber daya alam, dan variabel sumber daya manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara Santoso (2009) dalam penelitiannya yang mengukur daya saing kota-kota besar di Indonesia menyebutkan faktor utama pembentuk daya saing terdiri dari 5 indikator utama, yaitu: (1) lingkungan usaha produktif, (2) perekonomian daerah, (3) ketenagakerjaan dan sumber daya manusia, (4) infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan, (5) perbankan dan lembaga keuangan. Hidayat (2012) dalam penelitiannya yang mengukur daya saing ekonomi Kota Medan, menyebutkan beberapa indikator utama penentu daya saing ekonomi Kota Medan yaitu: ekonomi daerah, infrastruktur, sistem keuangan, kelembagaan, dan sosial politik.

Potret daya saing daerah kabupaten/kota di Indonesia secara keseluruhan merupakan representasi dari kinerja-kinerja indikator-indikator pembentuknya, semakin baik kinerja indikator-indikator tersebut, maka semakin tinggi pula daya saing daerah suatu kabupaten/kota, sebaliknya apabila kinerja indikator-indikator tersebut rendah, maka semakin rendah pula daya saing kabupaten/kota tersebut (PPSK BI, 2008).

Penelitian yang dilakukan Abdullah *et al.*, (2002) menyebutkan indikator-indikator utama yang dianggap menentukan daya saing daerah adalah (1) perekonomian daerah, (2) keterbukaan, (3) sistem keuangan, (4) infrastruktur dan sumber daya alam, (5) ilmu pengetahuan dan teknologi,

(6) sumber daya manusia, (7) kelembagaan, (8) *governance* dan kebijakan pemerintah, dan (9) manajemen dan ekonomi mikro. Masing-masing indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perekonomian Daerah

Perekonomian daerah merupakan ukuran kinerja secara umum dari perekonomian makro (daerah) yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral perekonomian, serta tingkat biaya hidup, indikator kinerja ekonomi makro mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian setidaknya dalam jangka pendek.
- b. Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam jangka panjang.
- c. Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi di masa lalu.
- d. Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada suatu daerah, maka akan semakin kompetitif perusahaan-perusahaan yang akan bersaing.

2. Keterbukaan

Indikator keterbukaan merupakan ukuran seberapa jauh perekonomian suatu daerah berhubungan dengan daerah lain yang tercermin dari perdagangan daerah tersebut dengan daerah lain dalam cakupan nasional dan internasional. Indikator ini menentukan daya saing melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keberhasilan suatu daerah dalam perdagangan internasional merefleksikan daya saing perekonomian daerah tersebut.
- b. Keterbukaan suatu daerah baik dalam perdagangan domestik maupun internasional meningkatkan kinerja perekonomiannya.
- c. Investasi internasional mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien ke seluruh penjuru dunia.
- d. Daya saing yang didorong oleh ekspor terkait dengan orientasi pertumbuhan perekonomian daerah.
- e. Mempertahankan standar hidup yang tinggi mengharuskan integrasi dengan internasional.

3. Sistem Keuangan

Indikator sistem keuangan merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non-perbankan di daerah untuk memfasilitasi aktivitas perekonomian yang memberikan nilai tambah. Sistem keuangan suatu daerah akan mempengaruhi alokasi faktor produksi yang terjadi di perekonomian daerah tersebut. Indikator sistem keuangan ini mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Sistem keuangan yang baik mutlak diperlukan dalam memfasilitasi aktivitas perekonomian daerah.
- b. Sektor keuangan yang efisien dan terintegrasi secara internasional mendukung daya saing daerah.

4. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Infrastruktur dalam hal ini merupakan indikator seberapa besar sumber daya seperti modal fisik, geografis, dan sumber daya alam dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah. Indikator ini mendukung daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Modal fisik berupa infrastruktur baik ketersediaan maupun kualitasnya mendukung aktivitas ekonomi daerah.
- b. Modal alamiah baik berupa kondisi geografis maupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga mendorong aktivitas perekonomian daerah.
- c. Teknologi informasi yang maju merupakan infrastruktur yang mendukung berjalannya aktivitas bisnis di daerah yang berdaya saing.

5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi mengukur kemampuan daerah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi yang meningkatkan nilai tambah. Indikator ini mempengaruhi daya saing daerah melalui beberapa prinsip di bawah ini:

- a. Keunggulan kompetitif dapat dibangun melalui aplikasi teknologi yang sudah ada secara efisien dan inovatif.
- b. Investasi pada penelitian dasar dan aktivitas yang inovatif yang menciptakan pengetahuan baru sangat krusial bagi daerah ketika

melalui tahapan pembangunan ekonomi yang lebih maju.

- c. Investasi jangka panjang berupa R&D akan meningkatkan daya saing sektor bisnis.

6. Sumber Daya Manusia

Indikator sumber daya manusia dalam hal ini ditujukan untuk mengukur ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia. Faktor SDM ini mempengaruhi daya saing daerah berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. Angkatan kerja dalam jumlah besar dan berkualitas akan meningkatkan daya saing suatu daerah.
- b. Pelatihan dan pendidikan adalah cara yang paling baik dalam meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas.
- c. Sikap dengan nilai yang dianut oleh tenaga kerja juga menentukan daya saing suatu daerah.
- d. Kualitas hidup masyarakat suatu daerah menentukan daya saing daerah tersebut begitu juga sebaliknya.

7. Kelembagaan

Kelembagaan merupakan indikator yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum, dan aspek keamanan mampu mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian di daerah. Pengaruh faktor kelembagaan terhadap daya saing daerah didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Stabilitas sosial dan politik melalui sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik merupakan iklim yang kondusif dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah yang berdaya saing.
- b. Peningkatan daya saing ekonomi suatu daerah tidak akan dapat tercapai tanpa adanya sistem hukum yang baik serta penegakan hukum yang independen.
- c. Aktivitas perekonomian suatu daerah tidak akan dapat berjalan secara optimal tanpa didukung oleh situasi keamanan yang kondusif.

8. *Governance* dan Kebijakan Pemerintah

Indikator *Governance* dan kebijakan pemerintah dimaksudkan sebagai ukuran dari kualitas administrasi pemerintahan daerah, khususnya dalam rangka menyediakan infrastruktur fisik dan peraturan-peraturan daerah. Secara umum pengaruh faktor *governance* dan

kebijakan pemerintah bagi daya saing daerah dapat didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Dengan tujuan menciptakan iklim persaingan yang sehat intervensi pemerintah dalam perekonomian sebaiknya diminimalkan.
 - b. Pemerintah daerah berperan dalam menciptakan kondisi sosial yang terprediksi serta berperan pula dalam meminimalkan risiko bisnis.
 - c. Efektivitas administrasi pemerintahan daerah dalam menyediakan infrastruktur dan aturan-aturan berpengaruh terhadap daya saing ekonomi suatu daerah.
 - d. Efektivitas pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi dan menyediakan informasi tertentu pada sektor swasta mendukung daya saing ekonomi suatu daerah.
 - e. Fleksibilitas pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan ekonomi merupakan faktor yang kondusif dalam mendukung peningkatan daya saing daerah.
9. Manajemen dan Ekonomi Mikro

Dalam indikator manajemen dan ekonomi mikro pengukuran yang dilakukan dikaitkan dengan pertanyaan seberapa jauh perusahaan di daerah dikelola dengan cara inovatif, menguntungkan dan bertanggung-jawab. Prinsip- prinsip yang relevan terhadap daya saing daerah di antaranya adalah:

- a. Rasio harga/ kualitas yang kompetitif dari suatu produk mencerminkan kemampuan manajerial perusahaan-perusahaan yang berada di suatu daerah.
- b. Orientasi jangka panjang manajemen perusahaan akan meningkatkan daya saing daerah dimana perusahaan tersebut berada.
- c. Efisiensi dalam aktivitas perekonomian ditambah dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan adalah keharusan bagi perusahaan yang kompetitif.
- d. Kewirausahaan sangat krusial bagi aktivitas ekonomi pada masa-masa awal.
- e. Dalam usaha yang sudah mapan, manajemen perusahaan memerlukan keahlian dalam mengintegrasikan serta membedakan kegiatan-kegiatan usaha.

Aspek Daya Saing Daerah

Karena banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur daya saing daerah, maka ditentukan aspek tertentu yang dapat diterima secara akademis sehingga indikator yang dihasilkan tersebut dapat menggambarkan daya saing daerah tersebut. Aspek daya saing daerah yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan modifikasi indikator dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Namun demikian fokus yang digunakan dalam analisis daya saing ini tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang mencakup analisis kinerja atas 4 (empat) fokus, yaitu:

1. Fokus kemampuan ekonomi daerah.
2. Fokus infrastruktur wilayah.
3. Fokus iklim berinvestasi.
4. Fokus sumber daya manusia.

1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut:

- a. Tingkat kenaikan pendapatan daerah
- b. Tingkat stabilitas harga pangan
- c. Tingkat stabilitas pasokan pangan
- d. Tingkat produktivitas pertanian
- e. Tingkat produktivitas peternakan
- f. Cakupan produksi daerah yang diekspor ke luar negeri
- g. Cakupan ketersediaan pasar tradisional daerah di setiap kecamatan
- h. Tingkat pertumbuhan industri daerah
- i. Tingkat kapasitas IPTEK sistem produksi

2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*)

dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

- a. Tingkat pengurangan luas genangan.
- b. Persentase keterhubungan pusat-pusat produksi di wilayah kota.
- c. Persentase cakupan pelayanan sistem drainase perkotaan.
- d. Persentase kondisi jalan kota yang baik dan sedang.
- e. Tingkat ketersediaan jalan di seluruh wilayah kota.
- f. Tingkat ketersediaan sistem informasi/*database* jalan yang lengkap dan terbaharui.
- g. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan yang layak dan memadai.
- h. Tingkat ketersediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- i. Cakupan pelayanan bencana kebakaran.
- j. Persentase Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik/ perkotaan.
- k. Tingkat ketersediaan, publikasi dan pengembangan Sistem Informasi pembina Jasa Konstruksi (SIP JK).
- l. Tingkat ketersediaan prasarana Angkutan yang terpelihara.
- m. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan.
- n. Tingkat ketersediaan penunjang pengendalian simpang dan ruas jalan dalam kondisi baik.
- o. Tingkat ketersediaan pelayanan.
- p. Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dll) pada jalan di wilayah kota.
- q. Tingkat ketersediaan fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada berbagai jenis jalan di wilayah kota.
- r. Tingkat pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/ Perkotaan di wilayah. perkotaan.
- s. Persentase pengurangan sampah di perkotaan.
- t. Persentase pengangkutan sampah.
- u. Persentase pengoperasian TPA.
- v. Persentase berfungsinya alat sumur pantau yang terintegrasi dengan komunikasi data.

- w. Persentase usaha dan/atau data kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.
 - x. Persentase jumlah usaha/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dan pencemaran udara.
3. Iklim Berinvestasi
- Indikator yang digunakan untuk mengukur daya saing daerah dalam hal iklim berinvestasi mencakup lima indikator, yaitu:
- a. Tingkat pertumbuhan investasi daerah.
 - b. Tingkat Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - c. Persentase Bangunan yang mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - d. Tingkat pelayanan izin usaha jasa konstruksi (IUJK).
 - e. Tingkat pelayanan waktu pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
4. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Di samping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.



3. POTENSI EKONOMI

Teori Basis Ekonomi

Teori basis ini didasari oleh pemikiran J.S. Mill (1948) yaitu bahwa dalam memecahkan masalah pertumbuhan dan pemerataan regional diisyaratkan adanya perdagangan antar-daerah, dengan mewujudkan spesialisasi daerah. Dasar pemikiran teori basis ekonomi menurut Kadariah (1985) adalah karena industri basis menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar di dalam maupun di luar daerah, maka penjualan hasil keluar daerah itu akan mendatangkan arus pendapatan ke dalam daerah tersebut. Arus pendapatan ini menyebabkan baik kenaikan konsumsi maupun kenaikan investasi di daerah itu, yang pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan kesempatan kerja. Jika di daerah tersebut ada pengangguran, maka kesempatan kerja yang baru itu dapat menampungnya, atau jika di daerah itu tidak terdapat pengangguran maka daerah itu mempunyai daya tarik bagi orang-orang dari luar daerah yang mencari pekerjaan. Kenaikan pendapatan ini tidak hanya menaikkan permintaan terhadap hasil industri basis melainkan juga akan menaikkan permintaan hasil industri lokal non basis dan permintaan ini selanjutnya akan menaikkan investasi di industri-industri non basis. Dengan kata lain penanaman modal di sektor-sektor lokal merupakan investasi sebagai akibat kenaikan pendapatan dari industri-industri basis.

Bertambah banyaknya sektor basis di suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan terhadap barang dan jasa di dalamnya, meningkatkan nilai investasi dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Dengan demikian, sesuai dengan namanya kegiatan basis mempunyai peran sebagai penggerak pertama dimana setiap perubahan mempunyai efek *multiplier* terhadap perekonomian agregat. Berdasarkan gagasan inilah, maka para ahli berpendapat bahwa sektor-sektor basis inilah yang seharusnya dikembangkan di suatu daerah.

Potensi Ekonomi Daerah

Setiap daerah memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan dalam upaya memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Suparmoko, 2002).

Tujuan dari pengembangan ekonomi di daerah pada umumnya adalah peningkatan pendapatan riil per kapita serta adanya unsur keadilan atau pemerataan dalam penghasilan dan kesempatan berusaha. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan strategi yang menyeluruh dalam proses pengembangan potensi ekonomi di daerah, sebagai pedoman dan pegangan dalam setiap pengambilan kebijakan.

Dalam mempersiapkan strategi pengembangan potensi ekonomi di daerah, setidaknya terdapat lima langkah yang harus ditempuh, yaitu:

1. Mengidentifikasi sektor-sektor kegiatan mana yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing sektor.
2. Mengidentifikasi sektor-sektor yang potensinya rendah untuk dikembangkan dan mencari faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya potensi sektor tersebut untuk dikembangkan.
3. Mengidentifikasi sumber daya (faktor-faktor produksi) yang ada termasuk sumber daya manusianya dan yang siap digunakan untuk mendukung perkembangan setiap setor yang bersangkutan.

4. Dengan model pembobotan terhadap variabel - variabel kekuatan dan kelemahan untuk setiap sektor dan sub-sektor, maka akan ditemukan sektor- sektor andalan yang selanjutnya dianggap sebagai potensi ekonomi yang patut dikembangkan di daerah yang bersangkutan.
5. Menentukan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan sektor-sektor andalan yang diharapkan dapat menarik sektor-sektor lain untuk tumbuh sehingga perekonomian akan dapat berkembang dengan sendirinya (*self propelling*) secara berkelanjutan (*sustainable development*).

Persoalan pokok dalam pembangunan daerah sering terletak pada sumber daya dan potensi yang dimiliki guna menciptakan peningkatan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut ada kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk dapat mengidentifikasi potensi- potensi yang tersedia dalam daerah dan diperlukan sebagai kekuatan untuk pembangunan perekonomian wilayah (Sjafrizal, 2008).

Pengembangan wilayah diartikan sebagai semua upaya yang dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan wilayah yang ditandai dengan pemerataan pembangunan dalam semua sektor dan pada seluruh bagian wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara serentak pada semua tempat dan semua sektor perekonomian, tetapi hanya pada titik-titik tertentu dan pada sektor-sektor tertentu pula. Disebutkan juga bahwa investasi diprioritaskan pada sektor-sektor utama yang berpotensi dan dapat meningkatkan pendapatan wilayah dalam jangka waktu relatif singkat (Glasson, 1990).

Dari definisi tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa wilayah yang memiliki potensi berkembang lebih besar akan berkembang lebih pesat, kemudian pengembangan wilayah tersebut akan merangsang wilayah sekitarnya. Bagi sektor yang memiliki potensi berkembang lebih besar cenderung dikembangkan lebih awal yang kemudian diikuti oleh perkembangan sektor lain yang kurang potensial.

Dalam pengembangan wilayah, pengembangan tidak dapat dilakukan serentak pada semua sektor perekonomian akan tetapi diprioritaskan pada pengembangan sektor-sektor perekonomian yang potensi berkembangnya cukup besar. Karena sektor ini diharapkan dapat tumbuh dan berkembang pesat yang akan merangsang sektor-sektor lain yang terkait untuk berkembang mengimbangi perkembangan sektor potensial tersebut.

Perkembangan ekonomi suatu wilayah membangun suatu aktivitas perekonomian yang mampu tumbuh dengan pesat dan memiliki keterkaitan yang tinggi dengan sektor lain sehingga membentuk *forward linkage* dan *backward linkage*. Pertumbuhan yang cepat dari sektor potensial tersebut akan mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya yang pada akhirnya secara tidak langsung sektor perekonomian lainnya akan mengalami perkembangan.

Jadi disimpulkan bahwa pengembangan suatu sektor ekonomi potensial dapat menciptakan peluang bagi berkembangnya sektor lain yang terkait, baik sebagai *input* bagi sektor potensial maupun sebagai imbas dari meningkatnya kebutuhan tenaga kerja sektor potensial yang mengalami peningkatan pendapatan. Hal inilah yang memungkinkan pengembangan sektor potensial dilakukan sebagai langkah awal dalam pengembangan perekonomian wilayah dan pengembangan wilayah secara keseluruhan.

Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Basis

Potensi ekonomi di daerah pada dasarnya dapat dibagi ke dalam dua sektor: yaitu sektor ekonomi yang menjadi kegiatan basis dan sektor ekonomi yang bukan kegiatan basis.

1. Kegiatan-kegiatan basis (*basic activities*) adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke tempat-tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atau kepada orang-orang yang datang dari luar wilayah perekonomian bersangkutan;
2. Kegiatan-kegiatan yang bukan basis (*non basic activities*) adalah kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat daerah yang bersangkutan, kegiatan ini tidak mengekspor barang dan jasa, produksi dan pemasaran terbatas pada wilayah daerah yang bersangkutan.

Pada dasarnya teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan investasi industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, dan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (*job creation*).

Inti dari teori ini adalah sektor unggulan menghasilkan barang-barang dan jasa untuk dipasarkan di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap sektor unggulan tetapi juga menaikkan permintaan akan sektor non unggulan. Berdasarkan teori ini sektor unggulan yang harus dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Arsyad, 1999).

Strategi pembangunan daerah yang muncul didasarkan pada teori ini adalah di mana arah penekanannya terhadap arti pentingnya bantuan (*aid*) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar baik secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada akan didirikan di daerah tersebut (Arsyad, 1999).

Menurut Glasson (1990) kegiatan-kegiatan Basis (*Basic activities*) adalah kegiatan mengeksport barang-barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis (*Non basic activities*) adalah kegiatan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengeksport barang jadi; luas lingkup produksi dan daerah pasar yang terutama bersifat lokal. Implisit di dalam pembagian kegiatan-kegiatan ini terdapat hubungan sebab akibat yang membentuk teori basis ekonomi. Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa sehingga akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengurangi pendapatan suatu daerah dan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa dan akan menurunkan volume kegiatan (Richardson, 1977). Kegiatan basis mempunyai peranan penggerak pertama (*Prime mover role*) dimana setiap perubahan mempunyai efek *multiplier* terhadap perekonomian regional.



4. PEMBANGUNAN WILAYAH

Konsep Wilayah

Wilayah diartikan sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu dalam bagian-bagiannya tergantung secara internal. Wilayah dapat dibagi menjadi empat jenis (Budiharsono, 2001): (1) wilayah homogen; (2) wilayah nodal; (3) wilayah administratif; dan (4) wilayah perencanaan.

1. Wilayah Homogen

Konsep wilayah homogen dipandang sebagai daerah-daerah geografik yang dikaitkan bersama-sama menjadi satu daerah tunggal, apabila daerah-daerah tersebut memiliki ciri-ciri yang seragam/relatif sama (Richardson, 1997). Ciri-ciri kehomogenan itu dapat bersifat ekonomi misalnya daerah dengan struktur produksi dan konsumsi yang serupa, bersifat geografi misalnya wilayah yang mempunyai topografi/iklim yang sama, bahkan dapat juga bersifat sosial/politik misalnya kepribadian suatu wilayah yang bersifat tradisional kepada partai. Dengan demikian, apabila terjadi suatu perubahan pada suatu wilayah akan berpengaruh pada wilayah lainnya.

Daerah Pantura Jawa Barat (Indramayu, Subang, dan Karawang) merupakan salah satu contoh wilayah homogen dari segi produksi

padi. Hal ini berarti setiap perubahan yang terjadi di wilayah tersebut, seperti subsidi harga pupuk, perubahan harga padi dan sebagainya akan mempengaruhi seluruh bagian wilayah tersebut dengan proses yang sama.

2. Wilayah Nodal

Wilayah nodal merupakan satuan-satuan yang heterogen dan memiliki hubungan yang erat satu sama lain dengan distribusi penduduk manusia, sehingga terbentuk suatu kota-kota besar, kotamadya maupun desa-desa. Ciri umum pada daerah-daerah nodal adalah penduduk kota tidak tersebar secara merata di antara pusat-pusat yang sama besarnya, melainkan tersebar pula di antara pusat-pusat yang besarnya berbeda-beda dan secara keseluruhan membentuk suatu hirarki perkotaan (*urban hierarchy*), sehingga timbul ketergantungan antara pusat-pusat (inti) dan daerah belakangnya (*hinterland*). Hal ini menyebabkan terjadinya pertukaran barang dan jasa secara intern di dalam wilayah tersebut. Daerah belakang akan menjual barang-barang mentah dan jasa tenaga kerja kepada daerah inti, sedangkan daerah inti akan menjual ke daerah belakang dalam bentuk barang jadi.

Contoh daerah nodal adalah Provinsi DKI Jakarta dan BOTABEK (Bogor, Tangerang, Bekasi) yang mana DKI sebagai daerah inti dan BOTABEK sebagai daerah belakangnya (Budiharsono, 2001).

3. Wilayah Administratif

Wilayah administratif merupakan wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan/politik, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan RT/RW. Hal ini disebabkan dua faktor, yaitu: (1) dalam melaksanakan kebijaksanaan dan rencana pembangunan wilayah diperlukan tindakan dari berbagai badan pemerintahan; dan (2) wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan suatu administrasi pemerintah lebih mudah dianalisis (Glasson, 1977).

4. Wilayah Perencanaan

Wilayah perencanaan didefinisikan sebagai wilayah yang memperlihatkan kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan harus memiliki ciri-ciri: (1) cukup besar untuk mengambil suatu keputusan-keputusan investasi yang berskala ekonomi; (2) mampu mengubah industrinya sendiri dengan tenaga

kerja yang ada; (3) memiliki struktur ekonomi yang homogen; (4) mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan; (5) menggunakan suatu cara pendekatan perencanaan pembangunan; (6) masyarakat dalam wilayah mempunyai kesadaran bersama terhadap persoalan-persoalannya.

Penggunaan konsep wilayah (region) tersebut ditentukan oleh sifat dari analisa ekonomi regional yang dilakukan. Pada analisa yang lebih bersifat makro, *homogeneous region*, *planning region*, *administrative region* lebih banyak digunakan. Sedangkan untuk analisa yang bersifat mikro, nodal region akan lebih banyak digunakan. Namun demikian, pembagian penggunaan konsep region yang demikian tidaklah bersifat mutlak, karena dalam hal tertentu pengelompokan wilayah tersebut dapat dilakukan secara bersamaan atau merupakan gabungan (Sjafrizal, 2008).

Empat klasifikasi wilayah pembangunan menurut J. Friedman dan Alonso yaitu, (Adisasmita, 2005): (1) *metropolitan regions*, (2) *development axes*, (3) *frontier regions*, dan (4) *depressed regions*. *Metropolitan regions* atau wilayah-wilayah metropolitan sering kali disebut pula sebagai wilayah-wilayah inti (*core regions*) atau kutub-kutub pertumbuhan (*growth poles*). Pusat-pusat pengembangan ini merupakan kota-kota besar dengan segala kegiatan dan fasilitas industri, perdagangan, transportasi dan komunikasi, keuangan, perbankan, serta administrasi pemerintahan, yang keseluruhannya mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan wilayah disekitarnya (*hinterland*) dan kota-kota kecil lainnya (*small centres*).

Development axes atau poros pembangunan yaitu meliputi wilayah-wilayah yang terletak pada jaringan transportasi yang menghubungkan dua wilayah metropolitan atau lebih. Dapat dikatakan bahwa prospek pembangunan wilayah-wilayah tersebut kurang lebih akan proporsional dengan tingkat dan luas pembangunan wilayah-wilayah yang dihubungkan yaitu poros pembangunan. *Frontier regions* atau wilayah-wilayah perbatasan. Dengan adanya kemajuan teknologi baru, tekanan penduduk, demikian juga tujuan-tujuan nasional baru mendorong pembangunan diarahkan menuju ke wilayah-wilayah yang belum diolah atau wilayah-wilayah yang terletak di wilayah perbatasan. *Depressed region* atau wilayah-wilayah yang mengalami kemandegan atau penurunan dalam pembangunan karena tidak memiliki potensi sumber daya pembangunan yang dapat diandalkan, misalnya wilayah yang tandus dan gersang.

Menurut Okun dan Richardson, tingkat kemakmuran dinyatakan dengan pendapatan per kapita dan kemampuan berkembang dikaitkan dengan laju pertumbuhan pembangunan. Selanjutnya berdasarkan kriteria tersebut, pembagian wilayah dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. *Low per capita income and stagnant regions* (LS) atau wilayah-wilayah yang mempunyai pendapatan per kapita rendah dan kurang berkembang.
2. *High per capita income and stagnant regions* (HS) atau wilayah-wilayah yang mempunyai pendapatan per kapita tinggi tetapi kurang berkembang.
3. *Low per capita income and growing regions* (LG) atau wilayah-wilayah yang mempunyai pendapatan per kapita rendah tetapi berkembang.
4. *High per capita income and growing regions* (HG) atau wilayah-wilayah yang mempunyai pendapatan per kapita tinggi dan berkembang.

Strategi Pembangunan Wilayah

Pengembangan wilayah seharusnya diutamakan pada pengembangan potensi sumber daya alam dan potensi lokal di wilayah tersebut dimana mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dalam mencapai tujuan pembangunan. Strategi pembangunan wilayah adalah strategi keterkaitan yaitu terjadi pada suatu wilayah yang dari sisi *supply* atau dari sisi *demand* relatif lebih tinggi tetapi terbatas akan sumber daya. Keterbatasan atau kelebihan dari suatu wilayah seharusnya dapat dipertemukan sehingga perekonomian wilayah secara keseluruhan dapat meningkat. Strategi berbasis keterkaitan antar wilayah pada awalnya dapat diwujudkan dengan pengembangan keterkaitan fisik antar wilayah dengan membangun berbagai infrastruktur fisik seperti jaringan transportasi jalan, pelabuhan, jaringan komunikasi dan lainnya yang dapat menciptakan keterkaitan sinergis antar wilayah (Rustiadi *et al.*, 2007). Menurut Lorenzo (2002) kebijakan pembangunan pemerintah yang mendorong wilayah miskin dalam rangka menyetarakan standar hidup dengan wilayah maju maka pemerintah dapat menggunakan tiga instrumen utama di antaranya desentralisasi keuangan, perbaikan sistem perdagangan dan penyediaan infrastruktur yang tepat. Akan tetapi keterkaitan fisik saja tidak cukup,

harus disertai dengan pengembangan keterkaitan yang lebih luas yakni disertai dengan kebijakan-kebijakan menciptakan struktur intensif yang mendorong keterkaitan yang sinergis antar wilayah. Pengembangan keterkaitan yang tidak tepat sasaran dapat mendorong *backwash* yang lebih masif, sehingga pada akhirnya justru meningkatkan kesenjangan dan ketidakberimbangan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu keterkaitan antar wilayah yang diharapkan adalah bentuk-bentuk keterkaitan yang saling memperkuat bukan memperlemah.

Paradigma baru pembangunan diarahkan kepada terjadinya pemerataan (*equity*), pertumbuhan (*eficiency*), dan keberlanjutan (*sustainability*) dalam pembangunan ekonomi. Fokus pembangunan lebih diorientasikan pada pembangunan spasial pada tingkat wilayah dan lokal dengan mengutamakan sektor pertanian sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Dari segi konsep ekonomi, efisiensi Pareto dalam alokasi sumber daya dapat dilakukan dengan memadukan kebijakan pemerintah pada suatu batas tertentu seperti target pemerataan melalui transfer, perpajakan dan subsidi sedangkan proses selanjutnya diserahkan pada *mekanisme pasar (market friendly)*. Untuk mendukung terjadinya proses tersebut, diperlukan penegasan hak-hak masyarakat daerah dan lokal (*local property right*) yang semula terpusat akan digeser menjadi penegasan *property right* yang terdesentralisasi. Pertumbuhan kota-kota daratan juga dapat bergeser ke wilayah lain seperti wilayah pesisir (perdesaan) dengan diberikan fasilitas infrastruktur kota di wilayah desa pesisir untuk kegiatan wisata dan kegiatan produksi serta perdagangan lain sehingga akumulasi modal dapat memberikan dampak *multiplier* kepada masyarakat lokal (Rustiadi, 2011).

Kebijakan Pembangunan Wilayah

Kebijakan pembangunan regional pada dasarnya merupakan intervensi pemerintah, baik secara nasional maupun regional untuk mendorong proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan suatu kondisi pembangunan atau masyarakat yang diinginkan, baik pada saat sekarang maupun untuk periode tertentu dimasa mendatang. Sasaran akhir dari kebijakan pembangunan tersebut adalah untuk dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat (Sjafrizal, 2008).

Sama halnya dengan tingkat nasional, kebijakan pembangunan daerah juga diperlukan pada tingkat regional. Kebijakan pada tingkat regional diperlukan karena kondisi, permasalahan, dan potensi pembangunan yang dimiliki oleh suatu wilayah umumnya berbeda satu sama lainnya sehingga kebijakan yang diperlukan juga tidak sama. Di samping itu, antara suatu daerah dengan daerah lainnya akan mempengaruhi pula kondisi dan pembangunan pada daerah terkait. Karena itu, kebijakan pada tingkat nasional yang diberlakukan secara umum pada seluruh wilayah tidak akan sesuai untuk memecahkan masalah pembangunan pada masing-masing daerah. Untuk dapat memaksimalkan proses pembangunan daerah, maka kebijakan pembangunan regional perlu diterapkan untuk masing-masing daerah.

Sasaran pembangunan menurut Todaro (2006) yaitu:

1. Meningkatkan persediaan dan perluasan pembagian/pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan, dan lingkungan.
2. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi untuk meningkatkan kesadaran harga diri baik individu maupun nasional.
3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua pilihan individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

Pada kenyataannya, tidak semua wilayah dapat mewujudkan hal tersebut sehingga pembangunan akhirnya tidak merata di seluruh wilayah. Perbedaan pembangunan antarwilayah dapat dijelaskan oleh sejumlah teori, yakni teori basis ekonomi, teori lokasi, dan teori daya tarik industri (Tambunan, 2003).

1. Teori Ekonomi Basis

Teori ini menjelaskan bahwa faktor utama penentu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh hubungan langsung permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi sektor industri di suatu wilayah yang menggunakan sumber daya produksi lokal (tenaga kerja, bahan baku, dan produk unggulan yang diekspor) akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita dan penciptaan lapangan kerja di wilayah tersebut.

2. Teori Lokasi

Teori ini digunakan untuk menentukan pengembangan kawasan industri di suatu wilayah. Lokasi usaha ditempatkan pada suatu tempat yang mendekati bahan baku atau pasar. Hal ini ditentukan berdasarkan tujuan perusahaan dalam rangka memaksimalkan keuntungan dengan biaya serendah mungkin.

3. Teori Daya Tarik Industri

Teori ini dilatarbelakangi oleh adanya pembangunan industri di suatu wilayah, sehingga faktor-faktor daya tarik usaha antara lain produktivitas, industri-industri yang saling berkaitan, daya saing masa depan, spesialisasi industri, potensi ekspor, dan prospek permintaan domestik.

Dengan demikian, konsep pembangunan wilayah secara mendasar mengandung prinsip pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai sasaran nasional yang bertumpu pada trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Dalam hal ini pembangunan wilayah merupakan upaya pemerataan pembangunan dalam pengembangan wilayah-wilayah tertentu melalui berbagai kegiatan sektoral secara terpadu, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah itu secara efektif dan efisien serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Tambunan, 2003).

Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Dalam konteks Indonesia, adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah telah menyebabkan tidak tercapainya salah satu trilogi pembangunan nasional, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di antara berbagai daerah. Karena itu, kesadaran akan perlunya perencanaan

pembangunan daerah menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional hingga terus berkembang (Ambardi dan Prihawantoro, 2002). Beberapa faktor penyebab ketimpangan pembangunan antarwilayah, yaitu (Sjafrizal, 2008):

1. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan sumber daya alam di Indonesia ternyata cukup besar. Ada daerah yang mempunyai minyak dan gas alam, tetapi daerah lain tidak mempunyainya. Ada beberapa daerah yang mempunyai deposit batu bara yang cukup besar, tapi daerah lain tidak ada. Demikian juga halnya dengan tingkat kesuburan lahan yang juga sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah.

2. Perbedaan Kondisi Demografis

Kondisi demografi yang dimaksud di sini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan.

3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antardaerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah karena bila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan.

4. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar.

5. Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah

Investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak

investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat.

Kebijakan untuk menanggulangi ketimpangan pembangunan wilayah dapat dilakukan dengan cara (Sjafrizal, 2008):

1. Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan

Prasarana perhubungan yang dimaksud adalah fasilitas jalan, terminal, dan pelabuhan laut guna mendorong proses perdagangan antardaerah.

2. Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan

Melalui proses transmigrasi dan migrasi spontan ini, kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh daerah terbelakang akan dapat pula diatasi sehingga proses pembangunan daerah bersangkutan dapat pula digerakkan.

3. Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Kebijakan ini diperkirakan akan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah karena pusat pertumbuhan tersebut menganut konsep konsentrasi dan desentralisasi secara sekaligus.

4. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Adanya pelaksanaan otonomi daerah, maka aktivitas pembangunan daerah, termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakkan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat.



5. PEMBANGUNAN EKONOMI

Bappenas (1999) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Sedangkan pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui otonomi daerah, pengaturan sumber daya nasional yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintah serta layanan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata dan berkeadilan. Pembangunan adalah proses natural mewujudkan cita-cita bernegara yaitu terwujudnya masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran yaitu meningkatnya konsumsi disebabkan meningkatnya pendapatan (Sumodiningrat 2001). Kemudian secara sederhana pembangunan diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik (Riyadi dan Bratakusumah 2003). Sedangkan Saefulhakim (2003) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang terencana (terorganisasikan) ke arah

tersedianya alternatif/pilihan yang lebih banyak bagi pemenuhan tuntutan hidup yang paling manusiawi sesuai dengan tata nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Menurut Todaro (2006) bahwa pembangunan adalah proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, perilaku sosial, dan institusi nasional. Di samping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan. Definisi tersebut memberikan suatu pemahaman bahwa pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Pertumbuhan dapat berupa pengembangan atau perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Wiranto (1997) mendefinisikan pembangunan dalam konsep pembangunan yang bertumpu pada masyarakat adalah untuk mengembangkan kehidupan suatu masyarakat dan harus dapat dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat. Pengembangan wilayah dilakukan dengan pendekatan sektoral dimana terdapat pengelompokan kegiatan dalam sektor yang kemudian di analisis agar dapat mengetahui sektor mana yang berpotensi dan dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik wilayah (Tarigan, 2005). Pembangunan sebagai suatu proses perubahan tidak akan bisa lepas dari perencanaan maka perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik (Riyadi dan Bratakusumah 2003).

Rustiadi *et al.*, (2007) mendefinisikan pembangunan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan sebuah kondisi yang dapat menyediakan berbagai alternatif bagi pencapaian aspirasi setiap warga negara. Menurut Todaro (2006), pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan tingkat kesenjangan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat

kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran.

Keberhasilan ekonomi dapat dilihat pada proses pembangunan di masyarakat yang memiliki tujuan inti pembangunan yaitu; (1) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan, (2) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang semua itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan, (3) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari sikap ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau Negara bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka (Todaro dan Smith, 2003).

Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pendapatan masyarakat diperoleh melalui proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (Sukirno, 2006).

Pertumbuhan ekonomi penting untuk menciptakan kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang untuk mengurangi kemiskinan. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi sendiri tidak cukup, orang miskin dan orang yang rentan mungkin tidak memperoleh keuntungan dari pertumbuhan, karena mereka kurang sehat, kurang keahlian, dan

kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar. Pemberdayaan sangat penting bagi penduduk miskin untuk mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang diciptakan dengan adanya pertumbuhan (Putra, 2016).

Teori Pertumbuhan Rostow

Dalam teori ini dikatakan bahwa proses pembangunan bersifat universal dengan tahap-tahap yang sama dan bersifat linear. Proses pembangunan yang universal tersebut akan melalui lima tahap, yaitu: (1) masyarakat tradisional (*traditional society*); (2) prasyarat untuk tinggal landas (*precondition for take off*); (3) tinggal landas (*take off*); (4) menuju kedewasaan (*drive to maturity*); dan (5) konsumsi massa yang tinggi (*high mass consumption*) (Damanhuri *et al.*, 1997).

1. Masyarakat Tradisional

Pada tahap ini, dicirikan masih adanya stagnasi dalam produktivitas, masyarakat bercorak agraris, struktur sosial hirarkis, dan peluang meraih kemajuan bersifat terbatas (Damanhuri *et al.*, 1997). Sebenarnya, banyak tanah dapat digarap, skala dan pola perdagangan dapat diperluas, manufaktur dapat dibangun dan produktivitas pertanian dapat ditingkatkan sejalan dengan peningkatan penduduk dan pendapatan nyata. Tetapi fakta menunjukkan bahwa keinginan untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern secara teratur dan sistematis bertumpuk pada adanya suatu batas, yaitu tingkat *output* per kapita yang dapat dicapai (Jinghan, 2004).

2. Masyarakat Prasyarat untuk Lepas Landas (*precondition for take-off*)

Pada tahap ini, ciri masyarakat tradisional mulai luntur dan “the idea of progress” telah mulai tumbuh, kemudian kegiatan pendidikan telah menyesuaikan terhadap kebutuhan kegiatan ekonomi modern. Tabungan masyarakat, kegiatan investasi, perdagangan (nasional dan internasional) semakin penting. Kemudian, bentuk negara yang terdesentralisasi dikerahkan untuk menghadapi kekuatan yang menghambat pembangunan. Dan, pembangunan infrastruktur (jalan, komunikasi, dan seterusnya) sangat diprioritaskan.

3. Masyarakat Lepas Landas (*take-off*)

Masyarakat secara keseluruhan telah berhasil menyingkirkan halangan-halangan yang dapat mengganggu pertumbuhan yang reguler. Pada tahap ini, terdapat tiga kondisi yang harus dipenuhi: (1) tingkat investasi sekitar 10 persen dari PDB yang dapat menyamai pertumbuhan produksi riil per kapita, (2) penciptaan sebanyak mungkin sektor industri yang menjadikan sektor ini memainkan peran menentukan untuk pertumbuhan yang tinggi, dan (3) terdapatnya instrumen politik, sosial, dan institusional yang memudahkan proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi, tinggal landas tersebut didahului oleh suatu rangsangan atau dorongan kuat, seperti perkembangan suatu sektor penting atau revolusi politik yang membawa perubahan mendasar dalam proses produksi, atau kenaikan proporsi investasi neto menjadi lebih dari 10 persen dari pendapatan nasional yang melampaui pertumbuhan penduduk.

4. Masyarakat Menuju Kedewasaan (*drive to maturity*)

Pada tahap ini, dicirikan adanya: (1) kemajuan teknologi ditopang oleh struktur industri yang dominan, (2) teknologi modern telah mengendalikan semua sektor ekonomi, (3) struktur produksi ditandai oleh dominannya industri berat dan barang-barang modal (*capital goods*) telah secara penuh diproduksi dalam negeri. Pada waktu suatu negara berada pada tahap kedewasaan teknologi, ada tiga perubahan penting yang terjadi:

- a. Sifat tenaga kerja berubah. Ia berubah menjadi terdidik. Orang lebih suka tinggal atau hidup di kota daripada di desa. Upah nyata mulai meningkat dan para pekerja mengorganisasi diri untuk mendapatkan jaminan sosial dan ekonomi yang lebih besar.
- b. Watak para pengusaha berubah. Pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer efisien yang halus dan sopan.
- c. Masyarakat merasa bosan pada keajaiban industrialisasi dan menginginkan sesuatu yang baru menuju perubahan lebih jauh.

5. Konsumsi Massa yang Tinggi (*high mass consumption*)

Ciri yang menonjol pada tahap ini adalah berkembangnya produksi barang-barang konsumsi tahan lama (*durable consumption goods*) dan jasa (*service*) menjadi sektor ekonomi yang utama dan secara massal masyarakat mempunyai tingkat daya beli dan tingkat kemampuan

berkonsumsi berbagai tingkat kebutuhan (primer, sekunder, tersier) yang sangat tinggi.

Teori Pertumbuhan Kuznet

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 2003). Masing-masing dari ketiga komponen pokok dari definisi itu sangat penting untuk diketahui terlebih dahulu, yaitu:

1. Kenaikan *output* secara berkesinambungan adalah manifestasi dari apa yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang merupakan tanda kematangan (*economic maturity*) dari suatu negara.
2. Perkembangan teknologi merupakan dasar bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Ini adalah suatu kondisi yang sangat diperlukan, tetapi tidak cukup itu saja (jadi, Di samping perkembangan atau kemajuan teknologi masih dibutuhkan faktor-faktor lain).
3. Guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam teknologi baru, maka perlu diadakan serangkaian penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Inovasi dibidang teknologi tanpa diikuti dengan inovasi sosial sama halnya dengan lampu pijar tanpa listrik (potensi ada, akan tetapi tanpa *input* komplementernya maka hal itu tidak bisa membuahkan hasil apa pun).

Pertumbuhan ekonomi modern merupakan pertanda penting di dalam kehidupan perekonomian. Menurut Kuznets, terdapat enam ciri pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisis yang didasarkan pada produk nasional dan komponennya, penduduk, dan tenaga kerja. Dari keenam ciri itu, dua di antaranya adalah kuantitatif yang berhubungan dengan pertumbuhan produksi nasional dan pertumbuhan penduduk, yang dua lainnya berhubungan dengan peralihan struktural dan dua lagi dengan penyebaran internasional (Jinghan, 2004).

Keenam ciri tersebut ialah: (1) Laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita: pertumbuhan ekonomi modern ditandai dengan laju kenaikan produk per kapita yang tinggi diikuti dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat; (2) Peningkatan produktivitas: pertumbuhan ekonomi modern terlihat dari semakin meningkatnya laju produk per kapita terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas *input* yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit *input*; (3) Laju perubahan struktural yang tinggi: perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non-pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produksi dan peralihan dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan berbadan hukum, serta perubahan status kerja buruh; (4) Urbanisasi: pertumbuhan ekonomi modern ditandai pula dengan semakin banyaknya penduduk dari perdesaan ke daerah perkotaan. (5) Ekspansi negara maju: pertumbuhan ekonomi modern terpusat di negara Eropa dan jajahannya di seberang lautan. Ekspansi negara-negara maju yang bermula dari bangsa-bangsa Eropa akibat revolusi teknologi dibidang transportasi dan komunikasi. (6) Arus barang, modal, dan orang antar bangsa: pertumbuhan ekonomi modern menunjukkan bahwa telah terjadi arus barang, modal, dan orang antar bangsa yang semakin meningkat sejak kuartal kedua abad ke-19 sampai perang dunia pertama (PD 1) tetapi mulai mundur pada PD 1 dan berlanjut sampai akhir PD II.

Doktrin Pertumbuhan Berimbang

Doktrin pertumbuhan berimbang dianut oleh beberapa penulis yang masing-masing mempunyai tafsiran sendiri di antaranya Rosenstein-Rodan, Ragnar Nurkse, dan Arthur Lewis.. Bagi beberapa penulis, berarti investasi di sektor atau industri berlangsung lamban agar bisa sejalan dengan sektor lain. Bagi sebagian lainnya, ia berarti bahwa investasi harus berlangsung secara serentak di semua sektor atau industri. Pengertian lain adalah pembangunan berimbang antara industri manufaktur dan pertanian (Jinghan, 2004).

Pertumbuhan berimbang, karena itu, membutuhkan keseimbangan antara berbagai industri barang konsumen, dan antara barang konsumen dengan industri barang modal. Ia juga berarti keseimbangan antara industri dan pertanian, dan antara sektor dalam negeri dan sektor ekspor. Lebih lanjut, ia memerlukan pula keseimbangan antara *overhead* sosial dan

overhead ekonomi dan dengan investasi langsung produktif, dan antara ekonomi eksternal vertikal dan ekonomi eksternal horizontal. Singkatnya, teori pertumbuhan berimbang mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis dari berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh bersama.

Untuk itu, diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penawaran barang. Ini meliputi pembangunan serentak dan harmonis dari barang setengah jadi, bahan mentah, tenaga, pertanian, pengairan, angkutan dan lain-lain, serta semua industri yang memproduksi barang konsumen. Sebaliknya, sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan kesempatan lapangan kerja yang lebih besar dan penambahan penghasilan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh di pihak penduduk. Sisi ini berkaitan dengan industri yang sifatnya saling melengkapi, industri barang konsumen, khususnya pertanian, dan industri manufaktur. Jika semua industri dibangun secara serentak maka jumlah tenaga yang terserap akan sangat besar. Dengan cara ini akan tercipta barang-barang dari masing-masing industri satu sama lain, dan semua barang akan menjadi habis terjual.

Doktrin Pertumbuhan Tidak Berkembang

Konsep “pertumbuhan tidak berimbang” dipopulerkan oleh Prof. A.O. Hirschman. Ia berpendapat bahwa dengan sengaja tidak menyeimbangkan perekonomian, sesuai dengan strategi yang dirancang sebelumnya, adalah cara yang terbaik untuk mencapai pertumbuhan pada suatu negara terbelakang.

Menurut Hirschman, investasi seyogyanya dilakukan pada sektor yang terpilih daripada secara serentak di semua sektor ekonomi. Tidak ada satu pun negara terbelakang yang mempunyai modal dan sumber lain dalam kuantitas sedemikian besar untuk melakukan investasi secara serentak pada semua sektor. Oleh karena itu, investasi harus dilakukan pada beberapa sektor atau industri yang terpilih saja agar cepat berkembang dan hasil ekonominya dapat digunakan untuk pembangunan sektor lain. Dengan demikian perekonomian secara berangsur bergerak dari lintasan pertumbuhan tak berimbang ke arah pertumbuhan

berimbang. Ahli ekonomi seperti Singer, Kindleberger, Streeten, dan lain-lain, mengungkapkan pendapat mereka yang mendukung doktrin pertumbuhan tidak berimbang tersebut yang sebenarnya merupakan kritik terhadap teori pertumbuhan berimbang. Meskipun demikian, Rostow dan Hirschmanlah yang telah mengemukakan doktrin pertumbuhan tidak berimbang ini dengan cara yang sistematis (Jinghan, 2004).

Pertumbuhan Dari Dalam

Salah satu teori pertumbuhan regional yang paling sederhana adalah apa yang dinamakan teori sektor. Teori ini timbul dari pengamatan empiris yang dilakukan oleh Clark dan Fisher bahwa kenaikan pendapatan per kapita di berbagai daerah pada berbagai waktu pada umumnya diikuti oleh realokasi sumber daya, dengan penurunan proporsi angkatan kerja yang dipekerjakan dalam kegiatan-kegiatan primer (pertanian), dan kenaikan proporsi dalam kegiatan-kegiatan sekunder (manufaktur) dan kemudian disusul dengan kenaikan proporsi dalam kegiatan-kegiatan tersier (jasa). Laju terjadinya perubahan sektor seperti itu, dan evolusi spesialisasi dan pembagian kerja intern yang diakibatkannya, dipandang sebagai sumber dinamika bagi pertumbuhan regional (Glasson, 1977).

Laju perubahan peranan relatif dari berbagai sektor dijelaskan melalui elastisitas pendapatan dari permintaan terhadap produk mereka dan melalui perbedaan laju perubahan produktivitas tenaga kerja. Dengan naiknya pendapatan, permintaan terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh sektor-sektor sekunder dan tersier akan mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada permintaan terhadap produk-produk primer, dan demikian menyebabkan terjadinya perubahan dan pengalihan dari sektor-sektor dimana terdapat imbalan yang rendah ke sektor-sektor dimana terdapat imbalan (*reward*) yang tinggi.

Suatu perluasan dari teori pokok ini adalah teori tahap (*stages theory*) yang mengatakan bahwa perkembangan regional adalah terutama suatu proses evolusioner intern dengan tahap-tahap sebagai berikut (Glasson, 1977):

1. Tahap pertama adalah tahap perekonomian subsistem swasembada, dimana hanya terdapat sedikit investasi atau perdagangan. Lapisan penduduk pertanian yang merupakan basis distribusi menurut lokasi sumber daya alam;

2. Dengan kemajuan pengangkutan daerah yang bersangkutan mengembangkan perdagangan dan spesialisasi. Muncullah lapisan kedua yang mengusahakan industri desa sederhana untuk memenuhi kebutuhan para petani. Karena pada mulanya semua bahan, pasar, dan tenaga kerja disediakan oleh penduduk pertanian, maka lapisan baru ini berlokasi pada tempat yang berkaitan dengan lapisan basis.
3. Dengan semakin bertambahnya perdagangan inter-regional, daerah yang bersangkutan maju melalui suatu urutan perubahan tanaman pertanian dari pengembalaan ternak yang ekstensif ke tanaman biji-bijian ke peternakan intensif dan penanaman buah-buahan.
4. Dengan semakin bertambahnya penduduk dan semakin berkurangnya tambahan hasil pertanian, daerah yang bersangkutan terpaksa melakukan industrialisasi. Industri sekunder berkembang, mula-mula mengolah produk-produk primer tetapi kemudian semakin lebih berspesialisasi (Ketiadaan industrialisasi mengakibatkan terjadinya tekanan penduduk, menurunnya taraf hidup dan stagnasi dan kemerosotan umum).
5. Tahap terakhir adalah pengembangan industri tersier yang memproduksi untuk ekspor. Daerah perkembangan seperti itu mengeksport modal, ketrampilan dan jasa-jasa yang bersifat khusus ke daerah-daerah yang berkembang.

Faktor Yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor ekonomi dan non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, teknologi dan sebagainya. Semua itu merupakan faktor ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Di dalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral dan kondisi politik dan kelembagaan merupakan faktor non ekonomi.

1. Faktor Ekonomi
 - a. Sumber Alam: Sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebuah negara yang kaya akan sumber

daya alam cenderung lebih mudah untuk meningkatkan pertumbuhannya dibandingkan dengan negara yang tidak mempunyainya, dengan asumsi faktor lainnya adalah konstan (Hakim A, 2004). Sebagaimana yang dikatakan Lewis, “Dengan hal-hal lain yang sama, orang dapat mempergunakan dengan lebih baik kekayaan alamnya dibanding apabila mereka tidak memilikinya” (Jinghan, 2004).

- b. Akumulasi Modal: Modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukan modal.
 - c. Organisasi: Organisasi berhubungan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya.
 - d. Kemajuan Teknologi: Perubahan teknologi berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil Pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi yang lain.
 - e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi: Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.
2. Faktor Non ekonomi
- a. Faktor Sosial: Faktor sosial juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan kebudayaan Barat membawa ke arah penalaran (*reasoning*) dan skeptisisme. Ia menanamkan semangat yang menghasilkan berbagai penemuan baru dan akhirnya memunculkan kelas pedagang baru. Kekuatan faktor ini menghasilkan pandangan, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial.
 - b. Faktor Manusia: Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, tetapi lebih menekankan pada efisiensi mereka.
 - c. Faktor Politik dan Administratif: Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pertumbuhan ekonomi negara terbelakang. Administrasi yang kuat, efisien, dan

tidak korup, dengan demikian amat penting bagi pembangunan ekonomi.

Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah

Kerangka makro ekonomi daerah berisi isu-isu perekonomian dalam konstelasi eksternal maupun internal. Lebih jauh, kerangka ekonomi makro membahas kondisi perekonomian suatu daerah menyangkut permasalahan yang tengah dihadapi, serta tantangan yang akan dihadapi ke depan. Kondisi makro ekonomi tersebut disajikan dalam bentuk data dan fakta berupa uraian faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian suatu daerah serta beberapa variabel dan indikator yang menggambarkan kondisi perekonomiannya. Indikator Ekonomi Makro Daerah yang sering digunakan adalah:

1. Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2. Pertumbuhan Ekonomi
3. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
4. Indikator Inflasi
5. Indikator Ketenagakerjaan
6. Indikator Kemiskinan
7. Indikator Investasi Daerah
8. Indikator Kemandirian Daerah

Produk Domestik Regional Bruto

Gambaran secara menyeluruh tentang kondisi perekonomian suatu daerah dapat diperoleh dari PDRB. Sebagai salah satu indikator makro ekonomi, PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto didefinisikan sebagai jumlah barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu daerah pada periode tertentu, biasanya satu tahun. Nilai pendapatan nasional yang dihasilkan merupakan nilai pasar dari barang dan jasa. Nilai pasar tersebut dalam arti nilai kotor atau bruto, karena tidak seluruh produk yang dihasilkan pada periode tertentu merupakan penambahan pada produk yang ada, khususnya untuk barang

modal. Sebagian besar dari produk baru yang dihasilkan merupakan penggantian dari produk lama yang nilai ekonomisnya telah habis pakai pada proses produksi. Jenis investasi yang merupakan penggantian barang modal yang lama merupakan pengertian dari investasi bruto. Untuk mengubah investasi bruto menjadi investasi neto, maka nilai investasi bruto harus dikurangi dengan penyusutan (depresiasi) barang modal tersebut.

Dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto, yang dihitung hanyalah barang akhir (*final goods*) sedangkan barang antara (*intermediary goods*) tidak dihitung dalam pendapatan nasional. Barang akhir merupakan barang yang langsung dikonsumsi dan tidak digunakan sebagai *input* pada proses produksi selanjutnya, sedangkan barang antara merupakan barang yang digunakan sebagai *input* pada proses produksi selanjutnya. Hal ini untuk menghindari suatu produk diperhitungkan berkali-kali dalam perhitungan pendapatan nasional. Dalam kenyataannya, sangat sulit membedakan barang antara dan barang akhir. Roti tawar misalnya, bagi rumah tangga, roti tawar merupakan barang akhir yang akan langsung dikonsumsi dan roti tawar ini tidak dipergunakan sebagai *input* untuk membuat produk lain. Sebaliknya roti tawar bagi pedagang roti bakar merupakan barang antara karena roti tawar digunakan sebagai salah satu *input* dalam membuat roti bakar.

Produk Domestik Regional Bruto dihitung berdasarkan periode tertentu, biasanya periode perhitungannya secara tahunan. Dengan perhitungan periodik secara tahunan, pendapatan nasional dapat digunakan untuk menunjukkan perkembangan perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu.

Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauh

mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan.

Ada dua metode dalam penghitungan PDRB adalah (Dumairy, 1996):

1. Metode Langsung

Metode langsung didasarkan pada data yang terpisah antara data daerah dan data nasional, sehingga hasil perhitungannya mencakup seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah. Metode ini dalam penghitungan PDRB menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Produksi

Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu adalah sebagai dasar penghitungan PDRB-nya. Unit-unit produksi dimaksud secara garis besar dipilah-pilah menjadi 11 sektor (dapat juga dibagi menjadi 9 sektor) yaitu: (1) pertanian; (2) pertambangan dan galian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan air minum; (5) bangunan; (6) perdagangan; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) bank dan lembaga keuangan lainnya; (9) sewa rumah; (10) pemerintah; (11) jasa-jasa.

b. Pendekatan Pendapatan

Jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu setahun adalah sebagai dasar penghitungan PDRB-nya. Balas jasa produksi meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semuanya dihitung sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam hal ini mencakup juga penyusutan dan pajak-pajak tak langsung neto. Jumlah komponen semua pendapatan per sektor disebut nilai tambah bruto sektoral. Oleh sebab itu, PDRB menurut pendekatan pendapatan merupakan penjumlahan dari nilai tambah bruto seluruh sektor atau lapangan usaha.

c. Pendekatan Pengeluaran

Jumlah seluruh komponen permintaan akhir yang meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan, pembentukan modal tetap domestik

bruto dan perubahan stok, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan ekspor neto (ekspor-impor) yang semuanya berada dalam jangka satu tahun adalah sebagai dasar penghitungan PDRB-nya.

2. Metode Tidak Langsung atau Alokasi

Metode tidak langsung atau alokasi ini dalam menghitung PDRB dilakukan dengan cara menghitung nilai tambah suatu kelompok kegiatan ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah nasional ke dalam masing-masing ekonomi pada tingkat regional. Sebagai alokator digunakan indikator yang paling besar pengaruhnya atau erat kaitannya dengan produktivitas kegiatan ekonomi tersebut.

PDRB yang disajikan atas dasar harga konstan, akan menggambarkan tingkat pertumbuhan riil perekonomian suatu daerah baik secara agregat maupun sektoral. Pertumbuhan perekonomian yang timbul tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk masing-masing tahun, maka akan dapat pula mencerminkan tingkat perkembangan pendapatan per kapita penduduk. Jika pendapatan per kapita penduduk suatu daerah dibandingkan dengan pendapatan per kapita daerah lain, maka angka-angka tersebut dapat dipakai sebagai indikator untuk membandingkan tingkat kemakmuran material dengan daerah lainnya.

Penyajian PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan, juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat inflasi ataupun deflasi yang terjadi. Demikian pula apabila disajikan secara sektoral akan dapat juga memberi gambaran tentang struktur perekonomian suatu daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang

dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

Dengan perkataan lain bahwa pertumbuhan ekonomi daerah lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (*total market value*) dari barang-barang akhir dan jasa-jasa (*final goods and services*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi, kedua istilah ini mempunyai arti yang sedikit berbeda. Kedua-duanya memang menerangkan mengenai perkembangan ekonomi yang berlaku. Tetapi biasanya, istilah ini digunakan dalam konteks yang berbeda. Pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan sesuatu negara, yang diukur melalui persentase pertambahan pendapatan nasional riil. Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Dengan perkataan lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah perataan pembagian pendapatan (Sukirno, 2006)

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, untuk melihat peningkatan jumlah barang yang dihasilkan maka pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai pendapatan daerah pada berbagai tahun harus dihilangkan. Caranya adalah dengan melakukan perhitungan pendapatan daerah didasarkan atas harga konstan.

Melalui model *input output* regional, perencana daerah dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang mampu mendorong pertumbuhan

sektor-sektor lain dengan cepat atau sering dikenal dengan istilah “sektor unggulan”. Proses identifikasi tersebut menggunakan analisis keterkaitan antar sektor (*inter industrial linkages analysis*). Keterkaitan tersebut berupa keterkaitan ke depan (*forward linkages*) maupun keterkaitan ke belakang (*backward linkages*). Dalam hal ini sektor unggulan diartikan sebagai sektor yang mempunyai tingkat keterkaitan ke depan dan ke belakang yang tinggi. Disebut sektor unggulan karena sektor tersebut mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang menyuplai input-nya maupun sektor yang memanfaatkan *output* sektor unggulan tersebut sebagai *input* dalam proses produksinya.

Sektor yang mempunyai keterkaitan ke depan tinggi berarti pada daerah tersebut merupakan pasar *output* yang potensial bagi sektor tersebut. Sektor yang mempunyai keterkaitan ke belakang tinggi berarti pada daerah tersebut merupakan penyedia *input* yang potensial bagi sektor tersebut.

Dengan memanfaatkan matriks berikut ini maka selanjutnya dapat menentukan sektor apa yang memiliki keterkaitan ke depan maupun ke belakang yang tinggi (cenderung terjadi konglomerasi) maupun sektor yang hanya tinggi salah satu keterkaitannya saja (cenderung berisiko dan cenderung prospektif). Dengan matrik tersebut juga dapat diketahui sektor-sektor yang mempunyai nilai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang rendah (*footloose*, bukan pasar bagi *output* maupun penyedia *input* pada daerah tersebut).

Melalui angka pengganda produksi atau *output* (*output multiplier*), perencana daerah dapat menentukan sektor-sektor yang mempunyai potensi besar dalam menunjang pertumbuhan *output* perekonomian daerah. Dengan angka pengganda ini dapat dilihat kemampuan suatu sektor dalam mendorong penciptaan *output* baru apabila terdapat suatu perubahan permintaan dalam suatu perekonomian. Sektor yang memiliki nilai angka pengganda *output* tinggi merupakan sektor yang berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Rekomendasi yang dapat ditarik dari analisis angka pengganda ini adalah efek maksimum dalam hal perubahan *output* akan tercipta apabila setiap satuan uang untuk permintaan akhir dibelanjakan untuk membeli *output* yang mempunyai angka pengganda terbesar. Sedikit saja komponen permintaan akhir tersebut dipakai untuk membeli *output* yang mempunyai angka pengganda lebih kecil maka efek maksimal dari tambahan

permintaan akhir tersebut tidak akan tercapai. Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun ke tahun dengan rumus:

$$LPE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}$$

LPE : pertumbuhan ekonomi

PDRB_t : Produk Domestik Regional Bruto tahun 1

PDRB_{t-1} : Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Development Human Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Indikator IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Awalnya, UNDP memperkenalkan suatu indeks komposit yang mampu mengukur pembangunan manusia. Ketika diperkenalkan pada tahun 1990, mereka menyebutnya sebagai Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) yang kemudian secara rutin dipublikasikan setiap tahun dalam Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*). Kala itu, IPM dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diproksi dengan angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan yang diproksi dengan angka melek huruf dewasa, serta dimensi standar hidup layak yang diproksi dengan PDB per kapita. Untuk menghitung ketiga dimensi menjadi sebuah indeks komposit, digunakan rata-rata aritmatik.

Setahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam

dimensi pengetahuan. Akhirnya, terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Karena terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan, UNDP memberi bobot untuk keduanya. Indikator angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, sementara indikator rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga. Hingga tahun 1994, keempat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM masih cukup relevan. Namun akhirnya, pada tahun 1995 UNDP kembali melakukan penyempurnaan metode penghitungan IPM. Kali ini, UNDP mengganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka partisipasi kasar. Pembobotan tetap dilakukan dengan metode yang sama seperti sebelumnya.

Pada tahun 2010, UNDP mengubah metodologi penghitungan IPM. Kali ini perubahan drastis terjadi pada penghitungan IPM. UNDP menyebut perubahan yang dilakukan pada penghitungan IPM sebagai metode baru. Beberapa indikator diganti menjadi lebih relevan. Indikator Angka Partisipasi Kasar gabungan (APKG) diganti dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, cara penghitungan juga ikut berubah. Metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik untuk menghitung indeks komposit. Perubahan yang dilakukan UNDP tidak hanya sebatas itu. Setahun kemudian, UNDP menyempurnakan penghitungan metode baru. UNDP mengubah tahun dasar penghitungan PNB per kapita dari 2008 menjadi 2005. Tiga tahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan kembali penghitungan metode baru. Kali ini, UNDP mengubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik dan tahun dasar PNB per kapita. Serangkaian perubahan yang dilakukan UNDP bertujuan agar dapat membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia (BPS, 2014).

IPM dapat dihitung dengan terlebih dahulu menghitung setiap indeks komponen pembentuk IPM. Setiap komponen IPM distandarasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

➤ Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

- Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{RLS - RLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

- Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran})_{min}}{\ln(\text{pengeluaran})_{max} - \ln(\text{pengeluaran})_{min}}$$

Rumus Perhitungan IPM: IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} + I_{pengeluaran} \times 100\%}$$

Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadang kala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, pertama yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (*product or service*) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi). Untuk

sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (*government*) seperti fiskal, kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dan lain-lain.

Inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi *full employment* dimana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

Inflasi desakan biaya terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidaklancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi, bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tersebut, dan aksi spekulasi (penimbunan), sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:

1. Indeks harga konsumen (IHK) atau *consumer price index* (CPI),

adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.

2. Indeks biaya hidup atau *cost-of-living index* (COLI).
3. Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
4. Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
5. Indeks harga barang-barang modal
6. Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.

Secara garis besar dampak inflasi terhadap perekonomian antara lain:

1. terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara, karena berkurangnya investasi dan berkurangnya minat menabung.
2. masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang, karena harga barang mengalami kenaikan.
3. jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran, karena pemerintah berusaha untuk menekan harga.
4. masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang.
5. nilai mata uang turun, karena adanya kenaikan harga barang.

Ketenagakerjaan

Tenaga kerja dapat digolongkan menjadi tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja tidak terdidik. Menurut Simanjuntak (1998), kedua bentuk tenaga kerja tersebut berbeda dalam beberapa hal. Pertama, tenaga terdidik pada umumnya mempunyai produktivitas kerja lebih tinggi daripada yang tidak terdidik. Produktivitas pekerja pada dasarnya tercermin dalam tingkat upah dan penghasilan pekerja, yaitu berbanding lurus dengan tingkat pendidikannya. Kedua, dari segi waktu, *supply* tenaga kerja terdidik haruslah melalui proses pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, elastisitas *supply* tenaga kerja terdidik biasanya lebih kecil daripada elastisitas *supply* tenaga

kerja tidak terdidik. Ketiga, dalam proses pengisian lowongan, pengusaha memerlukan lebih banyak waktu untuk menyeleksi tenaga kerja terdidik daripada tenaga kerja tidak terdidik.

Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, pada suatu tingkat upah keseimbangan tersebut dapat berubah lebih besarnya penawaran dibandingkan permintaan terhadap tenaga kerja (adanya *excess supply of labour*) dan, lebih besarnya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (adanya *excess demand of labour*).

Ada dua teori penting dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan.

1. Teori Lewis (1959), yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan *output* dan penyediaan pekerja di sektor lain. Ada dua struktur di dalam perekonomian Negara, yaitu:
 - a. Sektor kapitalis modern
 - b. Sektor subsistem
2. Teori Fei-Ranis (1964), yang berkaitan dengan Negara berkembang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Sumber Daya Alamnya belum dapat di olah, sebagian penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Menurutnya ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh:
 - a. Dimana para pengangguran semu (yang tidak menambah *output* pertanian), dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama.
 - b. Tahap dimana pekerja pertanian menambah *output* tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan pula ke sektor industri.
 - c. Tahap ditandai oleh awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan *output* lebih besar dari pada perolehan upah institusional.

Beberapa pengertian yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, yaitu:

1. Tenaga kerja (*manpower*)
Penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun), atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja merek, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
2. Angkatan kerja (*labour force*)
Bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu produksi barang dan jasa.
3. Tingkat partisipasi angkatan kerja (*labour force participation rate*)
Menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai persentase penduduk dalam kelompok umum tersebut.
4. Tingkat pengangguran (*unemployment rate*)
Angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengertian menganggur di sini adalah aktif mencari pekerjaan.
5. Pengangguran terbuka (*open un employment*)
Bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.
6. Setengah menganggur (*under unemployment*)
Perbedaan antara jumlah pekerjaan yang betul dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya dengan jumlah pekerjaan yang normal mampu dan ingin dikerjakannya.
7. Setengah menganggur yang kentara (*visible underemployment*)
Jika seseorang bekerja tidak tetap (*part time*) di luar keinginannya sendiri, atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya.
8. Setengah menganggur yang tidak kentara (*invisible unemployment*)
Jika seseorang bekerja secara penuh (*fill time*) tetapi pekerjaannya itu dianggap tidak mencukupi, karena pendapatannya yang terlalu rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan nya untuk mengembangkan seluruh keahliannya.

9. Pengangguran tidak kentara (*disguised unemployment*)

Dalam angkatan kerja mereka di masukkan dalam kegiatan bekerja, tetapi sebetulnya mereka adalah pengangguran jika di lihat dari segi produktivitasnya.

10. pengangguran friksional

Pengangguran yang terjadi akibat pindah-nya seseorang dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, dan akibatnya harus mempertenggang waktu dan berstatus sebagai pengangguran sebelum mendapatkan pekerjaan yang lain tersebut.

11. pengangguran struktural

Pengangguran yang disebabkan karena ketidakcocokan antara struktur para pencari kerja–sehubungan dengan keterampilan, bidang keahlian, maupun daerah lokasinya–dengan struktur permintaan tenaga kerja yang belum terisi.

Peningkatan kualitas kerja yang dicerminkan oleh tingkat pendidikan rata-rata yang semakin baik, memberi dampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja, begitu pula dengan upaya peningkatan keterampilan dan pelatihan tenaga kerja yang disertai dengan penerapan teknologi yang sesuai.

Berdasarkan publikasi *International Labour Organization* (ILO), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja).

Pengangguran

Penganggur terbuka adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, atau tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, atau tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (BPS, 2016).

Berdasarkan alasan mengganggu, terdapat beberapa jenis pengangguran: (1) pengangguran friksional, yakni pengangguran yang disebabkan oleh perputaran normal tenaga kerja; (2) pengangguran struktural, yakni pengangguran yang disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara struktur penawaran tenaga kerja dengan struktur permintaan tenaga kerja; dan (3) pengangguran siklis, yakni pengangguran yang disebabkan oleh siklus bisnis yang mengalami periode resesi (Lipsey *et al.*, 1995). Sukirno (2006) menyatakan bahwa efek buruk dari pengangguran adalah berkurangnya tingkat pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran atau kesejahteraan.

Indikator Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk total di suatu daerah (BPS, 2016). Di Indonesia digunakan ukuran garis kemiskinan untuk mengategorikan orang miskin, yakni mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Sudantoko (2009) mengategorikan kemiskinan menjadi kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural, kemiskinan dengan pendekatan pendapatan/pengeluaran, kemiskinan dengan pendekatan rata-rata per kapita dan kemiskinan dengan pendekatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Namun pada umumnya, kemiskinan dapat dikategorikan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif adalah ketimpangan distribusi pendapatan yang memengaruhi kondisi masyarakat, disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, sedangkan kemiskinan absolut ditentukan dengan keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum yang merupakan ukuran finansial dalam bentuk uang.

Menurut Benyamin White, “yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tingkat kesejahteraan masyarakat terdapat perbedaan kriteria dari satu wilayah dengan wilayah lain”. Dan menurut M. Jauhari Wira Karta

Kesuma, “kemiskinan adalah tentang adanya pertambahan kesejahteraan penduduk di kota yang terus meningkat, sementara penduduk yang berada di pedesaan relatif stabil ataupun menurun serta belum terlihat kecenderungan untuk membaik.” Menurut Prof. Mubyarto menyebutkan bahwa pengertian kemiskinan tersebut adalah rendahnya taraf kehidupan suatu masyarakat baik yang berada di pedesaan maupun yang berada di daerah perkotaan.

Menurut (BPS dan Depsos, 2002) Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Menurut (SMERU dalam Suharto *et al.*, 2004) Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Indikator Investasi

Dalam teori ekonomi secara umum, investasi diartikan sebagai penanaman dalam bentuk barang modal riil (Siamat, 2001). Beberapa pengertian investasi:

1. Investasi adalah suatu kegiatan yang menunda konsumsi/penggunaan sejumlah dana pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang (Putra, 2003)
2. Investasi adalah penanaman dana dalam berbagai jenis portofolio surat berharga (Siamat, 2001)
3. Investasi adalah penggunaan untuk objek-objek tertentu dengan tujuan bahwa nilai objek tersebut selama jangka waktu investasi akan meningkat, paling tidak bertahan dan selama jangka waktu itu pula memberikan hasil secara teratur (Koetin, 2002)

4. Investasi adalah pembelian oleh perorangan atau institusi yang berhubungan dengan keuangan atau kepemilikan yang menghasilkan pengembalian yang sepadan karena mengambil risiko selama periode atau waktu yang panjang (Amling, 1988)

Secara umum terdapat dua jenis investasi, yaitu investasi yang terdorong dan investasi otonom. Investasi yang terdorong yakni investasi yang tidak diadakan akibat adanya penambahan, pertambahan permintaan yang di akibatkan pertambahan pendapatan. Jelasnya apabila pendapatan bertambah, maka tambahan permintaan akan di gunakan untuk konsumsi, sedang pertambahan konsumsi pada dasarnya adalah tambahan permintaan. Sudah pasti apabila ada tambahan permintaan, maka akan mendorong berdirinya pabrik baru atau memperluas pabrik lama untuk dapat memenuhi tambahan permintaan tersebut.

Investasi otonom yaitu investasi yang di laksanakan atau diadakan secara bebas, artinya investasi yang di adakan bukan karena pertambahan permintaan efektif, tetapi justru untuk menciptakan atau menaikkan permintaan efektif. Besarnya investasi otonom tidak tergantung kepada besar kecilnya pendapatan nasional atau daerah. Investasi otonom berarti pembentukan modal yang tidak di pengaruhi oleh pendapatan nasional. Dengan kata lain, tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang di lakukan oleh perusahaan-perusahaan (Sukirno, 2006).

Investasi oleh masyarakat lebih banyak di lakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau motif bisnis, begitu juga dengan investasi asing atau penanaman modal luar negeri dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau motif bisnis di lain sisi kita mendapatkan dampak positifnya. Investasi yang ditanam di suatu negara atau daerah, di tentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Tingkat keuntungan yang diramalkan

Ramalan mengenai keuntungan masa depan akan memberikan gambaran kepada pengusaha mengenai jenis-jenis usaha yang prospektif dan dapat dilaksanakan di masa depan, dan besarnya investasi yang harus dilakukan untuk memenuhi tambahan barang-barang modal yang di perlukan.

2. Tingkat Bunga

Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada para pengusaha, dan para investor hanya akan menanamkan modalnya apabila tingkat pengembalian modal dari modal yang di tanam, berupa persentase keuntungan neto (belum dikurangi dengan tingkat bunga yang di bayar), modal yang diperoleh lebih besar dari tingkat bunga. Seorang investor mempunyai dua pilihan di dalam menggunakan modal yang dimilikinya yaitu: pertama, dengan meminjamkan atau membungakan uang tersebut (deposito); kedua, dengan menggunakannya untuk investasi. Dalam hal dimana pendapatan yang diperoleh adalah lebih dari tingkat bunga, maka pilihan terbaik adalah menandatangani uang tersebut, dan akan menggunakannya untuk investasi apabila tingkat keuntungan yang diperoleh adalah lebih besar dari tingkat bunga yang akan dibayar.

3. Ramalan mengenai ekonomi di masa depan

Dengan adanya ramalan tentang kondisi masa depan akan dapat menentukan tingkat investasi yang akan tercipta dalam perekonomian. Apabila ramalan di masa depan adalah baik maka investasi akan naik. Sebaliknya, apabila ramalan kondisi ekonomi di masa akan datang adalah buruk, maka tingkat investasi akan rendah.

4. Kemajuan teknologi

Dengan adanya temuan-temuan teknologi (inovasi), maka akan semakin banyak kegiatan pembaharuan yang akan di lakukan oleh pengusaha, sehingga makin tinggi tingkat investasi yang dicapai.

5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya

Dengan bertambahnya pendapatan nasional maka tingkat pendapatan Masyarakat akan meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat, *total agregat demand* yang pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya investasi lain (*induced invesment*).

6. Keuntungan yang diperoleh

Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka akan mendorong para pengusaha untuk menyediakan sebahagian keuntungan yang diperoleh untuk investasi-investasi baru.

7. Situasi politik

Kestabilan politik suatu negara akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi para investor terutama para investor asing, untuk menanamkan

modalnya. Mengingat bahwa investasi memerlukan suatu jangka waktu yang relatif lama untuk memperoleh kembali modal yang di tanam dan memperoleh keuntungan. Sehingga stabilitas politik jangka panjang akan di harapkan oleh investor.

8. Pengeluaran yang di lakukan pemerintah.

Pengeluaran-pengeluaran yang di lakukan oleh pemerintah dapat berupa pengeluaran pembangunan dan rutin baik itu dalam penyediaan sarana dan prasarana atau fasilitas publik dalam menunjang kegiatan investasi dan juga perekonomian secara keseluruhan baik itu skala nasional maupun daerah. Sehingga menarik para investor dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi di suatu negara ataupun daerah.

Fungsi dan Peran Investasi Dalam Perekonomian

Investasi dalam berbagai bentuknya akan memberikan banyak pengaruh kepada perekonomian suatu negara ataupun dalam cakupan yang lebih kecil yakni daerah. Karena dengan terciptanya investasi akan membawa suatu negara pada kegiatan ekonomi tertentu.

Investasi yang akan berlanjut dengan suatu proses produksi akan menciptakan lapang kerja, menciptakan barang- barang dan jasa untuk di pasarkan kepada konsumen, dan interaksi antara produsen, dalam hal ini investor, dan konsumen dalam menawarkan dan mengonsumsi barang-barang atau jasa, dan pada gilirannya akan menciptakan perekonomian dalam suatu negara. Adanya fluktuasi dalam investasi seperti yang terlihat dalam *business cycle* merupakan salah satu dampak dari adanya investasi di dalam suatu perekonomian.

Pengeluaran investasi merupakan topik utama dalam ekonomi makro karena dua alasan berikut:

1. Fluktuasi investasi sangatlah besar sesuai dengan perubahan GDP (*Gross Domestc Product*), misalnya karena adanya *business cycle*.
2. Pengeluaran investasi menentukan tingkat pertumbuhan stok kapital dalam perekonomian, dimana stok kapital ini sangat menentukan tingkat pertumbuhan suatu negara dalam jangka panjang (Nanga, 2005).

Investasi yang di tanamkan dalam perekonomian salah satunya ditentukan oleh adanya permintaan dari masyarakat, yaitu berupa konsumsi atas barang-barang konsumsi dan jasa yang di hasilkan oleh perusahaan sehingga merangsang tumbuhnya investasi-investasi baru. Karena seperti kita ketahui bahwa pendapatan yang diperoleh masyarakat akan di gunakan untuk konsumsi dan mungkin sebahagian lagi untuk di tabung. Sehingga apabila penggunaan pendapatan untuk konsumsi dilambangkan dengan C, dan penggunaan pendapatan yang di terima dilambangkan dengan Y, maka perumusan menjadi $Y = C + S$. Seandainya keseluruhan pendapatan masyarakat itu dikonsumsi keseluruhannya ($MPC=1$), sehingga besarnya K menjadi tidak terhingga, maka besarnya pertambahan pendapatan nasional juga menjadi tidak terhingga. Khusus kondisi di negara berkembang, dimana *income* masyarakat relatif rendah, kendati pendapatan masyarakat yang di terima di asumsikan keseluruhannya, dampaknya terhadap pertambahan pendapatan nasional tidak akan terlalu besar.

Hal ini di sebabkan karena kemampuan dalam pembentukan modal juga relatif rendah yang di sebabkan oleh lemahnya kemampuan menabung dari masyarakatnya yang tentu saja akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi terciptanya lembaga-lembaga keuangan padahal faktor-faktor tersebut sangat di perlukan di dalam proses pembangunan guna memacu pertumbuhan ekonomi.

Pembentukan modal merupakan faktor yang paling penting dan strategis di dalam proses pembangunan ekonomi. Pembentukan modal bahkan disebut sebagai "kunci utama menuju pembangunan ekonomi". Proses ini berjalan melewati 3 (tiga) tingkatan:

1. Kenaikan tabungan nyata yang tergantung pada kemauan dan kemampuan untuk menabung.
2. Keberadaan lembaga kredit dan keuangan untuk mengalahkan dan menyalurkan tabungan agar dapat menjadi dana yang dapat di investasikan.
3. Penggunaan tabungan untuk tujuan investasi dalam barang-barang modal pada perusahaan.

Pembentukan modal juga berarti pembentukan keahlian kerap kali berkembang sebagai akibat pembentukan modal (Jhingan, 2004). Pembentukan keahlian jelas merupakan salah satu dampak dari adanya perkembangan investasi. Investasi yang terus berkembang akan menuntut

perkembangan sumber-sumber daya termasuk keahlian tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pembentukan atau penciptaan modal akan menjadi sia-sia kalo tidak ada faktor-faktor lain yang menunjang pertumbuhan ekonomi oleh karena itu, kehadiran sekelompok atau segolongan orang yang benar-benar tertarik pada pembangunan ekonomi, mempunyai kemauan menabung dan bersedia bekerja dengan imbalan material, merupakan prasyarat bagi kemajuan suatu perekonomian (Jhingan, 2004).

Harold dan Domar memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai peran ganda yang dimiliki investasi, yaitu:

1. Menciptakan pendapatan.
2. Memperbesar kapasitas produksi perekonomian.

Kedua hal ini sebagai dampak dari adanya permintaan dan penawaran investasi. Karena itu selama investasi berlangsung, pendapatan nyata dan *output* akan senantiasa membesar. Namun demikian, untuk mempertahankan tingkat ekuilibrium pendapatan pada tingkat *full employment* dari tahun ke tahun, baik pendapatan nyata maupun *output* tersebut, keduanya harus meningkat dalam laju yang sama pada saat kapasitas modal meningkat. Karena kalau tidak, setiap perbedaan keduanya akan menimbulkan kelebihan kapasitas modal meningkat. Karena kalau tidak, setiap perbedaan keduanya akan menimbulkan kelebihan kapasitas atau ada kapasitas yang menganggur. Hal ini memaksa para investor membatasi pengeluaran investasinya sehingga pada akhirnya akan berpengaruh buruk pada perekonomian yaitu berupa menurunnya pendapatan dan pekerjaan pada periode berikutnya. Jadi, apabila pekerjaan ingin di pertahankan dalam jangka waktu yang panjang, maka investasi harus senantiasa diperbesar.

Dalam konteks yang lain, penciptaan investasi juga membawa pengaruh perkembangan suatu daerah. Dampak tersebut disebut dengan *spread effect*. Yaitu apabila suatu investasi yang di tanamkan di dalam suatu daerah membawa pengaruh positif bagi daerah lainnya. Seperti timbulnya industri-industri perlengkapan atau penunjang bagi industri utama di daerah pusat investasi.

Kemandirian Daerah

Pelaksanaan desentralisasi fiskal salah satunya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat agar terjadi pemerataan kemampuan keuangan sesuai dengan kebutuhan daerah otonom dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sebagai bentuk optimalisasi potensi dan akselerasi pembangunan daerah. Suci dan Asmara (2013) menyatakan bahwa kemandirian daerah juga mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar kewajiban seperti pajak dan retribusi semakin tinggi pula pendapatan asli daerah (PAD) sehingga meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan oleh masing-masing daerah diharapkan dapat mendanai sendiri segala pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahannya melalui peningkatan PAD tanpa bergantung pada transfer pusat. Kemandirian keuangan daerah dicerminkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan dan rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan. Kedua rasio tersebut memiliki hubungan arah negatif atau makna berkebalikan. Nilai rasio PAD yang semakin tinggi mencerminkan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik. Sedangkan, nilai rasio dana perimbangan yang semakin tinggi menunjukkan kemandirian keuangan yang semakin rendah. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah dapat mengukur kemampuan keuangan daerah. Rumus rasio PAD dan rasio dana perimbangan sebagai berikut:

$$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan DAerah}} \times 100\%$$

dan

$$\text{Rasio Dana Perimbangan} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan DAerah}} \times 100\%$$

Tabel 5.1 Kemampuan Keuangan Daerah Dilihat Berdasarkan Rasio PAD

| Interval | Kemampuan Keuangan Daerah |
|---------------|---------------------------|
| 00.00 – 10.00 | Sangat kurang |
| 10.01 – 10.00 | Kurang |
| 20.01 – 10.00 | Cukup |
| 30.01 – 10.00 | Sedang |
| 40.01 – 10.00 | Baik |
| >5000 | Sangat baik |

Sumber: Tim Litbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991)

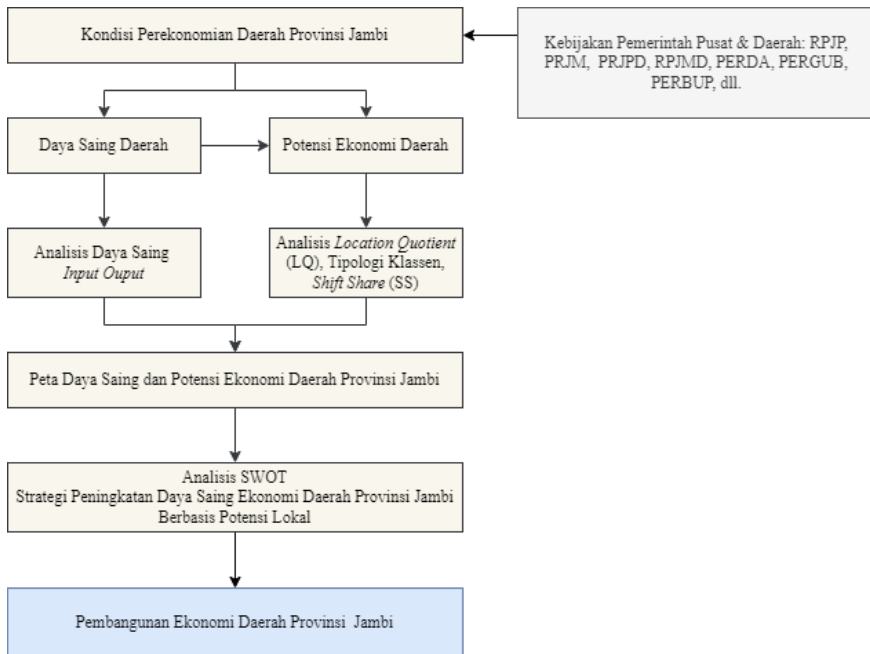
Kemandirian keuangan daerah memiliki keterkaitan dengan indikator pembangunan ekonomi seperti mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan daerah. Hasil studi Menurut Setyawati dan Hamzah (2007) menunjukkan bahwa PAD yang berasal dari pajak dan retribusi daerah akan digunakan kembali untuk masyarakat dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian Isramiwarti *et al.*, (2017) menyebutkan bahwa peningkatan PAD dapat meningkatkan kemandirian daerah dan meningkatkan alokasi belanja daerah terutama terkait dengan peningkatan pelayanan publik. Peningkatan PAD pada akhirnya memiliki dampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Adha (2016) dalam studinya menemukan bahwa kemandirian daerah yang ditunjukkan dengan peningkatan PAD memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Hasil studi ini serupa dengan temuan Prakoso *et al.*, (2019). Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan penelitian Fitriyanti dan Handayani (2020) bahwa PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.



6. PEMODELAN EKONOMI PROVINSI JAMBI

Kerangka Pemikiran

Pembangunan ekonomi daerah Provinsi Jambi merupakan serangkaian usaha kebijaksanaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meratakan distribusi pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi antara wilayah di dalam region maupun antar region dan mengembangkan ekonomi secara sektoral maupun antar lintas sektoral yang lebih menguntungkan didukung dengan strategi peningkatan daya saing daerah. Berdasarkan latar belakang, maksud, tujuan, lingkup, dan keluaran dari buku kegiatan ini maka kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1. Kerangka Berpikir

Data

Data yang digunakan dalam penyusunan buku ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Provinsi Jambi, Bappeda Provinsi Jambi, BPS Indonesia, berbagai literatur, internet, dan instansi terkait lainnya. Data yang dibutuhkan adalah data demografi dan ekonomi makro di kabupaten/kota Provinsi Jambi dan Indonesia. Data-data tersebut meliputi data PDB, PDRB sektor-sektor ekonomi menurut lapangan usaha, PDRB per kapita, Pertumbuhan Ekonomi, investasi, inflasi, Kemiskinan, penduduk, pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), infrastruktur (listrik, jalan, lahan) dan data lainnya yang relevan dan mendukung selama tahun 2010-2017.

Keberhasilan dalam pengumpulan data merupakan syarat bagi keberhasilan suatu penelitian. Sedangkan, keberhasilan dalam pengumpulan data tergantung pada metode yang digunakan. Berkaitan dengan hal tersebut maka pengumpulan data diperlukan guna

mendapatkan data-data yang obyektif dan lengkap sesuai dengan permasalahan yang diambil.

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara untuk memperoleh kenyataan yang mengungkapkan data-data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan buku ini digunakan metode dokumentasi, yaitu suatu cara memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan jalan melihat kembali laporan tertulis yang lalu baik berupa angka maupun keterangan (Arikunto, 2006).

Metode pengolahan data dalam kegiatan ini dilakukan secara sederhana, dengan gambar, tabulasi, dan grafik dengan menggunakan bantuan *software* SPSS, Microsoft Office Excel 365. Selain itu, metode pengolahan data ini dilakukan dengan memadukan antara informasi yang didapatkan di lapangan yang sesuai dengan metode analisis yang digunakan.

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis daya saing *input* dan *output* Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, analisis sektor unggulan menggunakan *Location Quotient* (LQ), Tilopogi Klassen, dan *Shift Share* (SS).

Pengukuran Daya Saing Daerah

Analisis Daya Saing *Input* dan *Output*

Provinsi Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur daya saing setiap variabel adalah sebagai berikut:

Daya Saing Daerah Menurut Indikator *Input*

1. Variabel lingkungan usaha produktif, dengan indikator:

LUP1 = Angka Melek Huruf (AMH)

LUP2 = Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

LUP3 = Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

LUP4 = Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA

LUP5 = Angka Partisipasi Murni (APM) PT/Univ

LUP6 = Tingkat kemiskinan

LUP7 = Kepadatan penduduk

2. Variabel perekonomian daerah, dengan indikator:
 - PD1 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 - PD2 = Laju pertumbuhan PDRB
 - PD3 = Laju pertumbuhan sektor pertanian
 - PD4 = Laju pertumbuhan sektor industri
 - PD5 = Laju pertumbuhan sektor jasa
 - PD6 = *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)
 - PD7 = Realisasi investasi
 - PD8 = Tabungan
 - PD9 = Laju pertumbuhan tabungan
 - PD10 = Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - PD11 = Realisasi pajak daerah
3. Variabel Sumber Daya Manusia (SDM), dengan indikator:
 - SDM1 = Rasio ketergantungan
 - SDM2 = Jumlah penduduk yang bekerja
 - SDM3 = Jumlah penduduk yang menganggur
 - SDM4 = Angkatan kerja
 - SDM5 = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
 - SDM6 = Persentase penduduk usia produktif terhadap total penduduk
 - SDM7 = Tingkat partisipasi siswa
 - SDM8 = Rasio jumlah pengajar terhadap siswa
4. Variabel Infrastruktur dan SDA, dengan indikator:
 - ISDA1 = Panjang jalan raya
 - ISDA2 = Kualitas jalan raya
 - ISDA3 = Jumlah pelanggan listrik
 - ISDA4 = Penjualan listrik
 - ISDA5 = Persentase penduduk menggunakan internet
 - ISDA6 = Persentase penduduk memiliki telepon
 - ISDA7 = Persentase rumah tangga memiliki komputer
 - ISDA8 = Luas lahan non pertanian
 - ISDA9 = Luas lahan sawah
 - ISDA10 = Luas lahan kering

ISDA11 = Luas lahan perkebunan

ISDA12 = Luas lahan hutan

ISDA13 = Luas lahan badan air

Daya Saing Daerah Menurut Indikator *Output*, dengan indikator

DSO1 = Produktivitas tenaga kerja

DSO2 = Produktivitas tenaga kerja sektor pertanian

DSO3 = Produktivitas tenaga kerja sektor industri

DSO4 = Produktivitas tenaga kerja sektor jasa

DSO5 = Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

DSO6 = PDRB per kapita

DSO7 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Merujuk pada Abdullah (2002), analisis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi enam tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan faktor-faktor utama yang membentuk daya saing antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
2. Menentukan variabel-variabel ataupun kriteria-kriteria yang membentuk masing- masing faktor penentu daya saing antar daerah.
3. Menghitung *scoring* daya saing kabupaten/kota. Setiap variabel baik perekonomian daerah, infrastruktur dan sumber daya alam, serta sumber daya manusia memiliki indikator masing-masing. Berbagai komponen indikator yang mempunyai satuan yang berbeda, maka dilakukan standarisasi atau normalisasi data untuk tiap indikator.

Menurut jurnal penelitian dari Akhmad Syakir Kurnia yang merujuk pada Afonso (2003) dan Irawati (2012), normalisasi dilakukan dengan cara menghitung rata-ratanya, dan setiap nilai indikator dibagi dengan nilai rata-ratanya tersebut. Sedangkan untuk indikator dengan orientasi kinerja yang terbalik (misalnya angka ketergantungan), normalisasinya dilakukan dengan membagi rata-ratanya tersebut dengan nilai indikator.

Cara normalisasi atau standarisasi tiap indikator:

1. Indikator yang hubungannya positif (apabila nilai indikator tersebut semakin besar artinya semakin baik) maka rumusnya adalah:

$$\frac{\text{Nilai indikator}}{\text{Rata - rata indikator}} = \text{Nilai indikator yang sudah distandarisasi}$$

Contoh indikator yang mempunyai hubungan positif antara lain PDRB, laju pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, laju pertumbuhan sektoral, pendapatan asli daerah, realisasi pajak daerah, ketersediaan sumber daya lahan, hasil sumber daya air, kualitas jalan raya, jumlah pelanggan listrik, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan lain-lain.

2. Indikator yang hubungannya negatif (apabila nilai indikator tersebut semakin besar artinya semakin buruk) maka rumusnya adalah:

$$\frac{\text{Rata - rata indikator}}{\text{Nilai indikator}} = \text{Nilai indikator yang sudah distandarisasi}$$

Indikator yang mempunyai hubungan negatif adalah tingkat kemiskinan, angka ketergantungan, dan rasio pengajar terhadap siswa. Setelah itu masing-masing indikator dalam satu daerah kabupaten/kota pada satu variabel dijumlah, dan hasilnya tersebut merupakan nilai total yang dapat menentukan peringkat daya saing.

3. Melakukan pemeringkatan (*ranking*) daerah kabupaten/kota secara keseluruhan dan menurut variabel utama berdasarkan hasil perhitungan *scoring* daya saing antar daerah. Semakin tinggi nilainya maka semakin unggul peringkat daya saingnya.
4. Membuat Neraca Daya Saing Daerah untuk setiap kota berdasarkan faktor-faktor yang merupakan *advantage* (indikator-indikator yang merupakan kekuatan daerah) dan *disadvantage* (indikator-indikator yang merupakan kelemahan daerah) setiap kabupaten/kota.
5. Menganalisis potensi masing-masing kabupaten/kota berdasarkan peringkat daya saing daerah di Provinsi Jambi.

Pemetaan Daya Saing Kota Besar Menurut Indikator *Input-Output*

Pemetaan daya saing Provinsi Jambi dilakukan dengan menentukan klasifikasi kota berdasarkan kinerja indikator *input* dan indikator *output*. Semakin baik kinerja indikator-indikator tersebut, maka semakin tinggi pula daya saing kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Daya saing kota dapat diklasifikasikan menjadi 4 kuadran dengan pembagian sebagai berikut:

1. Kuadran I: merupakan kabupaten/kota yang mempunyai daya saing tinggi dengan didukung karakteristik unggul dari kinerja indikator *input* dan *output*nya.

2. Kuadran II: merupakan kabupaten/kota yang mempunyai daya saing dengan karakteristik kinerja indikator *input*-nya lebih baik dibandingkan kinerja rata-rata, namun kinerja indikator *output*-nya masih di bawah kinerja rata-rata.
3. Kuadran III: merupakan kabupaten/kota yang mempunyai karakteristik kinerja indikator *input* dan *output*-nya lebih rendah dibandingkan kinerja rata-rata *input* dan *output* Provinsi Jambi.
4. Kuadran IV: merupakan kelompok kabupaten/kota yang mempunyai kinerja indikator *output*nya unggul di atas kinerja rata-rata *output* Provinsi Jambi, namun kinerja indikator *input*-nya masih rendah.

Pengukuran Potensi Ekonomi Daerah

Metode *Location Quotient* (LQ)

Metode *location quotient* adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk memperluas metode *shift share* sebelumnya, yaitu untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan ekonomi atau sektor di suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peranan dari kegiatan ekonomi/ sektor yang sama pada tingkat nasional (Tambunan, 2003).

Metode ini berguna untuk menentukan sektor basis dan sektor non-basis dengan cara menghitung perbandingan antara pendapatan di sektor tertentu pada daerah bawah terhadap pendapatan total semua sektor di daerah bawah dengan pendapatan di sektor yang sama pada daerah atas terhadap pendapatan total semua sektor di daerah atas. Daerah bawah dan daerah atas yang dimaksud adalah daerah administratif (Glasson, 1977).

Model Analisis LQ merupakan perbandingan relatif antara pendapatan relatif suatu sektor dalam suatu daerah dengan total pendapatan relatif sektor yang sama pada daerah yang lebih luas, dengan formulasi sebagai berikut:

$$LQ = \frac{Si/S}{Ni/N}$$

LQ = besarnya kuosien lokasi sektor *i*

Si = PDRB dari sektor *i* Provinsi Jambi

S = PDRB total Provinsi Jambi

N_i = PDB dari sektor i pada tingkat yang lebih luas (Indonesia)

N = PDB total pada wilayah yang lebih luas (Indonesia)

Jika hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas menghasilkan nilai $LQ > 1$, maka sektor tersebut termasuk ke dalam sektor basis, yang berarti bahwa sektor tersebut memiliki peran yang penting bagi perekonomian Provinsi Jambi dibandingkan daerah atasnya (Indonesia). Selain itu, nilai LQ yang lebih besar dari satu memperlihatkan bahwa sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dan memiliki keunggulan komparatif. Namun apabila nilai $LQ < 1$, berarti sektor tersebut termasuk ke dalam sektor non-basis, yang berarti produksi sektor tersebut hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Jambi.

Tipologi Klassen

Alat analisis *Klassen Typology* (Tipologi Klassen) digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Melalui analisis ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Kuncoro dan Aswandi, 2002) dan (Radianto, 2003).

Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian wilayah Provinsi Jambi. Analisis Tipologi Klassen digunakan dengan tujuan mengidentifikasi posisi sektor perekonomian Provinsi Jambi dengan memperhatikan sektor perekonomian Indonesia sebagai daerah referensi. Analisis ini bersifat dinamis karena sangat bergantung pada perkembangan kegiatan pembangunan pada daerah yang bersangkutan (Sjafrizal, 2008). Penggunaan dan interpretasi alat analisis Tipologi Klassen dapat dilihat dari Tabel 6.1.

Kriteria yang digunakan untuk membagi sektor ekonomi dalam kajian ini adalah sebagai berikut: (1) *sektor ekonomi cepat-maju dan cepat-tumbuh*, sektor yang memiliki tingkat kontribusi dan pertumbuhan sektoral yang lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Jambi; (2) *sektor berkembang dan tumbuh cepat*, daerah yang memiliki kontribusi sektor lebih rendah tetapi tingkat pertumbuhan sektoral lebih tinggi dibanding rata-rata nasional; (3) *sektor maju tapi tertekan*, daerah yang memiliki kontribusi lebih tinggi tetapi tingkat pertumbuhan sektoral lebih rendah dibanding rata-rata nasional; (4) *sektor relatif tertinggal* adalah daerah yang memiliki kontribusi dan pertumbuhan sektoral yang lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Dikatakan “tinggi” apabila indikator suatu sektor ekonomi lebih tinggi dibandingkan rata-rata sektor yang sama pada tingkat nasional dan digolongkan “rendah” apabila indikator suatu sektor ekonomi lebih rendah dibandingkan rata-rata seluruh provinsi di Indonesia. Perkembangan kontribusi dan pertumbuhan sektoral untuk setiap lapangan usaha dalam kurun waktu tahun 2010-2020, beserta rata-ratanya untuk seluruh sektor secara nasional.

Tabel 6.1. Kriteria Tipologi Klassen

| Kriteria | | Kontribusi Sektoral | |
|----------------------|-------------------|---|--|
| | | $Y_{ij} < Y_i$ | $Y_{ij} \geq Y_i$ |
| Pertumbuhan Sektoral | $r_{ij} \geq r_i$ | Kuadran II Sektor Berkembang dan Cepat Tumbuh | Kuadran I Sektor Maju dan Cepat Tumbuh |
| | $r_{ij} < r_i$ | Kuadran IV Sektor Relatif Tertinggal | Kuadran III Sektor Maju Tapi Tertekan |

Keterangan

r_{ij} = Laju pertumbuhan sektor i di Provinsi Jambi

r_i = Laju pertumbuhan sektor i pada tingkat nasional

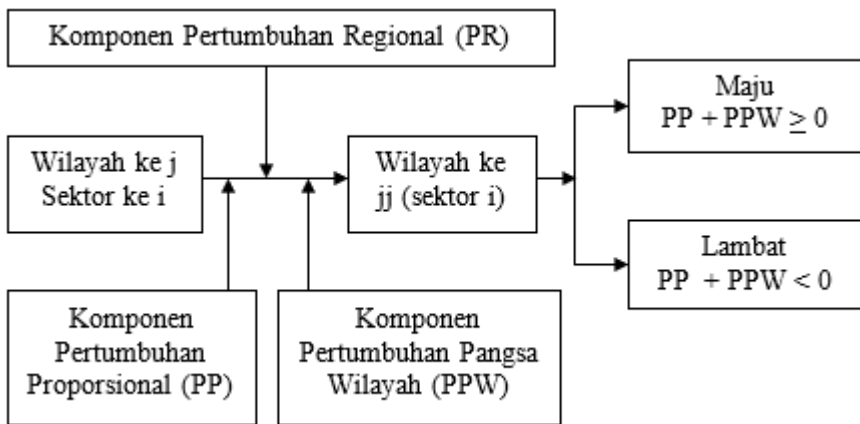
Y_{ij} = Kontribusi sektor i terhadap PDRB Provinsi Jambi

Y_i = Kontribusi sektor i terhadap PDB Indonesia

Analisis *Shift Share*

Analisis *shift share* menganalisis berbagai perubahan indikator kegiatan ekonomi, seperti produksi dan kesempatan kerja, pada dua titik waktu

di suatu wilayah. Hasil analisis dapat menunjukkan perkembangan suatu sektor di suatu wilayah jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya, apakah perkembangan dengan cepat atau lambat. Hasil analisis ini juga dapat menunjukkan bagaimana perkembangan suatu wilayah bila dibandingkan dengan wilayah lain. Tujuan analisis *shift share* adalah untuk menentukan produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkan dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional) (Priyarsono dan Sahara, 2006). Secara skematik model analisis *shift share* disajikan pada gambar 6.2.



Sumber: Budiharsono dalam Priyarsono dan Sahara, 2007.

Gambar 6.2. Model Analisis *Shift Share*

Berdasarkan Gambar 6.2, dapat dipahami bahwa pertumbuhan sektor perekonomian pada suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu (Budiharsono, 2001): komponen pertumbuhan nasional (*national growth component*) disingkat PN atau komponen pertumbuhan regional (*national growth component*) disingkat PR, komponen pertumbuhan proporsional (*proportional or industrial mix growth component*) disingkat PP, dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (*regional share growth component*) disingkat PPW. Dari ketiga komponen tersebut dapat diidentifikasi pertumbuhan suatu sektor perekonomian, apakah pertumbuhannya cepat atau lambat. Apabila $PP + PPW \geq 0$, maka pertumbuhan sektor perekonomian termasuk ke dalam progresif (maju), tetapi apabila $PP + PPW \leq 0$, berarti sektor perekonomian tersebut memiliki pertumbuhan yang lambat (Priyarsono dan Sahara, 2006).

1. Komponen Pertumbuhan Nasional/Pertumbuhan Regional (PN)

Komponen pertumbuhan nasional/regional adalah perubahan r suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi nasional secara umum, perubahan kebijakan produksi nasional, perubahan dalam hal-hal yang mempengaruhi perekonomian suatu sektor dan wilayah. Bila diasumsikan bahwa tidak ada perbedaan karakteristik ekonomi antarsektor dan antarwilayah, maka adanya perubahan akan membawa dampak yang sama pada semua sektor dan wilayah, namun pada kenyataannya beberapa sektor dan wilayah tumbuh lebih cepat daripada sektor dan wilayah lain.

2. Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP)

Komponen pertumbuhan proporsional tumbuh karena perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan industri dan perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar.

3. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW)

Timbulnya komponen pertumbuhan pangsa wilayah terjadi karena peningkatan atau penurunan PDRB atau kesempatan kerja dalam suatu wilayah dibandingkan wilayah lainnya. Cepat lambatnya pertumbuhan ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial, dan ekonomi serta kebijakan ekonomi regional pada wilayah tersebut. Komponen ini dapat menentukan seberapa jauh daya saing dari suatu sektor di suatu provinsi, dibanding sektor yang sama secara nasional. Dasar pemikiran dari komponen ini adalah bahwa suatu provinsi bisa mempunyai keunggulan kompetitif suatu (beberapa) sektor tertentu relatif terhadap provinsi-provinsi lain, karena lingkungannya yang kondusif bagi pertumbuhan *output* di sektor tersebut (Tambunan, 2003). Dalam buku ini, akan diteliti daya saing dari suatu sektor di Provinsi Jambi dibanding sektor yang sama pada tingkat nasional.

Analisis SWOT

Metode penentuan strategi tersebut menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Analisis SWOT adalah suatu kegiatan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu program atau aktivitas. Analisis SWOT

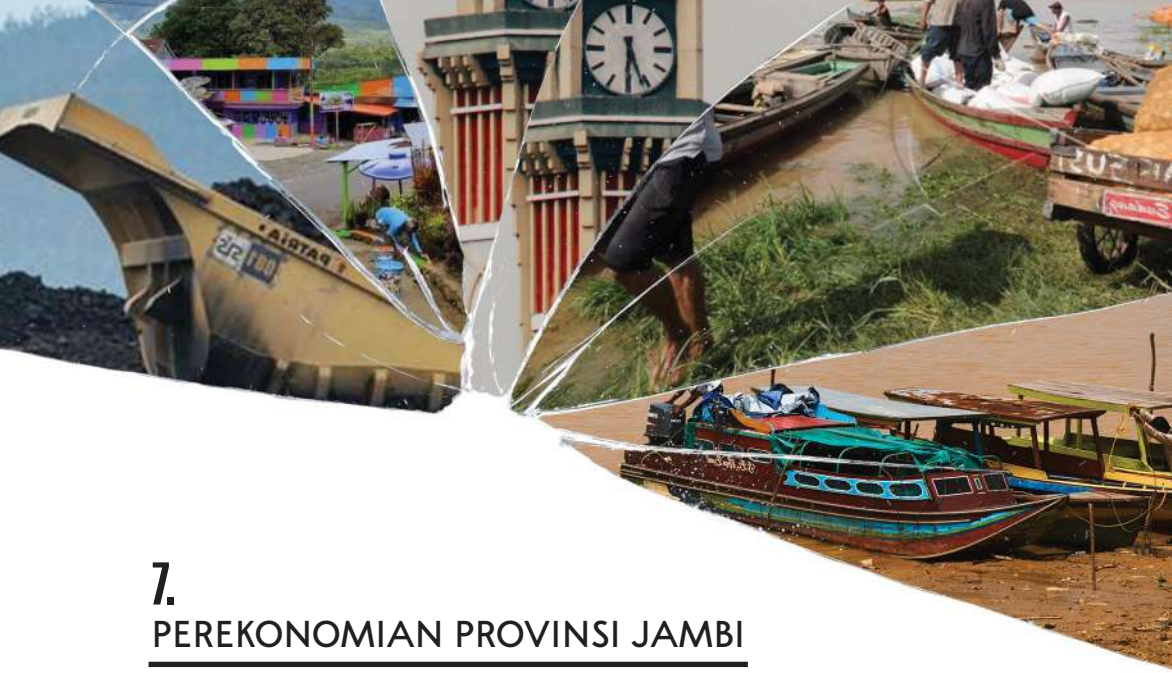
mencakup:

1. *Strengths* atau kekuatan, yaitu suatu analisis yang melihat keunggulan-keunggulan yang dimiliki.
2. *Weaknesses* atau kelemahan, yaitu kelemahan-kelemahan atau hambatan-hambatan yang timbul.
3. *Opportunities* atau peluang, yaitu peluang-peluang yang ada dalam upaya pengembangan.
4. *Threats* atau ancaman, yaitu ancaman yang timbul yang dapat mengganggu kelancaran pengembangan.

Tabel 6.2. Diagram Matriks SWOT

| | | |
|---|--|--|
| <i>Internal Factor Evaluation (IFE)</i> | STRENGTHS (S) | WEAKNESSES (W) |
| <i>External Factor Evaluation (EFE)</i> | Strategi SO Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. | Strategi WO Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. |
| OPPORTUNITIES (O) | Strategi ST Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. | Strategi WT Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. |
| TRHEATS (T) | | |

Dari hasil analisa di atas selanjutnya disusun rencana aksi peningkatan daya saing daerah Provinsi Jambi yang berisi strategi, arah kebijakan, sasaran, program, kegiatan, dan tahun pelaksanaan.



7. PEREKONOMIAN PROVINSI JAMBI

Pembangunan perekonomian daerah merupakan suatu proses yang berdampak terhadap kondisi ekonomi daerah serta tingkat kehidupan masyarakat di daerah yang secara nyata dapat dilihat melalui peningkatan pendapatan per kapita dan peningkatan daya beli masyarakat. Pembangunan perekonomian membutuhkan kebijakan ekonomi yang mampu mengarahkan segala tindakan perekonomian menuju tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Kebijakan ekonomi daerah merupakan suatu hal yang kompleks, karena banyaknya keterkaitan variabel ekonomi yang harus diperhitungkan. Hal ini menuntut daerah untuk lebih serius dan seksama memperhatikan seluruh faktor, variabel, dan indikator ekonomi makro yang terlibat di dalam pembangunan. Kondisi ekonomi daerah akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi secara umum pada tahun sebelumnya (di antaranya PDRB, struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan inflasi), serta rencana ekonomi makro pada kurun waktu tertentu.

Perekonomian daerah dapat menjadi reflektor dan tolok ukur kinerja perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan

di bidang ekonomi. Kerangka ekonomi daerah akan memuat faktor fundamental ekonomi daerah yang memberikan kontribusi agregat ekonomi, berdasarkan penggunaan maupun sektor riil lapangan usaha dalam batasan-batasan kemampuan ekonomi daerah. Perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal dan internal. Kondisi lingkungan eksternal dapat berupa perkembangan dan perubahan faktor, variabel, dan indikator ekonomi dalam wilayah cakupan yang lebih luas seperti ekonomi Regional atau Nasional. Sementara itu, kondisi lingkungan internal dapat berupa perkembangan dan perubahan berbagai faktor, variabel, dan indikator ekonomi yang berada di dalam daerah tersebut akibat adanya gejolak sosial-politik yang membawa kepada adanya perubahan kebijakan pembangunan.

Pertumbuhan Ekonomi

Secara rata-rata kinerja perekonomian Provinsi Jambi selama tahun 2011-2014 cukup baik. Hal tersebut tercermin dari nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi yaitu 7,27 persen yang lebih tinggi dari nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,69 persen. Namun demikian, selama tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Jambi mengalami perlambatan, bahkan nilai tersebut berada di bawah angka 5 persen dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh gambar di bawah ini:



Gambar 7.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2011-2017

Sumber: Bappenas (2018)

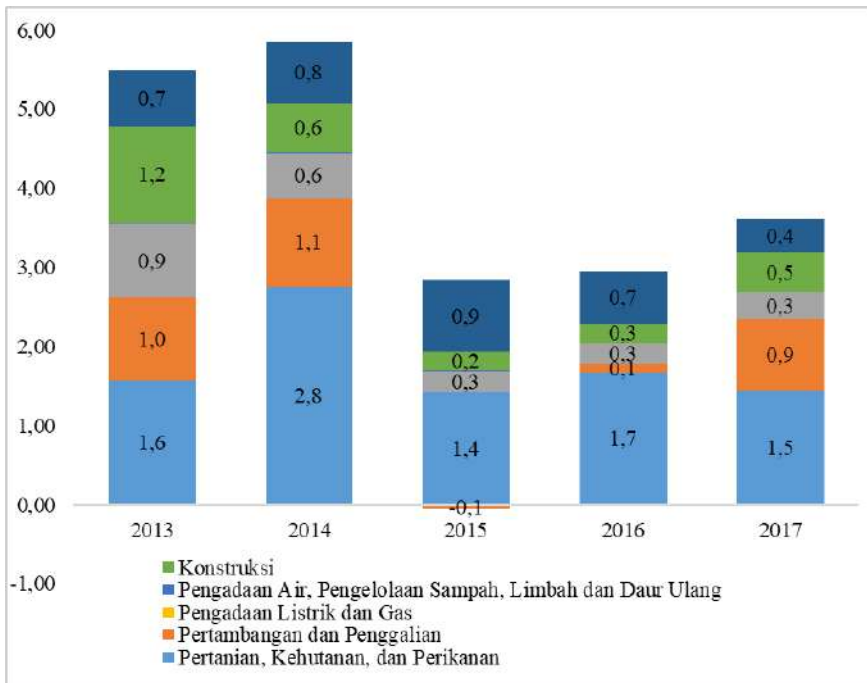
Berkaitan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2015-2017, kemudian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018-2021 mengalami perubahan target dengan nilai rata-rata yaitu 5,65 persen. Perubahan tersebut terjadi dengan menyesuaikan terhadap perubahan asumsi-asumsi makro di tingkat pemerintah pusat sekaligus sebagai bentuk sinkronisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah



Gambar 7.2 Realisasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2012-2021

Sumber: BPS Provinsi Jambi (2018), dan RPJMD Provinsi Jambi

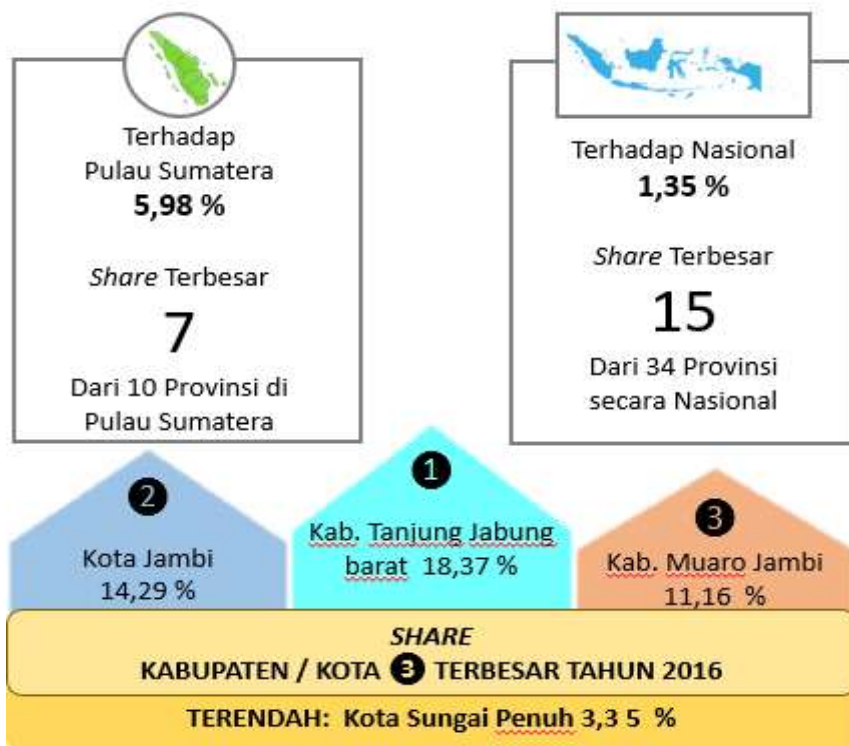
Adapun pertumbuhan yang terjadi di Jambi didorong oleh 5 sektor utama antara lain sektor pertanian, konstruksi, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran serta pertambangan dan penggalian. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang nilai pertumbuhan rata-rata yang cukup tinggi yaitu sebesar 1,8 persen disusul sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,7 persen. Sektor pertambangan dan penggalian memiliki nilai rata-rata pertumbuhan 0,6 persen, dan sektor konstruksi menyumbang pertumbuhan sebesar 0,56 persen.



Gambar 7.3 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dengan Pendekatan Produksi Tahun 2013-2017

Sumber: Bappenas (2018)

Jika dilihat berdasarkan aspek wilayah, Provinsi Jambi memiliki kontribusi ekonomi sebesar 5,98 persen terhadap total *output* yang diproduksi di Pulau Sumatera. Angka tersebut termasuk ke dalam peringkat 7 terbesar dari 10 provinsi yang ada di Sumatera. Jika dilihat secara nasional, Jambi berkontribusi terhadap 1,35 persen terhadap total *output* yang diproduksi. Hal tersebut menjadikan Jambi sebagai provinsi dengan *share* terbesar ke 15 dari 34 provinsi di Indonesia. Adapun kabupaten/kota yang berkontribusi terhadap penciptaan *output* ekonomi di Provinsi Jambi terbesar antara lain Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muara Jambi dengan persentase masing-masing adalah 14,29 persen, 18,37 persen dan 11,16 persen. Sedangkan kabupaten dengan kontribusi *output* terendah ialah Kota Sungai Penuh yang hanya 3,35 persen.

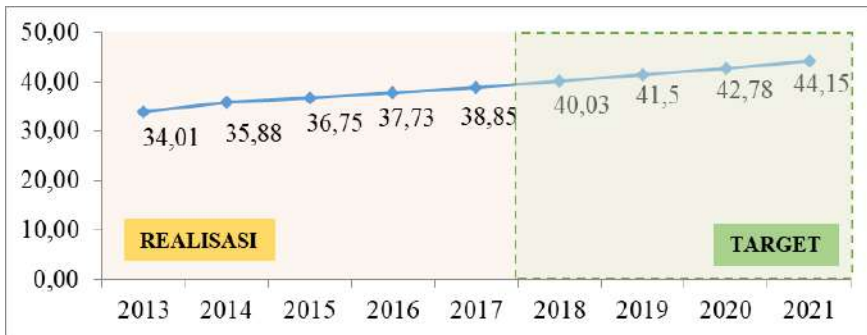


Gambar 7.4. Rata-Rata *Share* Provinsi Jambi Tahun 2011-2017

Sumber: Bappenas (2018)

Pendapatan Per Kapita

Berdasarkan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Provinsi Jambi memiliki kinerja yang baik. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai PDRB per kapita yang terus meningkat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi menjadi optimis untuk menetapkan peningkatan target PDRB per kapita dari tahun 2018-2021. Hal ini sebagai indikasi bahwa tingkat kemakmuran masyarakat di Provinsi Jambi semakin lebih baik.



Gambar 7.5 Perkembangan PDRB Per kapita dan Target (dalam juta rupiah)

Sumber: BPS dan RPJMD Provinsi Jambi

Inflasi

Selanjutnya tingkat inflasi di Jambi tergolong fluktuatif dari tahun 2012 hingga 2017. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan nilai inflasi sebesar 8,74 persen, sedangkan inflasi terendah yaitu 1,37 persen pada tahun 2015. Dengan menggunakan proyeksi inflasi yang telah disesuaikan, maka target inflasi hingga 2021 diproyeksikan berada pada kisaran 3 hingga 3,75 persen per tahun.

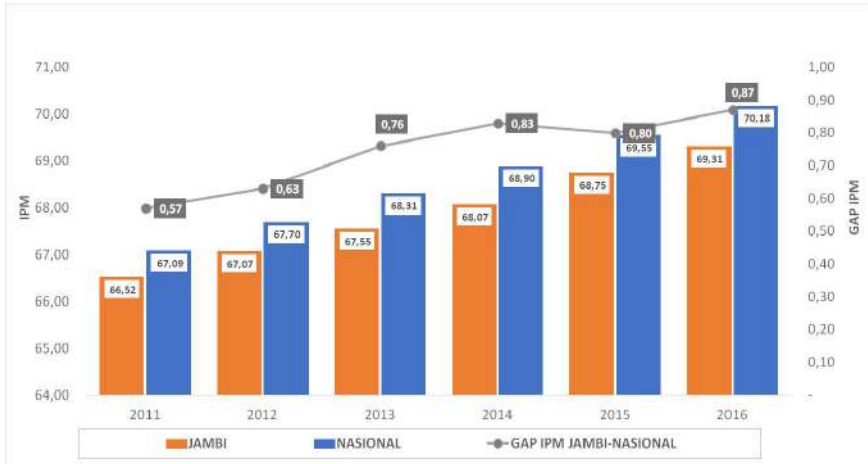


Gambar 7.6 Perkembangan Inflasi dan Target Tahun 2012-2021

Sumber: BPS dan RPJMD Provinsi Jambi

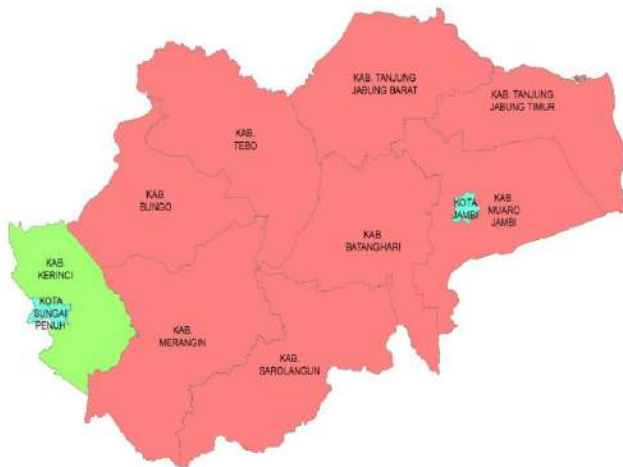
Indeks Pembangunan Manusia

Jika ditinjau secara spasial, IPM tertinggi diperoleh Kota Jambi dengan angka 76,14. Adapun tiga wilayah dengan nilai IPM terendah ialah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo dengan nilai masing-masing 65,91; 61,88 dan 68,05.



Gambar 7.7 Perkembangan IPM Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2011-2016

Sumber: BPS (2018)



Gambar 7.8. Pola Spasial IPM Tahun 2016

Sumber: BPS (2018)

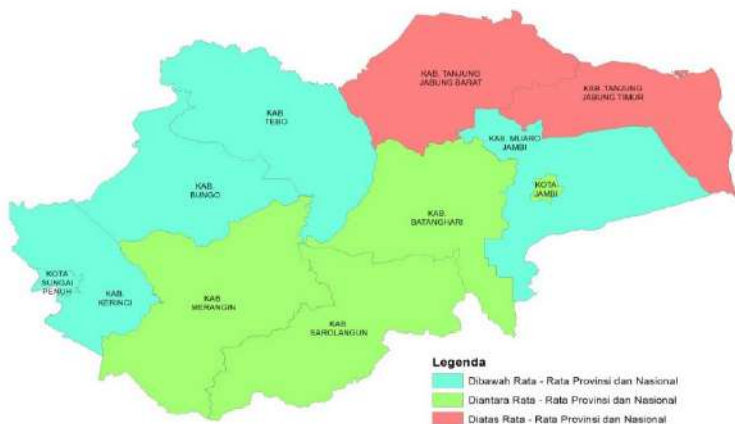
Kemiskinan

Di sisi lain, indikator kemiskinan di Jambi makin membaik yang ditunjukkan dari angka kemiskinan provinsi yang terus menurun selama tiga tahun terakhir. Hal tersebut sejalan dengan tren penurunan angka kemiskinan nasional dari tahun 2010 hingga 2017. Adapun wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Batang Hari. Dari ketiga wilayah tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Timur memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibanding kemiskinan tingkat provinsi dan nasional yaitu masing-masing 11,32 persen dan 12,58 persen. Hal tersebut berbeda dengan Kabupaten Batang Hari yang memiliki tingkat kemiskinan di antara tingkat provinsi dan nasional yaitu 10,33 persen.



Gambar 7.9 Perkembangan Angka Kemiskinan Provinsi Jambi, Nasional dan Gap antara Jambi-Nasional Tahun 2011-2017

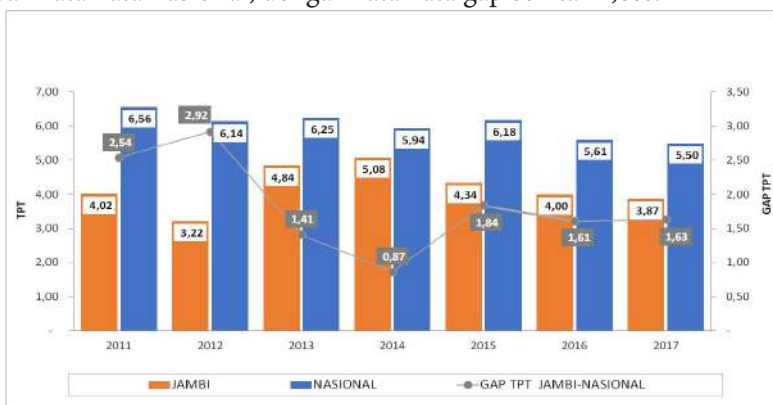
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)



Gambar 7.10 Pola Spasial Angka Kemiskinan 2017
 Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

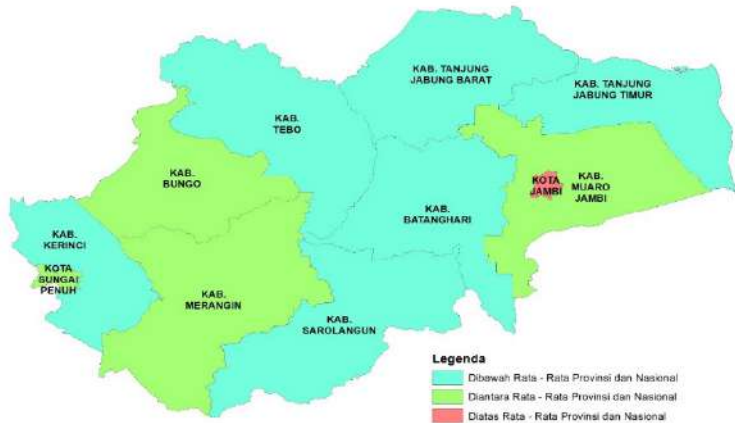
Pengangguran

Jika dilihat dengan menggunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), diketahui bahwa Provinsi Jambi telah mengalami perbaikan dengan nilai TPT yang terus menurun selama empat tahun terakhir, dan masih di bawah rata-rata nasional, dengan rata-rata gap sekitar 1,6%.



Gambar 7.11 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi, Nasional dan Gap Jambi-Nasional Tahun 2011-2017
 Sumber: BPS (diolah)

Secara umum, TPT provinsi Jambi dan nasional mengalami penurunan selama tujuh tahun terakhir, dan *gap* antara TPT Provinsi Jambi dan nasional mengalami fluktuatif. Jika dilihat secara spasial, terdapat tiga kabupaten atau dua kota yang memiliki TPT terbesar di Jambi. Kota Jambi termasuk ke dalam wilayah yang memiliki pengangguran terbuka yang paling banyak yaitu 5,55%. Minimnya ketersediaan lapangan kerja terdidik dan rendahnya keterampilan tenaga kerja sebagai penyebab pengangguran terkonsentrasi di Kota Jambi. Wilayah lain yang juga termasuk wilayah dengan pengangguran tertinggi adalah Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Bungo dengan nilai TPT masing-masing 5,39 persen dan 4,89 persen. Angka-angka tersebut berada di antara rata-rata provinsi dan nasional.



Gambar 7.12 Pola Spasial TPT 2017

Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan indikator pembangunan manusia, Provinsi Jambi memiliki nilai indeks pembangunan manusia yang membaik dari tahun ke tahun. Hal tersebut juga terjadi pada indeks pembangunan manusia dalam ruang lingkup nasional. Meskipun demikian, *gap* IPM antara Provinsi Jambi terhadap nasional semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbaikan pembangunan yang terjadi di Jambi memiliki pertumbuhan

yang lebih lambat dibanding perbaikan pembangunan manusia tingkat nasional.

Ketimpangan

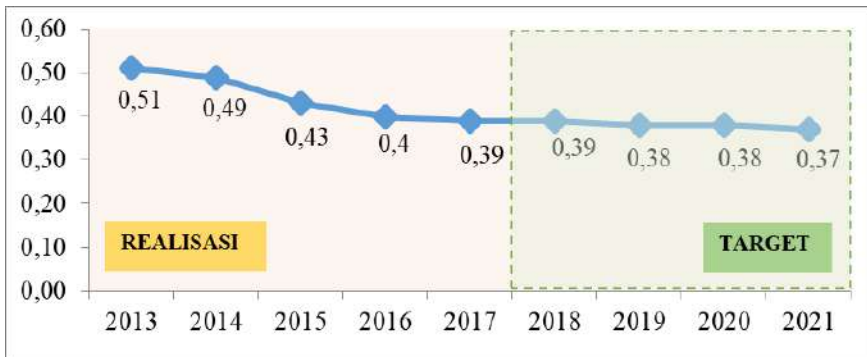
Untuk mengetahui ketimpangan yang ada di Provinsi Jambi, dapat dilihat menggunakan indeks gini. Dari tahun 2012 – 2017, nilai indeks gini mengalami fluktuasi. Meskipun demikian, angka tersebut masih berada pada level yang rendah karena indeks gini lebih kecil dari angka 0,4. Oleh karena itu, target pada tahun 2018-2021 diharapkan ketimpangan dapat terus menurun secara perlahan dari tahun ke tahun.



Gambar 7.13 Perkembangan Indeks Gini Provinsi Jambi Tahun 2012-2021

Sumber: BPS dan RPJMD Provinsi Jambi

Selain melihat ketimpangan pendapatan, dapat juga diketahui ketimpangan antar daerah. Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari Indeks Williamson. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai indeks Williamson menunjukkan angka yang semakin menurun. Angka tersebut menjadi acuan proyeksi turunnya indeks Williamson pada periode yang akan datang (2018-2021) yang berarti ketimpangan makin mengecil antar daerah.

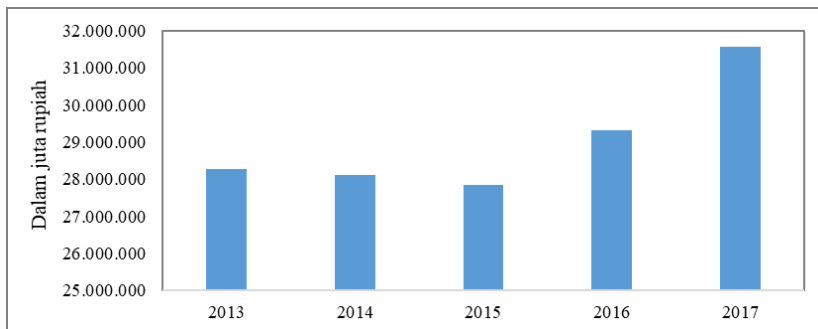


Gambar 7.14 Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Jambi Tahun 2013-2021

Sumber: RPJMD Provinsi Jambi

Investasi

Kegiatan investasi merupakan salah satu faktor penting yang mampu menstimulus perekonomian suatu daerah. Investasi tersebut terdiri dari investasi fisik dan juga investasi finansial. Dalam konteks Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), aktivitas investasi fisik tercermin dalam komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori. PMTB memiliki kaitan yang erat dengan adanya aset tetap (*fixed asset*) yang digunakan dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal antara lain bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya. Dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi selama kurun waktu 2013-2017 diketahui hasil sebagai berikut.



Gambar 7.15 Perkembangan PMTB Provinsi Jambi Tahun 2013-2017

Sumber: BPS Provinsi Jambi (Diolah)

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa selama rentang waktu 2013-2017 secara umum mengalami tren nilai PMTB yang meningkat. Meskipun demikian, terdapat dua siklus yang membentuk pola nilai PMTB. Pola pertama ialah tren menurun terjadi mulai tahun 2013 dengan nilai PMTB yaitu Rp 28.266.691,52 juta hingga tahun 2015 dengan nilai PMTB yaitu Rp 27.834.648,56 juta. Setelah tahun 2015, pola kedua membentuk tren positif yaitu nilai PMTB yang meningkat menjadi Rp 29.328.905,38 juta pada tahun 2016 dan Rp 31.559.678,89 juta pada tahun 2017. Meningkatnya nilai PMTB Provinsi Jambi menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jambi secara inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 7.1 Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Jambi Tahun 2013-2017

| Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total PMTB: | | | | | |
| ADHB (miliar rupiah) | 32.929,97 | 34.951,30 | 35.770,42 | 39.240,94 | 42.661,95 |
| ADHK 2010 (miliar rupiah) | 28.266,69 | 28.117,17 | 27.834,65 | 29.328,91 | 31.559,68 |
| Proporsi terhadap PDRB (%ADHB) | 25,34 | 24,14 | 23,07 | 22,86 | 22,32 |
| Struktur PMTB: | | | | | |
| Bangunan (%) | 64,42 | 69,03 | 73,60 | 72,09 | 72,65 |
| Non Bangunan (%) | 35,58 | 30,97 | 26,40 | 27,91 | 27,35 |
| Total PMTB (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pertumbuhan (%): | | | | | |
| Bangunan | 12,68 | 8,90 | 3,85 | 3,23 | 9,20 |
| Non Bangunan | 2,96 | -17,69 | -12,70 | 11,50 | 3,39 |
| Pertumbuhan PMTB (%) | 9,03 | -0,53 | -1,00 | 5,37 | 7,61 |

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah)

Pertumbuhan PMTB memiliki variasi pada masing-masing komponen. Hal tersebut ditunjukkan oleh sub komponen bangunan yang memiliki proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap bruto di Provinsi Jambi. Meskipun demikian, pertumbuhan di sektor bangunan justru cenderung mengalami perlambatan dan memiliki pola yang relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen PMTB yang lain.

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB memiliki nilai yang relatif berfluktuasi selama periode 2013 hingga 2017. Adanya perubahan yang terjadi pada proporsi non bangunan terhadap total PMTB tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Pertumbuhan “riil” sub komponen bangunan pada tahun 2013 ialah sebesar 12,68 persen. Angka tersebut kemudian terus menurun hingga angka 3,23 persen pada tahun 2016 dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 sebesar 9,20 persen.

Jika dilihat berdasarkan tingkat pertumbuhannya, sub komponen non bangunan memiliki pola yang sangat fluktuatif tiap tahun. Pada tahun 2013 hingga 2015, pertumbuhan non bangunan cenderung mengalami perlambatan. Sedangkan pada tahun 2016, non bangunan mengalami fluktuasi pertumbuhan hingga 11,50 persen untuk kemudian kembali melambat pada tahun berikutnya hingga 3,39 persen.

Secara umum, selama tahun 2013-2017 pertumbuhan PMTB mengalami fluktuasi dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang mencapai besaran angka 9,03 persen, dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu hanya sebesar minus 1 persen.

Berdasarkan kondisi dan potensi yang ada di Provinsi Jambi dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 2013-2017, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi daerah berada di angka 5,48 persen tiap tahun. Jika dilihat secara tahunan, nilai pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi ialah 6,84 persen kemudian meningkat menjadi 7,36 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2015, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,21 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi tidak terus-menerus terjadi. Hal tersebut ditunjukkan dari angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun 2015 hingga 2017 yaitu masing-masing 4,21 persen; 4,37 persen dan 4,64 persen. Perbaikan indikator pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi karena nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mengalami peningkatan secara signifikan serta nilai net ekspor yang mengalami akselerasi yang cukup signifikan (BPS Provinsi Jambi, 2017).

Meskipun mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi, posisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi secara umum masih berada posisi yang cukup baik karena tidak jauh dari pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring dengan tren perubahan yang berfluktuasi tersebut maka dapat digunakan pendekatan ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). ICOR dapat menjelaskan peningkatan *output* sebagai akibat kenaikan kapital.

ICOR juga dapat diartikan sebagai ukuran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital yang dibutuhkan untuk meningkatkan/menambah satu unit *output* dalam perekonomian suatu wilayah. Dalam konteks ekonomi makro, konsep ICOR sering digunakan untuk melakukan valuasi kinerja investasi suatu daerah. ICOR juga dapat digunakan untuk mengukur nilai investasi yang dibutuhkan agar laju pertumbuhan perekonomian daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kalkulasi nilai ICOR dapat diperoleh dari perbandingan antara besarnya tambahan kapital dengan tambahan *output* yang dihasilkan. Karena unit pengukuran kapital memiliki bentuk yang berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit *output* relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal). Tambahan kapital dapat diperoleh dari adanya investasi. ICOR juga dapat merefleksikan besarnya produktivitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Adapun kalkulasi ICOR dapat dilihat berdasar tabel di bawah ini.

Tabel 7.2 Kalkulasi Nilai ICOR Provinsi Jambi 2013-2017 (dengan Pendekatan Investasi = PMTB)

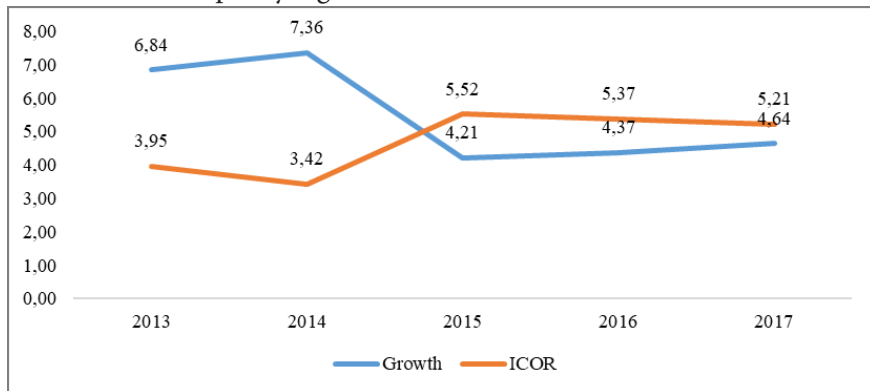
| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata-rata |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PMTB (I) | 28.266.692 | 28.117.165 | 27.834.649 | 29.328.905 | 31.559.679 | 29.021.418 |
| PDRB | 111.766.131 | 119.991.445 | 125.037.398 | 131.501.132 | 136.556.701 | 124.770.562 |
| ΔPDRB | 7.151.049 | 8.225.314 | 5.045.953 | 5.463.734 | 6.055.574 | 6.388.325 |
| ICOR | 3,95 | 3,42 | 5,52 | 5,37 | 5,21 | 4,69 |

Sumber: BPS Provinsi Jambi (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai investasi yang tercermin dari PMTB nilainya terus menurun hingga tahun 2015 yaitu mencapai Rp27.834.649 kemudian meningkat signifikan pada tahun 2016 dan 2017 yaitu masing-masing Rp29.328.905 dan Rp31.559.679 sehingga secara umum nilai investasi rata-rata di Provinsi Jambi selama kurun waktu 2013-2017 yaitu Rp29.021.418.

Berbeda halnya dengan perkembangan PMTB, nilai PDRB Provinsi Jambi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan nilai rata-rata tahun 2013-2017 yaitu Rp124.770.562. Hal tersebut didukung oleh nilai pertumbuhan yang selalu positif dengan nilai rata-rata Rp6.388.325 per tahun.

Dengan menggunakan data PMTB dan pertumbuhan PDRB, dapat diketahui nilai ICOR secara tahunan menunjukkan angka yang berfluktuasi dengan nilai terendah 3,42 dan nilai tertinggi 5,52. Secara umum, nilai ICOR rata-rata selama 2013-2017 ialah 4,69. Angka tersebut menunjukkan bahwa untuk menambah 1 unit *output* maka dibutuhkan 4,69 tambahan kapital yang tercermin dari investasi.



Gambar 7.16 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan ICOR di Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 (dengan Pendekatan Investasi = PMTB)

Sumber: BPS Provinsi Jambi (Diolah)

Berdasarkan gambar di atas juga dapat terlihat bahwa angka ICOR di Provinsi Jambi relatif mengalami penurunan sampai tahun 2014 kemudian meningkat pada tahun 2015 dan menurun lagi hingga tahun 2017. Selama periode tersebut rata-rata nilai ICOR di Provinsi Jambi adalah sebesar 4,69. Pada tahun 2013 dan 2014 angka ICOR masing-masing adalah 3,95 dan 3,42, kemudian meningkat pada tahun 2015 sebesar 5,52, dan kembali menurun menjadi 5,37 pada tahun 2016 dan 5,21 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penanaman modal (investasi) yang dilakukan di Provinsi Jambi dinilai cukup efektif. Dalam hal ini, pada tahun 2013 dan 2014, untuk mendapatkan tambahan *output* sebesar 1 unit maka dibutuhkan tambahan investasi berturut-turut sebesar 3,95 satuan dan 3,42 satuan. Sedangkan pada tahun berikutnya, untuk mendapatkan 1 tambahan *output* ekonomi dibutuhkan tambahan investasi sebesar 5,52 satuan pada tahun 2015 dan 5,37 satuan pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, tambahan 5,21 tambahan investasi diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak satu satuan. Secara umum, semakin kecil angka ICOR berarti investasi yang dilakukan semakin efisien namun angka ICOR ini menjadi lebih efisien

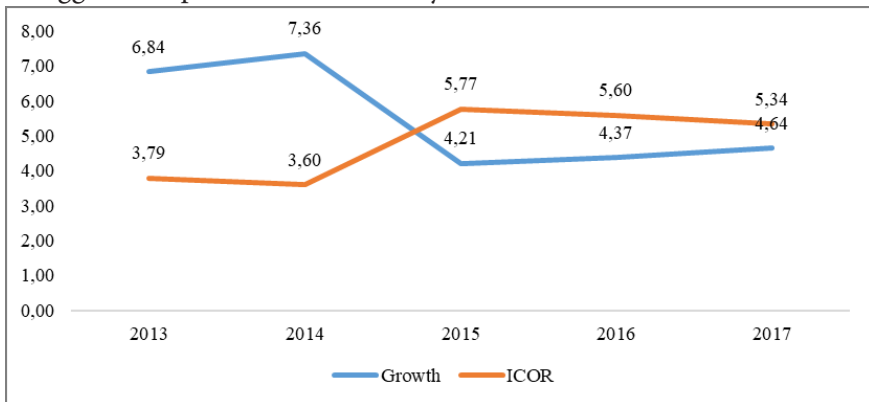
apabila nilainya berkisar antara 3-4 persen.

Tabel 7.3 Kalkulasi Nilai ICOR Provinsi Jambi 2013-2017 (dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori)

| Indikator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata-rata |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PMTB (I) | 28.266.692 | 28.117.165 | 27.834.649 | 29.328.905 | 31.559.679 | 29.021.418 |
| Inventori | -1.167.645 | 1.468.417 | 1.299.006 | 1.256.629 | 772.873 | 725.856 |
| PMTB Total | 27.099.047 | 29.585.582 | 29.133.654 | 30.585.535 | 32.332.552 | 29.747.274 |
| PDRB | 111.766.131 | 119.991.445 | 125.037.398 | 131.501.132 | 136.556.701 | 124.770.562 |
| ΔPDRB | 7.151.049 | 8.225.314 | 5.045.953 | 5.463.734 | 6.055.574 | 6.388.325 |
| ICOR | 3,79 | 3,60 | 5,77 | 5,60 | 5,34 | 4,82 |

Sumber: BPS Provinsi Jambi (Diolah)

Selain menggunakan pendekatan investasi = PMTB, ICOR juga dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan investasi = PMTB + Perubahan Inventori. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai perubahan inventori berfluktuatif dan memiliki rata-rata Rp725.856. Adanya perubahan inventori yang fluktuatif juga menyebabkan nilai PMTB total juga berfluktuatif namun memiliki tren peningkatan secara umum. Jika dilihat berdasarkan nilai ICOR, diketahui bahwa nilai ICOR meningkat menjadi 4,82 lebih besar dibandingkan ICOR dengan tanpa menggunakan perubahan inventori yaitu 4,69.



Gambar 7.17 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan ICOR di Provinsi Jambi Tahun 2013-2017 (dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori)

Sumber: BPS Provinsi Jambi (Diolah)

Di samping itu, angka ICOR yang dihitung dengan pendekatan nilai investasi yang terdiri dari akumulasi nilai PMTB dan perubahan inventori, juga menunjukkan *trend* kecenderungan yang sama dengan nilai ICOR dengan tanpa perubahan inventori (Lihat gambar di atas). Dengan pendekatan tersebut, rata-rata nilai ICOR di Provinsi Jambi selama kurun waktu 2013-2017 adalah sebesar 4,82. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menambah *output* sebesar 1 unit dibutuhkan tambahan investasi sebanyak 4,82 satuan tiap tahun. Secara umum, ICOR Provinsi Jambi pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mana hal ini mengindikasikan bahwa ekonomi daerah semakin efisien.

Pada tahun berikutnya, kondisi perekonomian daerah yang semakin membaik (ditunjukkan dengan laju pertumbuhan nilai tambah yang mengalami penurunan dari 5,77 persen pada tahun 2015 menjadi 5,60 persen pada tahun 2016) menyebabkan kembali membaiknya angka ICOR di Provinsi Jambi. Membaiknya kondisi tersebut juga disebabkan oleh upaya yang cukup keras dari pemerintah daerah dalam membuat perencanaan dan implementasinya program pembangunan di samping kondisi makro ekonomi perekonomian nasional akibat kebijakan pusat termasuk di dalamnya adalah paket kebijakan deregulasi dari pemerintah.

Tabel 7.4 Nilai ICOR di Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha Pada Lag 0, Tahun 2013-2017

(Metode Standar dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori)

| Sektor PDRB | Tahun | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 16,50 | 9,62 | 17,13 | 14,65 | 17,06 |
| B, Pertambangan dan Pengalihan | 24,71 | 23,49 | -404,13 | 223,27 | 27,63 |
| C, Industri Pengolahan | 27,59 | 47,33 | 91,65 | 95,85 | 75,03 |
| D, Pengadaan Listrik dan Gas | 6505,78 | 3718,48 | 6513,18 | 7721,94 | 27942,26 |
| E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 9442,11 | 4339,42 | 4364,21 | 3580,51 | 6968,93 |
| F, Konstruksi | 21,14 | 42,21 | 102,16 | 97,60 | 48,91 |
| G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 36,40 | 34,29 | 26,47 | 37,46 | 59,39 |

| Sektor PDRB | Tahun | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| H, Transportasi dan Pergudangan | 109,43 | 106,61 | 120,52 | 94,39 | 129,16 |
| I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 435,77 | 152,89 | 365,92 | 306,25 | 289,15 |
| J, Informasi dan Komunikasi | 122,11 | 116,51 | 76,43 | 84,44 | 106,00 |
| K, Jasa Keuangan dan Asuransi | 96,58 | 290,15 | 501,45 | 104,68 | 340,07 |
| L, Real Estate | 340,21 | 793,17 | 401,55 | 393,23 | 372,54 |
| M,N, Jasa Perusahaan | 1155,77 | 505,11 | 374,54 | 445,83 | 543,33 |
| O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 169,86 | 60,55 | 103,59 | 229,53 | 281,38 |
| P, Jasa Pendidikan | 142,98 | 621,64 | 103,76 | 125,49 | 178,27 |
| Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 328,93 | 176,61 | 228,20 | 329,41 | 394,91 |
| R,S,T,U, Jasa lainnya | 537,27 | 484,33 | 286,27 | 367,27 | 528,90 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | 3,79 | 3,60 | 5,77 | 5,60 | 5,34 |

Sumber: BPS Provinsi Jambi (Diolah)

Sementara itu, dengan metode standar nilai ICOR di Provinsi Jambi pada lag 0 tersaji dalam tabel di atas. Pada periode 2013-2017 rata-rata koefisien ICOR provinsi Jambi menurut sektor perekonomian, pada lag 0 sebesar 4,82. Pada lag ini, didapati bahwa sektor yang mempunyai koefisien ICOR paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian. Adapun 2 sektor lain yang berada pada 3 sektor dengan nilai ICOR terendah adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan kemudian diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Adapun koefisien ICOR paling besar pada ketiga lag tersebut adalah sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang serta jasa perusahaan dengan rata-rata koefisien ICOR sebesar 5.608,09. Hal itu mencerminkan bahwa untuk meningkatkan tambahan *output* sebesar satu juta rupiah pada sektor tersebut di Provinsi Jambi membutuhkan margin kapital sebesar 5.608,09 juta rupiah.

Tabel 7.5 Kebutuhan Investasi untuk Setiap Target Pertumbuhan Ekonomi Berdasar RPJMD Perubahan Provinsi Jambi Tahun 2018-2021

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Target Pertumbuhan Ekonomi | 5,00% | 5,5% | 5,9% | 6,2% |
| PDRB ADHK (Juta Rupiah) | 143.384.541,3 | 151.270.691 | 160.195.662 | 170.127.792,9 |
| ΔY | 6.827.835 | 7.886.149,77 | 8.924.970,77 | 9.932.131,034 |
| Kebutuhan Investasi (Juta Rupiah) | 32.910.166,15 | 38.011.241,9 | 43.018.359,1 | 47.872.871,59 |

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2018 (Diolah)

Catatan:

-Koefisien ICOR Standar rata-rata : 4,82

-PDRB ADHK Tahun 2017: 136.556.706 juta rupiah

-Target pertumbuhan ekonomi tahun 2018-2021 diadopsi dari RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016-2021

-Dengan asumsi ceteris paribus

- ΔY : Selisih Nilai Tambah Bruto (NTB) tahun (t) dengan tahun (t_{-1}).

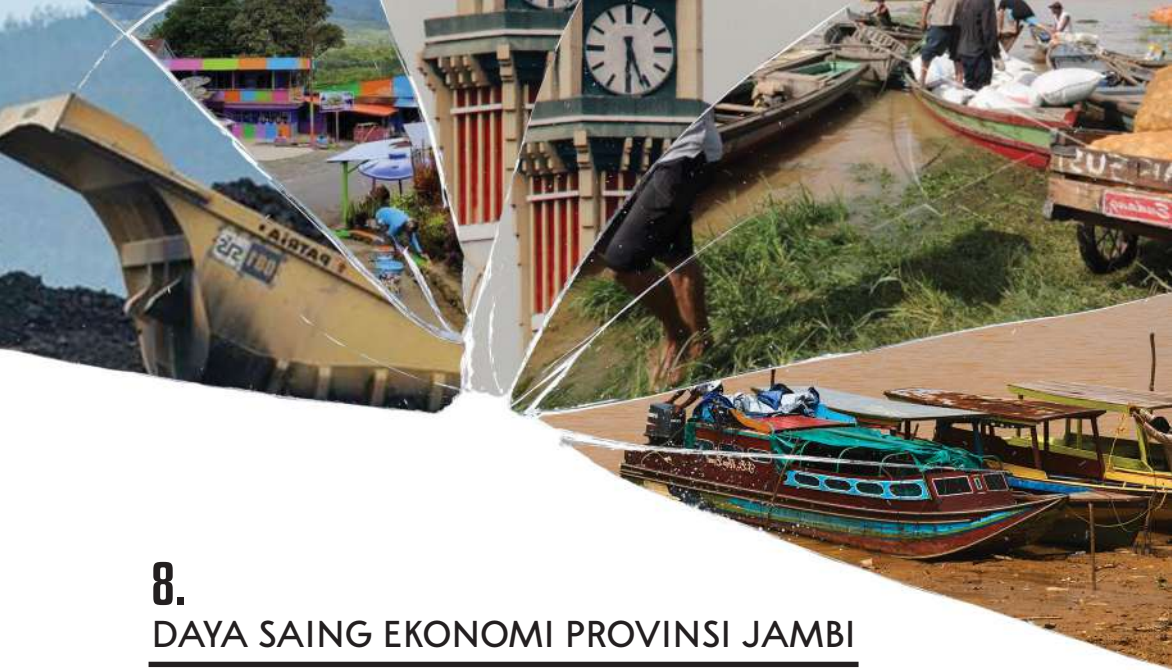
Adapun kebutuhan investasi untuk beberapa tahun mendatang dapat diperkirakan dengan menggunakan angka ICOR dengan metode standar selama periode 2013-2017 yaitu sebesar 4,82 dan target pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Selama periode 2013-2017, diketahui bahwa nilai ICOR standar di Provinsi Jambi adalah sebesar 4,82 dengan asumsi laju inflasi tetap dan target pertumbuhan ekonomi 5,0 persen pada tahun 2018 dengan demikian maka jumlah tambahan investasi yang diperlukan adalah sebesar 32.910.166,15 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2019 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen sehingga dibutuhkan tambahan investasi sebesar 38.011.241,9 juta rupiah. Selanjutnya pada tahun 2020 dan tahun 2021 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9% dan 6,2% persen maka dibutuhkan tambahan investasi masing-masing sebesar 43.018.359,1 juta rupiah dan 47.872.871,59 juta rupiah.

Karena anggaran pemerintah tersebut sangatlah terbatas dengan demikian maka diharapkan peran swasta dan rumah tangga dalam

penanaman modal di Provinsi Jambi lebih dioptimalkan, demi mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk itu, pemerintah pusat pada umumnya maupun Pemerintah Provinsi Jambi pada khususnya dirasa perlu untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif supaya pihak swasta dan rumah tangga baik dari dalam maupun asing berminat untuk menanamkan modal mereka.

Keputusan untuk melakukan investasi pada suatu sektor ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa hal berikut merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan investasi. Pertama, Lapangan Usaha dengan koefisien ICOR kecil akan mendapat prioritas untuk melakukan investasi. Dari sisi ekonomi, lapangan usaha ini menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Kedua, lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja yang besar, meskipun mempunyai angka ICOR yang relatif tinggi perlu mendapat prioritas investasi. Investasi pada lapangan usaha ini akan membantu mengurangi masalah pengangguran di wilayah tersebut. Ketiga, lapangan usaha yang mempunyai *backward* dan *forward linkages* tinggi juga perlu dipertimbangkan untuk mendapat prioritas investasi karena mempunyai *multiplier effect* yang relatif lebih besar. Investasi pada lapangan usaha ini akan menciptakan pasar bagi komoditi lainnya, sehingga akan menggerakkan perekonomian wilayah. Keempat, lapangan usaha yang mempunyai potensi pasar cukup besar. Selain itu, pilihan investasi juga harus mempertimbangkan kepemilikan sumber daya (*resource endowments*) lokal, kebijakan pemerintah mengenai konservasi sumber daya alam, dan faktor lainnya.



8.

DAYA SAING EKONOMI PROVINSI JAMBI

Berdasarkan perencanaan pembangunan pemerintah, salah satu sasaran pembangunan yang dicantumkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan RPJMN) tahun 2020-2024 adalah meningkatkan daya saing daerah. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari tuntutan jaman pada era globalisasi yang tidak akan lepas dari persaingan pada setiap bidang kehidupan. Berlandaskan hal tersebut, setiap daerah (kabupaten-kota atau provinsi) dituntut untuk mampu menyesuaikan diri pada iklim tersebut sehingga secara nasional dapat tercipta daya saing yang kompetitif.

Pada pelaksanaannya, pembangunan daerah semakin dinamis, berdasar hal itu tentu diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi yang terarah dan terpadu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Pembangunan daerah juga diarahkan agar terciptanya kemandirian daerah, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah tersebut. Daya saing tidak hanya berorientasi pada indikator ekonomi, tetapi juga kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Daya Saing Provinsi Jambi dan Provinsi Lainnya di Indonesia

Daya saing wilayah menunjukkan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Variabel-variabel yang diukur dalam pengukuran tingkat daya saing pada buku ini adalah variabel dengan indikator *input* dan *output*. Variabel dengan indikator *input* meliputi lingkungan usaha produktif, perekonomian daerah, sumber daya manusia, infrastruktur dan sumber daya alam, serta variabel indikator *output* yang terdiri dari produktivitas tenaga kerja, tingkat kesempatan kerja, PDRB per kapita, dan Indeks pembangunan manusia di semua Provinsi di Indonesia dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi.

Daya Saing *Input*

Indikator *input* adalah indikator dalam piramida daya saing daerah yang bersifat *endowment* maupun yang diakibatkan oleh adanya interaksi aktivitas kegiatan masyarakatnya. Faktor pembentuk daya saing *input* pembentuk daya saing daerah Provinsi di Indonesia terdiri dari empat indikator utama, yaitu lingkungan usaha produktif, perekonomian daerah, sumber daya manusia, dan infrastruktur dan sumber daya alam.

Lingkungan usaha produktif merupakan indikator dasar sebagai prasyarat dalam menumbuhkan daya saing daerah. Indikator yang umumnya dipakai untuk menunjukkan lingkungan usaha produktif adalah Angka Melek Huruf (AMH) % (LUP1), Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI % (LUP2), Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs % (LUP3), Tingkat kemiskinan % (LUP4), Kepadatan penduduk jiwa/km² (LUP5). Hasil perhitungan Analisis pembentuk daya saing *input* dengan indikator lingkungan usaha produktif dapat di lihat pada Tabel 8.1. Pada kenyataannya, Provinsi Jambi hanya berada di peringkat ke-19 untuk analisis daya saing *input* berdasarkan indikator lingkungan usaha produktif dengan skor sebesar 0.901, yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing menengah”. Dari kelima variabel yang mewakili

indikator lingkungan usaha produktif, peringkat tertinggi yang diperoleh Provinsi Jambi adalah pada variabel LUP2 (peringkat ke-9), LUP1 (peringkat ke-15), dan LUP4 (peringkat ke-16). Peringkat terendah pada variabel LUP5 (peringkat ke-24) dan LUP3 (peringkat ke-19).

Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama dalam daya saing *input* lingkungan usaha produktif dengan skor 5.492. Selanjutnya secara berurutan disusul oleh Provinsi Bali, Banten, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta. Diposisi terakhir ditempati oleh Provinsi Papua dengan skor 0.535. Di Pulau Sumatera, Provinsi yang memiliki daya saing tinggi (10 provinsi peringkat teratas) adalah Provinsi Kepulauan Riau (peringkat ke-7) dan Bangka Belitung (peringkat ke-9). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing menengah selain Provinsi Jambi adalah Provinsi Sumatera Barat (peringkat ke-13), Riau (peringkat ke-16), Sumatera Utara (peringkat ke-17), Lampung (peringkat ke-22) . Sementara itu, Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah) adalah Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-25), Sumatera Selatan (peringkat ke-27), dan Bengkulu (peringkat ke-28).

Tabel 8.1 Tingkat Daya Saing *Input* Provinsi di Indonesia Berdasarkan Variabel Lingkungan Usaha Produktif

| No. | Provinsi | Lingkungan Usaha Produktif | | | | | LUP | Peringkat |
|-----|--------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-----------|
| | | LUP1 | LUP2 | LUP3 | LUP4 | LUP5 | | |
| 1 | Nanggroe Aceh Darussalam | 1.022 | 1.021 | 1.143 | 0.688 | 0.121 | 0.799 | 25 |
| 2 | Sumatera Utara | 1.034 | 1.007 | 1.092 | 1.180 | 0.268 | 0.916 | 17 |
| 3 | Sumatera Barat | 1.033 | 1.022 | 1.096 | 1.622 | 0.174 | 0.990 | 13 |
| 4 | Riau | 1.036 | 1.006 | 1.027 | 1.478 | 0.103 | 0.930 | 16 |
| 5 | Jambi | 1.025 | 1.020 | 0.977 | 1.386 | 0.096 | 0.901 | 19 |
| 6 | Sumatera Selatan | 1.029 | 1.007 | 0.962 | 0.836 | 0.124 | 0.792 | 27 |
| 7 | Bengkulu | 1.022 | 1.022 | 1.064 | 0.702 | 0.132 | 0.789 | 28 |
| 8 | Lampung | 1.012 | 1.026 | 0.961 | 0.840 | 0.329 | 0.833 | 22 |
| 9 | Bangka Belitung | 1.021 | 1.009 | 0.940 | 2.066 | 0.118 | 1.031 | 9 |
| 10 | Kepulauan Riau | 1.033 | 1.025 | 1.173 | 1.786 | 0.339 | 1.071 | 7 |
| 11 | DKI. Jakarta | 1.042 | 1.012 | 0.970 | 2.897 | 21.541 | 5.492 | 1 |
| 12 | Jawa Barat | 1.027 | 1.016 | 0.932 | 1.399 | 1.855 | 1.246 | 4 |
| 13 | Jawa Tengah | 0.976 | 1.006 | 0.964 | 0.895 | 1.448 | 1.058 | 8 |

| No. | Provinsi | Lingkungan Usaha Produktif | | | | | LUP | Peringkat |
|-----|---------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | LUP1 | LUP2 | LUP3 | LUP4 | LUP5 | | |
| 14 | D.I. Yogyakarta | 0.989 | 1.029 | 1.135 | 0.886 | 1.650 | 1.138 | 5 |
| 15 | Jawa Timur | 0.958 | 1.013 | 1.002 | 0.978 | 1.143 | 1.019 | 10 |
| 16 | Banten | 1.020 | 1.011 | 0.943 | 1.959 | 1.738 | 1.334 | 3 |
| 17 | Bali | 0.971 | 0.996 | 1.179 | 2.645 | 1.009 | 1.360 | 2 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 0.910 | 1.017 | 1.070 | 0.728 | 0.365 | 0.818 | 23 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 0.957 | 0.989 | 0.869 | 0.512 | 0.148 | 0.695 | 33 |
| 20 | Kalimantan Barat | 0.966 | 1.001 | 0.830 | 1.393 | 0.046 | 0.847 | 21 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 1.035 | 1.025 | 0.877 | 2.082 | 0.022 | 1.008 | 11 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 1.028 | 1.020 | 0.931 | 2.330 | 0.145 | 1.091 | 6 |
| 23 | Kalimantan Timur | 1.033 | 1.010 | 1.111 | 1.801 | 0.038 | 0.999 | 12 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0.994 | 0.958 | 1.029 | 1.573 | 0.013 | 0.913 | 18 |
| 25 | Sulawesi Utara | 1.043 | 0.979 | 1.023 | 1.386 | 0.245 | 0.935 | 15 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 1.020 | 0.961 | 1.039 | 0.770 | 0.066 | 0.771 | 29 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 0.957 | 1.010 | 0.975 | 1.155 | 0.256 | 0.871 | 20 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 0.985 | 1.001 | 1.022 | 0.915 | 0.093 | 0.803 | 24 |
| 29 | Gorontalo | 1.029 | 1.011 | 0.926 | 0.639 | 0.142 | 0.749 | 30 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0.970 | 0.990 | 0.936 | 0.980 | 0.107 | 0.796 | 26 |
| 31 | Maluku | 1.035 | 0.990 | 1.037 | 0.599 | 0.051 | 0.742 | 31 |
| 32 | Maluku Utara | 1.032 | 1.005 | 1.035 | 1.700 | 0.051 | 0.965 | 14 |
| 33 | Papua Barat | 1.015 | 0.970 | 1.022 | 0.474 | 0.013 | 0.699 | 32 |
| 34 | Papua | 0.743 | 0.817 | 0.708 | 0.394 | 0.014 | 0.535 | 34 |

Perekonomian daerah menunjukkan potensi ekonomi dan struktur ekonomi suatu daerah dan merupakan pertimbangan penting dalam mendukung daya saing daerah. Dimensi yang digunakan untuk melihat kinerja perekonomian daerah meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triliun rupiah (PD1), Laju Pertumbuhan PDRB % (PD2), Realisasi PMDN miliar rupiah (PD3), Realisasi PMA juta dolar (PD4), Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) miliar rupiah (PD5), Realisasi Pajak Daerah milyar rupiah (PD6). Apabila dilihat dari indikator daya

saing *input* dengan variabel perekonomian daerah, terlihat bahwa Provinsi Jambi menempati urutan ke 15 dengan skor 0.572, yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing menengah”. Dari keenam variabel yang mewakili indikator perekonomian daerah, peringkat tertinggi yang diperoleh Provinsi Jambi adalah pada variabel PD4 (peringkat ke-12), dan PD3 (peringkat ke-15). Peringkat terendah pada variabel PD4 (peringkat ke-29), PD5 (peringkat ke-19), PD6 (peringkat ke-18), dan PD1 (peringkat ke-16). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 8.2. Pemerintah daerah perlu melakukan upaya yang dapat mendorong masuknya investasi asing ke Provinsi Jambi untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, perlu adanya upaya peningkatan PAD melalui peningkatan pajak daerah.

Secara nasional, Provinsi DKI Jakarta kembali menempati urutan pertama dalam daya saing *input* perekonomian daerah dengan skor 6.257. Selanjutnya secara berurutan disusul oleh Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Di posisi terakhir ditempati oleh Provinsi Kalimantan Utara dengan skor 0.219. Provinsi Kalimantan Utara membutuhkan perbaikan perekonomian daerah untuk meningkatkan skor daya saing daerah. Provinsi-provinsi lainnya masih memerlukan perbaikan daya saing adalah Provinsi Gorontalo, Maluku, Bangka Belitung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Utara.

Di Pulau Sumatera, terdapat dua provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas, yaitu Provinsi Sumatera Utara (peringkat ke-6) dan Riau (peringkat ke-7). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing perekonomian daerah kategori menengah selain Provinsi Jambi adalah Provinsi Sumatera Selatan (peringkat ke-11), Lampung (peringkat ke-14), Sumatera Utara (peringkat ke-17), Lampung (peringkat ke-22) . Sementara itu, terdapat tiga Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah), yaitu Bangka Belitung (peringkat ke-31), Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-28), dan Kepulauan Riau (peringkat ke-26).

Tabel 8.2 Tingkat Daya Saing *Input* Provinsi di Indonesia Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah

| No. | Provinsi | Perekonomian Daerah | | | | | | PD | Peringkat |
|-----|--------------------------|---------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|
| | | PD1 | PD2 | PD3 | PD4 | PD5 | PD6 | | |
| 1 | Nanggroe Aceh Darussalam | 0.417 | 0.618 | 0.101 | 0.024 | 0.537 | 0.368 | 0.344 | 28 |
| 2 | Sumatera Utara | 1.660 | 0.967 | 1.514 | 1.598 | 1.188 | 1.269 | 1.366 | 6 |
| 3 | Sumatera Barat | 0.530 | 0.982 | 0.197 | 0.205 | 0.493 | 0.434 | 0.473 | 23 |
| 4 | Riau | 1.643 | 0.416 | 1.404 | 1.119 | 0.901 | 0.849 | 1.055 | 7 |
| 5 | Jambi | 0.467 | 0.816 | 0.390 | 1.088 | 0.336 | 0.337 | 0.572 | 15 |
| 6 | Sumatera Selatan | 0.955 | 0.939 | 1.063 | 0.081 | 0.729 | 0.801 | 0.761 | 11 |
| 7 | Bengkulu | 0.143 | 0.990 | 0.038 | 1.247 | 0.218 | 0.183 | 0.470 | 24 |
| 8 | Lampung | 0.751 | 0.962 | 0.909 | 0.161 | 0.639 | 0.677 | 0.683 | 14 |
| 9 | Bangka Belitung | 0.171 | 0.767 | 0.225 | 0.146 | 0.164 | 0.158 | 0.272 | 31 |
| 10 | Kepulauan Riau | 0.583 | 0.939 | 0.181 | 0.127 | 0.266 | 0.283 | 0.397 | 26 |
| 11 | DKI. Jakarta | 5.510 | 1.092 | 6.125 | 4.846 | 10.005 | 9.965 | 6.257 | 1 |
| 12 | Jawa Barat | 4.566 | 1.059 | 4.975 | 5.424 | 3.985 | 4.310 | 4.053 | 2 |
| 13 | Jawa Tengah | 3.040 | 0.986 | 2.575 | 3.214 | 2.886 | 2.876 | 2.596 | 4 |
| 14 | D.I. Yogyakarta | 0.314 | 0.943 | 0.038 | 2.502 | 0.400 | 0.407 | 0.767 | 10 |
| 15 | Jawa Timur | 5.030 | 1.036 | 5.838 | 0.038 | 3.593 | 3.445 | 3.163 | 3 |
| 16 | Banten | 1.387 | 0.982 | 1.962 | 1.652 | 1.366 | 1.540 | 1.482 | 5 |
| 17 | Bali | 0.491 | 1.165 | 0.077 | 0.935 | 0.784 | 0.821 | 0.712 | 13 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 0.338 | 1.087 | 0.702 | 0.139 | 0.362 | 0.317 | 0.491 | 21 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 0.214 | 0.967 | 0.140 | 0.147 | 0.242 | 0.217 | 0.321 | 29 |
| 20 | Kalimantan Barat | 0.423 | 0.975 | 1.605 | 0.599 | 0.404 | 0.409 | 0.736 | 12 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0.300 | 1.188 | 0.394 | 0.676 | 0.320 | 0.308 | 0.531 | 18 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0.414 | 0.818 | 0.386 | 0.257 | 0.773 | 0.760 | 0.568 | 16 |

| No. | Provinsi | Perekonomian Daerah | | | | | | PD | Peringkat |
|-----|-------------------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | PD1 | PD2 | PD3 | PD4 | PD5 | PD6 | | |
| 23 | Kalimantan Timur | 1.571 | -0.071 | 1.423 | 1.355 | 0.962 | 0.858 | 1.016 | 8 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0.183 | 0.700 | 0.111 | 0.157 | 0.077 | 0.088 | 0.219 | 34 |
| 25 | Sulawesi Utara | 0.268 | 1.152 | 0.193 | 0.509 | 0.260 | 0.257 | 0.440 | 25 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 0.326 | 1.864 | 0.250 | 0.044 | 0.221 | 0.221 | 0.488 | 22 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 0.964 | 1.384 | 0.255 | 1.630 | 0.898 | 0.937 | 1.011 | 9 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 0.278 | 1.216 | 0.408 | 0.752 | 0.179 | 0.178 | 0.502 | 20 |
| 29 | Gorontalo | 0.084 | 1.217 | 0.115 | 0.012 | 0.086 | 0.092 | 0.268 | 33 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0.099 | 1.126 | 0.086 | 0.731 | 0.072 | 0.071 | 0.364 | 27 |
| 31 | Maluku | 0.094 | 1.076 | 0.007 | 0.224 | 0.125 | 0.095 | 0.270 | 32 |
| 32 | Maluku Utara | 0.077 | 1.077 | 0.149 | 0.241 | 0.117 | 0.103 | 0.294 | 30 |
| 33 | Papua Barat | 0.196 | 0.844 | 0.008 | 2.029 | 0.097 | 0.074 | 0.541 | 17 |
| 34 | Papua | 0.510 | 1.720 | 0.158 | 0.089 | 0.315 | 0.291 | 0.514 | 19 |

Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia adalah faktor penting penentu daya saing suatu negara/daerah untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. sumber daya manusia merupakan indikator yang penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi suatu daerah. sumber daya manusia dalam jumlah besar dan berkualitas akan meningkatkan daya saing ekonomi suatu daerah. Faktor sumber daya manusia terdiri dari lima variabel, yaitu Rasio ketergantungan % (SDM1), Jumlah penduduk yang bekerja ribu jiwa (SDM2), Jumlah penduduk yang menganggur ribu jiwa (SDM3), Jumlah angkatan kerja ribu jiwa (SDM4), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % (SDM5). Apabila dilihat dari indikator daya saing *input* dengan variabel sumber daya manusia, terlihat bahwa Provinsi Jambi menempati urutan ke 17 dengan skor 1.216, yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing menengah”. Dari kelima variabel yang mewakili indikator sumber daya manusia, peringkat tertinggi yang diperoleh Provinsi Jambi adalah pada variabel SDM1 (peringkat ke-9), SDM3 (peringkat ke-15), dan SDM5 (peringkat ke-16). Peringkat terendah pada variabel SDM2 (peringkat

ke-20), dan SDM4 (peringkat ke-20). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 8.3. Pemerintah daerah perlu membuat kebijakan *pro-job* agar dapat meningkatkan kesempatan kerja sehingga jumlah orang yang mendapat pekerjaan semakin tinggi.

Secara nasional, Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dalam daya saing *input* sumber daya manusia dengan skor 2.763. Selanjutnya secara berurutan disusul oleh Provinsi Jawa Timur, n Utara, Sulawesi Barat, dan Jawa Tengah. Di posisi terakhir ditempati oleh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan skor 0.890. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membutuhkan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan skor daya saing *input* daerah. Provinsi-provinsi lainnya masih memerlukan perbaikan daya saing sumber daya manusia adalah Provinsi Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta.

Di Pulau Sumatera, hanya terdapat satu provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas, yaitu Provinsi Bangka Belitung (peringkat ke-7). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing perekonomian daerah kategori menengah selain Provinsi Jambi adalah Provinsi Bengkulu (peringkat ke-11), Sumatera Utara (peringkat ke-18), Kepulauan Riau (peringkat ke-21), Sumatera Selatan (peringkat ke-22), dan Lampung (peringkat ke-23) . Sementara itu, terdapat tiga Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah), yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-34), Riau (peringkat ke-33), dan Sumatera Barat (peringkat ke-32).

Tabel 8.3 Tingkat Daya Saing *Input* Provinsi di Indonesia Berdasarkan Variabel Sumber Daya Manusia

| No. | Provinsi | Sumber Daya Manusia | | | | | SDM | Peringkat |
|-----|--------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | SDM1 | SDM2 | SDM3 | SDM4 | SDM5 | | |
| 1 | Nanggroe Aceh Darussalam | 0.910 | 0.601 | 1.378 | 0.608 | 0.952 | 0.890 | 34 |
| 2 | Sumatera Utara | 0.882 | 1.788 | 0.549 | 1.790 | 1.029 | 1.208 | 18 |
| 3 | Sumatera Barat | 0.878 | 0.659 | 1.493 | 0.659 | 0.990 | 0.936 | 32 |
| 4 | Riau | 0.955 | 0.781 | 1.122 | 0.787 | 0.956 | 0.920 | 33 |
| 5 | Jambi | 1.048 | 0.466 | 3.099 | 0.458 | 1.009 | 1.216 | 17 |

| No. | Provinsi | Sumber Daya Manusia | | | | | SDM | Peringkat |
|-----|---------------------|---------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|
| | | SDM1 | SDM2 | SDM3 | SDM4 | SDM5 | | |
| 6 | Sumatera Selatan | 0.987 | 1.108 | 1.143 | 1.095 | 1.038 | 1.074 | 22 |
| 7 | Bengkulu | 1.043 | 0.262 | 5.708 | 0.257 | 1.035 | 1.661 | 11 |
| 8 | Lampung | 0.987 | 1.095 | 1.175 | 1.081 | 1.013 | 1.070 | 23 |
| 9 | Bangka Belitung | 1.061 | 0.189 | 7.844 | 0.186 | 0.997 | 2.055 | 7 |
| 10 | Kepulauan Riau | 0.994 | 0.252 | 2.994 | 0.256 | 0.992 | 1.098 | 21 |
| 11 | DKI. Jakarta | 1.221 | 1.267 | 0.597 | 1.289 | 0.926 | 1.060 | 25 |
| 12 | Jawa Barat | 1.037 | 5.774 | 0.113 | 5.945 | 0.946 | 2.763 | 1 |
| 13 | Jawa Tengah | 1.024 | 4.828 | 0.251 | 4.782 | 1.032 | 2.384 | 5 |
| 14 | D.I. Yogyakarta | 1.097 | 0.577 | 3.234 | 0.562 | 1.068 | 1.308 | 15 |
| 15 | Jawa Timur | 1.118 | 5.647 | 0.247 | 5.559 | 1.027 | 2.720 | 2 |
| 16 | Banten | 1.066 | 1.426 | 0.399 | 1.486 | 0.931 | 1.062 | 24 |
| 17 | Bali | 1.088 | 0.674 | 5.729 | 0.646 | 1.124 | 1.852 | 10 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 0.923 | 0.651 | 2.606 | 0.636 | 1.023 | 1.168 | 19 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 0.737 | 0.652 | 2.636 | 0.637 | 1.032 | 1.139 | 20 |
| 20 | Kalimantan Barat | 0.963 | 0.647 | 1.971 | 0.639 | 1.025 | 1.049 | 27 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 1.059 | 0.344 | 3.837 | 0.339 | 1.012 | 1.318 | 13 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 1.012 | 0.555 | 2.093 | 0.551 | 1.047 | 1.051 | 26 |
| 23 | Kalimantan Timur | 1.076 | 0.433 | 1.812 | 0.439 | 0.952 | 0.942 | 31 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0.953 | 0.088 | 11.306 | 0.088 | 1.019 | 2.691 | 3 |
| 25 | Sulawesi Utara | 1.031 | 0.292 | 2.573 | 0.298 | 0.909 | 1.021 | 29 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 0.969 | 0.386 | 3.809 | 0.379 | 1.003 | 1.309 | 14 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 0.927 | 1.011 | 0.969 | 1.012 | 0.911 | 0.966 | 30 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 0.802 | 0.326 | 5.225 | 0.319 | 1.026 | 1.540 | 12 |
| 29 | Gorontalo | 1.014 | 0.147 | 8.830 | 0.145 | 0.968 | 2.221 | 6 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0.850 | 0.167 | 10.488 | 0.163 | 1.000 | 2.534 | 4 |

| No. | Provinsi | Sumber Daya Manusia | | | | | SDM | Peringkat |
|-----|--------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | SDM1 | SDM2 | SDM3 | SDM4 | SDM5 | | |
| 31 | Maluku | 0.821 | 0.180 | 3.150 | 0.188 | 0.899 | 1.048 | 28 |
| 32 | Maluku Utara | 0.818 | 0.137 | 7.525 | 0.137 | 0.951 | 1.914 | 9 |
| 33 | Papua Barat | 0.965 | 0.113 | 7.408 | 0.114 | 1.008 | 1.922 | 8 |
| 34 | Papua | 1.002 | 0.477 | 3.247 | 0.468 | 1.149 | 1.269 | 16 |

Ketersediaan infrastruktur dan sumber daya alam yang memadai dapat menciptakan iklim ekonomi yang dinamis. Infrastruktur dan sumber daya alam merupakan faktor pendukung bagi kelancaran kegiatan usaha. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur sangat mempengaruhi kelancaran dunia usaha di suatu daerah. Begitu pula dengan ketersediaan sumber daya alam. Semakin besar skala suatu usaha, maka kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya alam juga akan semakin besar. Oleh sebab itu peningkatan sarana-prasarana daerah baik sebagai penunjang atau pendukung aktivitas usaha dan kekayaan sumber daya alam menjadi sangat perlu untuk dikembangkan dan tingkatkan nilai kegunaannya. Infrastruktur merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran kegiatan usaha. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur sangat mempengaruhi kelancaran kegiatan usaha di daerah. Semakin besar skala usaha, maka kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur juga semakin besar sehingga dibutuhkan kesinambungan untuk menjaga ketersediaan dan kualitas infrastruktur tersebut. Sumber daya alam yang melimpah juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Indikator yang dipakai untuk menunjukkan infrastruktur dan sumber daya alam adalah Panjang Jalan Raya kilometer (ISDA1), Kualitas Jalan Raya % (ISDA2), Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Mega Watt (ISDA3), Persentase Rumah Tangga Yang menggunakan Listri PLN % (ISDA4), Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan % (ISDA5).

Untuk lingkup infrastruktur dan sumber daya alam seperti pada Tabel 8.4, terlihat bahwa Provinsi Jambi menempati urutan ke 25 dengan skor 0.783, yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing rendah” dan menjadi yang terendah di antara indikator daya saing *input* lainnya. Dari kelima variabel yang mewakili indikator infrastruktur dan sumber daya alam, peringkat tertinggi yang diperoleh Provinsi Jambi adalah pada variabel ISDA1 (peringkat ke-20), ISDA2 (peringkat ke-20),

dan ISDA4 (peringkat ke-22). Peringkat terendah pada variabel ISDA3 (peringkat ke-30), dan ISDA5 (peringkat ke-25). Untuk meningkatkan daya saing indikator infrastruktur dan sumber daya alam, pemerintah daerah Provinsi Jambi perlu meningkatkan skor daya saing terutama kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik dan akses masyarakat terhadap sumber air minum yang layak dan berkelanjutan.

Secara nasional, Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama dalam daya saing *input* infrastruktur dan sumber daya alam dengan skor 2.793. Selanjutnya secara berurutan disusul oleh Provinsi Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Jawa Barat. Di posisi terakhir ditempati oleh Provinsi Sulawesi Barat dengan skor 0.644. Provinsi Sulawesi Barat membutuhkan pengembangan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan skor daya saing daerah. Provinsi-provinsi lainnya masih memerlukan perbaikan daya saing adalah Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat, Bangka Belitung, Lampung, dan Provinsi Jambi.

Di Pulau Sumatera, terdapat dua provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas, yaitu Provinsi Sumatera Utara (peringkat ke-4) dan Sumatera Selatan (peringkat ke-6). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing perekonomian daerah kategori menengah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-12), Kepulauan Riau (peringkat ke-20), Sumatera Barat (peringkat ke-22), dan Riau (peringkat ke-24). Sementara itu, terdapat tiga Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah) selain Provinsi Jambi, yaitu Lampung (peringkat ke-26), Bangka Belitung (peringkat ke-27), dan Bengkulu (peringkat ke-33).

Tabel 8.4 Tingkat Daya Saing *Input* Provinsi di Indonesia Berdasarkan Variabel Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

| No. | Provinsi | Infrastruktur dan Sumber Daya Alam | | | | | ISDA | Peringkat |
|-----|--------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | ISDA1 | ISDA2 | ISDA3 | ISDA4 | ISDA5 | | |
| 1 | Nanggroe Aceh Darussalam | 1.520 | 1.053 | 0.142 | 1.098 | 0.921 | 0.947 | 12 |
| 2 | Sumatera Utara | 1.903 | 0.901 | 2.603 | 1.068 | 1.027 | 1.501 | 4 |
| 3 | Sumatera Barat | 1.048 | 0.971 | 0.050 | 1.063 | 0.979 | 0.822 | 22 |
| 4 | Riau | 0.967 | 0.915 | 0.107 | 0.928 | 1.098 | 0.803 | 24 |

| No. | Provinsi | Infrastruktur dan Sumber Daya Alam | | | | | ISDA | Peringkat |
|-----|---------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | ISDA1 | ISDA2 | ISDA3 | ISDA4 | ISDA5 | | |
| 5 | Jambi | 0.953 | 0.996 | 0.037 | 1.008 | 0.920 | 0.783 | 25 |
| 6 | Sumatera Selatan | 1.157 | 0.926 | 1.931 | 1.031 | 0.927 | 1.194 | 6 |
| 7 | Bengkulu | 0.573 | 1.057 | 0.016 | 1.063 | 0.543 | 0.651 | 33 |
| 8 | Lampung | 0.934 | 0.983 | 0.074 | 1.031 | 0.762 | 0.757 | 26 |
| 9 | Bangka Belitung | 0.434 | 1.104 | 0.193 | 1.087 | 0.930 | 0.750 | 27 |
| 10 | Kepulauan Riau | 0.424 | 1.008 | 0.452 | 1.059 | 1.241 | 0.837 | 20 |
| 11 | DKI. Jakarta | 0.039 | 1.096 | 0.834 | 1.115 | 1.344 | 0.886 | 15 |
| 12 | Jawa Barat | 1.294 | 1.047 | 2.503 | 1.110 | 0.983 | 1.387 | 5 |
| 13 | Jawa Tengah | 1.098 | 1.025 | 3.164 | 1.115 | 1.110 | 1.502 | 3 |
| 14 | D.I. Yogyakarta | 0.179 | 1.081 | 0.000 | 1.117 | 1.179 | 0.711 | 32 |
| 15 | Jawa Timur | 1.707 | 1.043 | 9.004 | 1.105 | 1.103 | 2.793 | 1 |
| 16 | Banten | 0.408 | 1.031 | 7.901 | 1.111 | 0.981 | 2.287 | 2 |
| 17 | Bali | 0.455 | 1.071 | 0.624 | 1.117 | 1.290 | 0.912 | 14 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 0.676 | 1.087 | 0.242 | 1.093 | 1.076 | 0.835 | 21 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 1.344 | 0.973 | 0.182 | 0.728 | 0.873 | 0.820 | 23 |
| 20 | Kalimantan Barat | 1.531 | 1.015 | 0.401 | 0.914 | 0.963 | 0.965 | 11 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 1.448 | 0.964 | 0.044 | 0.863 | 0.891 | 0.842 | 18 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0.871 | 1.050 | 1.026 | 1.075 | 0.853 | 0.975 | 10 |
| 23 | Kalimantan Timur | 1.237 | 1.030 | 0.646 | 1.029 | 1.148 | 1.018 | 8 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0.423 | 0.912 | 0.061 | 0.973 | 1.203 | 0.714 | 31 |
| 25 | Sulawesi Utara | 1.203 | 1.029 | 0.220 | 1.098 | 1.021 | 0.914 | 13 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 1.716 | 1.038 | 0.258 | 0.967 | 0.904 | 0.977 | 9 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 1.263 | 1.033 | 0.756 | 1.057 | 1.068 | 1.035 | 7 |

| No. | Provinsi | Infrastruktur dan Sumber Daya Alam | | | | | ISDA | Peringkat |
|-----|-------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | ISDA1 | ISDA2 | ISDA3 | ISDA4 | ISDA5 | | |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 1.083 | 1.014 | 0.078 | 0.981 | 1.103 | 0.852 | 16 |
| 29 | Gorontalo | 0.541 | 0.995 | 0.019 | 1.042 | 1.041 | 0.728 | 30 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0.552 | 0.960 | 0.002 | 0.848 | 0.858 | 0.644 | 34 |
| 31 | Maluku | 1.281 | 0.911 | 0.145 | 0.937 | 0.977 | 0.850 | 17 |
| 32 | Maluku Utara | 0.870 | 0.936 | 0.045 | 0.886 | 0.916 | 0.731 | 29 |
| 33 | Papua Barat | 0.959 | 0.838 | 0.069 | 0.840 | 1.000 | 0.741 | 28 |
| 34 | Papua | 1.907 | 0.906 | 0.166 | 0.446 | 0.766 | 0.838 | 19 |

Setelah dilakukan analisis keempat variabel dari indikator daya saing *input* secara nasional, dapat disimpulkan bahwa provinsi menurut peringkat daya saing *input* adalah sebagai mana terlihat pada Tabel 8.5. Provinsi Jambi menempati peringkat ke 19 yang masuk dalam kategori provinsi dengan daya saing menengah. Dari semua variabel indikator daya saing *input*, indikator yang berkontribusi besar dalam daya saing *input* Provinsi Jambi adalah indikator perekonomian daerah dan lingkungan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan daya saing *inputnya* pemerintah daerah perlu meningkatkan skor daya saing semua indikator, terutama indikator infrastruktur dan sumber daya alam, serta lingkungan usaha produktif.

Secara nasional, Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dalam daya saing *input*. Selanjutnya secara berurutan disusul oleh Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Bali. Di posisi terakhir ditempati oleh Provinsi Maluku. Provinsi Maluku membutuhkan peningkatan perekonomian daerah, pengembangan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan sumber daya alam untuk k skor daya saing daerah. Provinsi-provinsi lainnya masih memerlukan perbaikan daya saing adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Papua, Kalimantan Utara, dan Papua Barat.

Di Pulau Sumatera, hanya terdapat satu provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas, yaitu Provinsi Sumatera Utara (peringkat ke-7). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing *input* kategori menengah selain Provinsi Jambi, adalah Provinsi Sumatera Selatan (peringkat ke-12), Bangka Belitung (peringkat ke-16), Kepulauan

Riau (peringkat ke-17), Riau (peringkat ke-20), dan Lampung (peringkat ke-24) . Sementara itu, terdapat tiga Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah), yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-31), Bengkulu (peringkat ke-30), dan Sumatera Barat (peringkat ke-28).

Tabel 8.5 Tingkat Daya Saing *Input* Provinsi Secara Keseluruhan di Indonesia

| No. | Provinsi | Peringkat Daya Saing Input | | | | Peringkat |
|-----|--------------------------|----------------------------|----|-----|------|-----------|
| | | LUP | PD | SDM | ISDA | |
| 1 | Nanggroe Aceh Darussalam | 25 | 28 | 34 | 12 | 31 |
| 2 | Sumatera Utara | 17 | 6 | 18 | 4 | 7 |
| 3 | Sumatera Barat | 13 | 23 | 32 | 22 | 28 |
| 4 | Riau | 16 | 7 | 33 | 24 | 20 |
| 5 | Jambi | 19 | 15 | 17 | 25 | 19 |
| 6 | Sumatera Selatan | 27 | 11 | 22 | 6 | 12 |
| 7 | Bengkulu | 28 | 24 | 11 | 33 | 30 |
| 8 | Lampung | 22 | 14 | 23 | 26 | 24 |
| 9 | Bangka Belitung | 9 | 31 | 7 | 27 | 16 |
| 10 | Kepulauan Riau | 7 | 26 | 21 | 20 | 17 |
| 11 | DKI. Jakarta | 1 | 1 | 25 | 15 | 6 |
| 12 | Jawa Barat | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 13 | Jawa Tengah | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 14 | D.I. Yogyakarta | 5 | 10 | 15 | 32 | 11 |
| 15 | Jawa Timur | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 16 | Banten | 3 | 5 | 24 | 2 | 4 |
| 17 | Bali | 2 | 13 | 10 | 14 | 5 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 23 | 21 | 19 | 21 | 23 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 33 | 29 | 20 | 23 | 33 |
| 20 | Kalimantan Barat | 21 | 12 | 27 | 11 | 14 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 11 | 18 | 13 | 18 | 10 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 6 | 16 | 26 | 10 | 8 |
| 23 | Kalimantan Timur | 12 | 8 | 31 | 8 | 9 |
| 24 | Kalimantan Utara | 18 | 34 | 3 | 31 | 26 |

| No. | Provinsi | Peringkat Daya Saing Input | | | | Peringkat |
|-----|-------------------|----------------------------|----|-----|------|-----------|
| | | LUP | PD | SDM | ISDA | |
| 25 | Sulawesi Utara | 15 | 25 | 29 | 13 | 21 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 29 | 22 | 14 | 9 | 18 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 20 | 9 | 30 | 7 | 13 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 24 | 20 | 12 | 16 | 15 |
| 29 | Gorontalo | 30 | 33 | 6 | 30 | 32 |
| 30 | Sulawesi Barat | 26 | 27 | 4 | 34 | 29 |
| 31 | Maluku | 31 | 32 | 28 | 17 | 34 |
| 32 | Maluku Utara | 14 | 30 | 9 | 29 | 22 |
| 33 | Papua Barat | 32 | 17 | 8 | 28 | 25 |
| 34 | Papua | 34 | 19 | 16 | 19 | 27 |

Daya Saing Output

Faktor pembentuk daya saing *output* pembentuk daya saing daerah Provinsi di Indonesia terdiri dari empat variabel utama, yaitu produktivitas tenaga kerja (Juta Rp/Pekerja) (DSO1), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) % (DSO2), PDRB per kapita juta rupiah (DSO3), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (DSO4). Keempat variabel tersebut akan dibahas satu persatu.

Pertama adalah produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Produktivitas tenaga kerja menunjukkan adanya kaitan antara *output* (hasil kerja) dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. Produktivitas dapat diukur berdasar pendekatan nilai tambah, ataupun perbandingan antar nilai tambah dengan sumber yang terpakai (*resource used*) dapat menunjukkan tingkat produktivitas. Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu faktor ketenagakerjaan yang paling penting mengingat peranan produktivitas tenaga kerja yang tinggi dapat mendorong performa perusahaan semakin baik. Produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari sisi kemampuannya untuk menghasilkan suatu *output* secara efektif dan efisien. Tinggi rendahnya produktivitas sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan ketrampilan pekerja.

Apabila dilihat dari variabel produktivitas tenaga kerja, terlihat bahwa Provinsi Jambi memperoleh skor 0.917 dan menempati urutan ke-8

yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing tinggi”. Di Pulau Sumatera, terdapat dua provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas selain Provinsi Jambi, yaitu Provinsi Kepulauan Riau (peringkat ke-3) dan Riau (peringkat ke-4). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing perekonomian daerah kategori menengah adalah Provinsi Sumatera Utara (peringkat ke-11), Bangka Belitung (peringkat ke-13), Sumatera Selatan (peringkat ke-16), Sumatera Barat (peringkat ke-19), Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-23), dan Lampung (peringkat ke-24) . Sementara itu, Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah), yaitu Provinsi Bengkulu (peringkat ke-30). Secara nasional, Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama dalam daya saing produktivitas tenaga kerja dengan skor 3.975. Selanjutnya secara berurutan disusul oleh Provinsi n Timur, Kepulauan Riau, Riau, dan Kalimantan Utara. Di posisi terakhir ditempati oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan skor 0.300. Selain Nusa Tenggara Timur, Provinsi lainnya yang memiliki daya saing rendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Maluku, DI Yogyakarta, Bengkulu, Maluku Utara Gorontalo, Sulawesi Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat.

Pembentuk daya saing *output kedua* adalah tingkat kesempatan kerja. Tingkat kesempatan kerja adalah peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Berdasarkan variabel tingkat kesempatan kerja, terlihat bahwa Provinsi Jambi memperoleh skor 1.013 dan menempati urutan ke 11 yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing menengah”. Di Pulau Sumatera, terdapat dua provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas selain Provinsi Jambi, yaitu Provinsi Bengkulu (peringkat ke-8) dan Bangka Belitung (peringkat ke-9). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing perekonomian daerah kategori menengah selain Provinsi Jambi adalah Provinsi Lampung (peringkat ke-15), Sumatera Selatan (peringkat ke-17), Sumatera Barat (peringkat ke-22), dan Sumatera Utara (peringkat ke-23). Sementara itu, terdapat tiga Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah), yaitu Provinsi Kepulauan Riau (peringkat ke-30), Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-27), dan Riau (peringkat ke-25). Secara nasional, Provinsi Baku menempati urutan pertama dalam daya saing tingkat kesempatan kerja dengan skor 1.038. Selanjutnya secara

berurutan disusul oleh Provinsi DI Yogyakarta, Sulawesi barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara. Di posisi terakhir ditempati oleh Provinsi Maluku dengan skor 0.956. Selain Maluku, Provinsi lainnya yang memiliki daya saing rendah adalah Provinsi Banten, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Papua Barat, dan Riau.

Selanjut, Pembentuk daya saing *output ketiga* adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Juga merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. Bila daya saing diukur dengan variabel DRB per kapita, terlihat bahwa Provinsi Jambi memperoleh skor 0.961 dan menempati urutan ke 8 yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing tinggi”. Di Pulau Sumatera, terdapat tiga provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas selain Provinsi Jambi, yaitu Provinsi Kepulauan Riau (peringkat ke-3), Riau (peringkat ke-5), dan Bangka Belitung (peringkat ke-10). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing perekonomian daerah kategori menengah adalah Provinsi Sumatera Utara (peringkat ke-12, Sumatera Selatan (peringkat ke-13), Sumatera Barat (peringkat ke-21) dan Lampung (peringkat ke-23). Sementara itu, Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah), yaitu Provinsi Bengkulu (peringkat ke-29) dan Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-27). Secara nasional, Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama dalam daya saing PDRB per kapita dengan skor 3.816. Selanjutnya secara berurutan disusul oleh Provinsi Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Riau. Di posisi terakhir ditempati oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan skor 0.293. Selain Nusa Tenggara Timur, Provinsi lainnya yang memiliki daya saing rendah adalah Provinsi Maluku, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Bengkulu, Sulawesi Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Barat.

Keempat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik; tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *purcashing power parity index* (ppp).

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Berdasarkan daya saing *output* menggunakan variabel IPM, terlihat bahwa Provinsi Jambi memperoleh skor 1.003 dan menempati urutan ke 16 yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing menengah”. Di Pulau Sumatera, terdapat tiga provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas, yaitu Provinsi Riau (peringkat ke-4), Riau (peringkat ke-6), dan Sumatera Barat (peringkat ke-9). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing perekonomian daerah kategori menengah selain Provinsi Jambi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-11), Sumatera Utara (peringkat ke-12), Bangka Belitung (peringkat ke-17), Bengkulu (peringkat ke-18), Sumatera Selatan (peringkat ke-23), dan Lampung (peringkat ke-24). Sementara itu, tidak ada satu pun provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah). Secara nasional, Provinsi DKI Jakarta kembali menempati urutan pertama dalam daya saing IPM dengan skor 1.148. Selanjutnya secara berurutan disusul oleh Provinsi DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Bali. Di posisi terakhir ditempati oleh Provinsi Papua dengan skor 0.847. Selain Papua, Provinsi lainnya yang memiliki daya saing rendah adalah Provinsi Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah.

Keseluruhan variabel pembentuk daya saing *output* tersebut kemudian digabungkan untuk menentukan provinsi mana yang memiliki daya saing *output* tertinggi dan terendah. Pada Tabel 8.6 untuk Daya Saing *Output* Keseluruhan, Provinsi Jambi menempati posisi ke-8, berarti ini adalah bagian dari kelompok “daya saing tinggi”. Dengan skor standar 0.974. Dari semua variabel pembentuk daya saing *output*, variabel yang berkontribusi besar dalam daya saing *output* Provinsi Jambi adalah variabel produktivitas tenaga kerja dan PDRB per kapita. Untuk meningkatkan daya saing *output*-nya pemerintah daerah perlu meningkatkan skor daya saing *output*, terutama variabel tingkat kesempatan kerja, dan IPM.

Secara nasional, Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama dalam daya saing *output*. Selanjutnya secara berurutan disusul oleh Provinsi Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Riau. Di posisi terakhir ditempati oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur membutuhkan perbaikan dan peningkatan

produktivitas tenaga kerja, PDRB per kapita, dan IPM untuk skor daya saing *output*. Provinsi-provinsi lainnya masih memerlukan perbaikan daya saing adalah Provinsi Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat. Nanggroe Aceh Darussalam, dan Jawa Tengah.

Di Pulau Sumatera, terdapat tiga provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas selain Provinsi Jambi, yaitu Provinsi Kepulauan Riau (peringkat ke-3) Riau (peringkat ke-5), dan Bangka Belitung (peringkat ke-10). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing *output* kategori menengah, adalah Provinsi Sumatera Utara (peringkat ke-11), Sumatera Selatan (peringkat ke-16), Sumatera Barat (peringkat ke-20), dan Lampung (peringkat ke-23) . Sementara itu, terdapat dua Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah), yaitu Bengkulu (peringkat ke-28) dan Nanggroe Aceh Darussalam (peringkat ke-26).

Tabel 8.6 Tingkat Daya Saing *Output* Provinsi Secara Keseluruhan di Indonesia

| No. | Provinsi | Daya Saing Output | | | | DSO | Peringkat |
|-----|--------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | DSO1 | DSO2 | DSO3 | DSO4 | | |
| 1 | Nanggroe Aceh Darussalam | 0.634 | 0.985 | 0.582 | 1.012 | 0.803 | 26 |
| 2 | Sumatera Utara | 0.848 | 0.995 | 0.838 | 1.012 | 0.923 | 11 |
| 3 | Sumatera Barat | 0.735 | 0.995 | 0.717 | 1.021 | 0.867 | 20 |
| 4 | Riau | 1.922 | 0.988 | 1.799 | 1.029 | 1.434 | 5 |
| 5 | Jambi | 0.917 | 1.013 | 0.961 | 1.003 | 0.974 | 8 |
| 6 | Sumatera Selatan | 0.788 | 1.007 | 0.833 | 0.987 | 0.904 | 16 |
| 7 | Bengkulu | 0.500 | 1.014 | 0.536 | 1.003 | 0.763 | 28 |
| 8 | Lampung | 0.627 | 1.008 | 0.651 | 0.978 | 0.816 | 23 |
| 9 | Bangka Belitung | 0.828 | 1.014 | 0.870 | 1.003 | 0.929 | 10 |
| 10 | Kepulauan Riau | 2.115 | 0.978 | 2.046 | 1.067 | 1.552 | 3 |
| 11 | DKI. Jakarta | 3.975 | 0.978 | 3.816 | 1.148 | 2.479 | 1 |
| 12 | Jawa Barat | 0.723 | 0.967 | 0.686 | 1.013 | 0.847 | 22 |
| 13 | Jawa Tengah | 0.575 | 1.006 | 0.636 | 1.011 | 0.807 | 25 |
| 14 | D.I. Yogyakarta | 0.497 | 1.022 | 0.600 | 1.131 | 0.813 | 24 |
| 15 | Jawa Timur | 0.814 | 1.012 | 0.916 | 1.007 | 0.937 | 9 |

| No. | Provinsi | Daya Saing Output | | | | DSO | Peringkat |
|-----|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | DSO1 | DSO2 | DSO3 | DSO4 | | |
| 16 | Banten | 0.889 | 0.956 | 0.809 | 1.024 | 0.919 | 12 |
| 17 | Bali | 0.666 | 1.038 | 0.832 | 1.065 | 0.900 | 17 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 0.475 | 1.019 | 0.492 | 0.955 | 0.735 | 31 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 0.300 | 1.019 | 0.293 | 0.914 | 0.631 | 34 |
| 20 | Kalimantan Barat | 0.597 | 1.008 | 0.619 | 0.950 | 0.794 | 27 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0.799 | 1.009 | 0.838 | 1.001 | 0.912 | 14 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0.682 | 1.003 | 0.727 | 0.999 | 0.853 | 21 |
| 23 | Kalimantan Timur | 3.317 | 0.981 | 3.194 | 1.077 | 2.142 | 2 |
| 24 | Kalimantan Utara | 1.907 | 0.995 | 1.956 | 1.001 | 1.465 | 4 |
| 25 | Sulawesi Utara | 0.836 | 0.978 | 0.782 | 1.027 | 0.906 | 15 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 0.772 | 1.014 | 0.794 | 0.976 | 0.889 | 19 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 0.871 | 0.995 | 0.797 | 1.008 | 0.918 | 13 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 0.780 | 1.019 | 0.776 | 1.002 | 0.894 | 18 |
| 29 | Gorontalo | 0.522 | 1.009 | 0.520 | 0.961 | 0.753 | 30 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0.539 | 1.020 | 0.537 | 0.922 | 0.755 | 29 |
| 31 | Maluku | 0.477 | 0.956 | 0.390 | 0.978 | 0.700 | 33 |
| 32 | Maluku Utara | 0.514 | 0.998 | 0.463 | 0.963 | 0.734 | 32 |
| 33 | Papua Barat | 1.583 | 0.985 | 1.560 | 0.903 | 1.258 | 6 |
| 34 | Papua | 0.976 | 1.016 | 1.132 | 0.847 | 0.993 | 7 |

Daya Saing Input Output

Daya saing ekonomi suatu daerah merupakan topik yang menarik untuk dicermati karena globalisasi mengakibatkan persaingan dalam memperebutkan faktor-faktor produksi semakin meningkat tajam dan tidak lagi dibatasi oleh batas geografis. Provinsi Jambi sebagai daerah bagian di Indonesia mengikuti kecenderungan daya saing daerah yang berlaku. Pada Tabel 8.7 untuk daya saing *input output* keseluruhan, Provinsi Jambi menempati posisi ke-13, berarti ini adalah bagian dari kelompok “daya saing menengah”.

Di Pulau Sumatera, terdapat tiga provinsi yang menempati posisi aman pada peringkat 10 teratas untuk daya saing *input output* secara keseluruhan, yaitu Provinsi Sumatera Utara (peringkat ke-5) Kepulauan Riau (peringkat ke-6), dan Riau (peringkat ke-10). Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing *output* kategori menengah, selain Provinsi Jambi adalah Provinsi Bangka Belitung (peringkat ke-11), dan Sumatera Selatan (peringkat ke-14). Sementara itu, terdapat dua Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki daya saing rendah (10 provinsi peringkat terendah), yaitu Bengkulu (peringkat ke-30), Sumatera Barat (peringkat ke-26), dan Lampung (peringkat ke-25).

Di tingkat nasional, Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama dalam daya saing *input output* secara keseluruhan. Selanjutnya secara berurutan disusul oleh Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Banten, dan Sumatera Utara. Di posisi terakhir ditempati oleh Provinsi Maluku. Provinsi-provinsi lainnya masih memerlukan perbaikan daya saing adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Bengkulu, Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Lampung.

Tabel 8.7 Tingkat Daya Saing *Input Output* Provinsi Secara Keseluruhan di Indonesia

| Provinsi | Peringkat Daya Saing | | |
|-------------------|----------------------|--------|-------|
| | Input | Output | Total |
| DKI. Jakarta | 6 | 1 | 1 |
| Jawa Timur | 2 | 9 | 2 |
| Kalimantan Timur | 9 | 2 | 3 |
| Banten | 4 | 12 | 4 |
| Sumatera Utara | 7 | 11 | 5 |
| Kepulauan Riau | 17 | 3 | 6 |
| Bali | 5 | 17 | 7 |
| Jawa Barat | 1 | 22 | 8 |
| Kalimantan Tengah | 10 | 14 | 9 |
| Riau | 20 | 5 | 10 |
| Bangka Belitung | 16 | 10 | 11 |
| Sulawesi Selatan | 13 | 13 | 12 |
| Jambi | 19 | 8 | 13 |

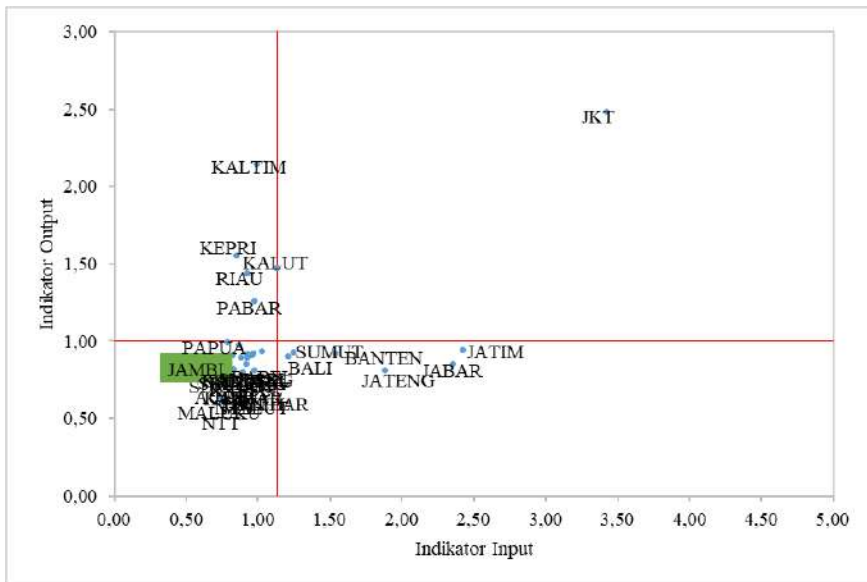
| Provinsi | Peringkat Daya Saing | | |
|--------------------------|----------------------|--------|-------|
| | Input | Output | Total |
| Sumatera Selatan | 12 | 16 | 14 |
| Jawa Tengah | 3 | 25 | 15 |
| Kalimantan Selatan | 8 | 21 | 16 |
| Kalimantan Utara | 26 | 4 | 17 |
| Papua Barat | 25 | 6 | 18 |
| Sulawesi Tenggara | 15 | 18 | 19 |
| Papua | 27 | 7 | 20 |
| D.I. Yogyakarta | 11 | 24 | 21 |
| Sulawesi Utara | 21 | 15 | 22 |
| Sulawesi Tengah | 18 | 19 | 23 |
| Kalimantan Barat | 14 | 27 | 24 |
| Lampung | 24 | 23 | 25 |
| Sumatera Barat | 28 | 20 | 26 |
| Nusa Tenggara Barat | 23 | 31 | 27 |
| Maluku Utara | 22 | 32 | 28 |
| Nanggroe Aceh Darussalam | 31 | 26 | 29 |
| Bengkulu | 30 | 28 | 30 |
| Sulawesi Barat | 29 | 29 | 31 |
| Gorontalo | 32 | 30 | 32 |
| Nusa Tenggara Timur | 33 | 34 | 33 |
| Maluku | 34 | 33 | 34 |

Gambaran daya saing provinsi di Indonesia merupakan representasi dari kinerja indikator-indikator pembentuk daya saing tersebut, semakin baik kinerja indikator-indikator tersebut maka semakin tinggi pula daya saing daerah suatu provinsi, dan adapun juga sebaliknya.

Dalam penghitungannya, skor daya saing tiap provinsi di Indonesia, dibandingkan dengan rata-rata skor *input* (rata-rata skor indikator *input*, 1.1346) dan *output* (rata-rata skor indikator *output*, 1.0000) dari keseluruhan skor daya saing provinsi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan Provinsi Jambi berada pada kuadran III menunjukkan daerah yang memiliki skor *input* dan *output* di bawah rata-rata dan memiliki kemampuan daya saing rendah.

Pemetaan daya saing provinsi di Indonesia dilakukan dengan menentukan klasifikasi provinsi berdasarkan kinerja indikator *input* dan indikator *output*. Semakin baik kinerja indikator-indikator tersebut, maka semakin tinggi pula daya saing provinsi di Indonesia. Daya saing provinsi dapat diklasifikasikan menjadi 4 kuadran dengan pembagian sebagai berikut:

- Kuadran I: Provinsi DKI. Jakarta merupakan provinsi yang mempunyai daya saing tinggi dengan didukung karakteristik unggul dari kinerja indikator *input* dan *output*-nya.
- Kuadran II: Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Bali merupakan provinsi yang mempunyai daya saing dengan karakteristik kinerja indikator *input*-nya lebih baik dibandingkan kinerja rata-rata, namun kinerja indikator *output*-nya masih di bawah kinerja rata-rata.
- Kuadran III: Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua merupakan provinsi yang mempunyai karakteristik kinerja indikator *input* dan *output*-nya lebih rendah dibandingkan kinerja rata-rata *input* dan *output* nasional.
- Kuadran IV: Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua Barat merupakan kelompok provinsi yang mempunyai kinerja indikator *output*-nya unggul di atas kinerja rata-rata *output* nasional, namun kinerja indikator *input*-nya masih rendah.



Gambar 8.1 Peta Daya Saing Wilayah Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indikator *Input-Output*

Daya Saing Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi

Daya Saing *Input*

Untuk menganalisis daya saing *input* Provinsi Jambi, maka akan dianalisis pada tataran kabupaten dan kota dengan menggunakan daya saing dari dua aspek, yaitu daya saing *input* dan daya saing *output*. Daya saing *input* dari sisi lingkungan usaha produktif terdiri dari 5 variabel, yaitu Angka Melek Huruf (AMH) % atau LUP1, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI % atau LUP2, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs % atau LUP3, Tingkat kemiskinan % atau LUP4, dan Kepadatan penduduk jiwa/km² atau LUP5.

Dilihat dari daya saing usaha produktif, Kota Jambi berada pada urutan pertama dan disusul dengan Kota Sungai Penuh. Seperti hasil pada analisis lain yang terkait, misalnya daya saing dari angka LQ dan Topologi Klassen, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan kabupaten dengan peringkat terendah dilihat dari aspek *input* lingkungan usaha produktif. Secara lengkap, daya saing ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.8 Tingkat Daya Saing *Input* Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Berdasarkan Variabel Lingkungan Usaha Produktif

| No. | Kabupaten/ Kota | Lingkungan Usaha Produktif | | | | | LUP | Peringkat |
|-----|-------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | LUP1 | LUP2 | LUP3 | LUP4 | LUP5 | | |
| 1 | Kerinci | 0.992 | 0.977 | 1.076 | 1.081 | 0.305 | 0.886 | 5 |
| 2 | Merangin | 1.003 | 1.013 | 0.964 | 0.854 | 0.146 | 0.796 | 8 |
| 3 | Sarolangun | 0.991 | 0.991 | 0.955 | 0.908 | 0.140 | 0.797 | 7 |
| 4 | Batang Hari | 1.004 | 1.008 | 0.981 | 0.780 | 0.137 | 0.782 | 9 |
| 5 | Muaro Jambi | 1.008 | 1.007 | 0.961 | 1.843 | 0.237 | 1.011 | 3 |
| 6 | Tanjung Jabung Timur | 0.966 | 1.008 | 1.032 | 0.640 | 0.120 | 0.753 | 11 |
| 7 | Tanjung Jabung Barat | 0.999 | 0.987 | 0.992 | 0.711 | 0.191 | 0.776 | 10 |
| 8 | Tebo | 0.999 | 1.002 | 0.904 | 1.186 | 0.158 | 0.850 | 6 |
| 9 | Bungo | 1.006 | 0.990 | 1.014 | 1.384 | 0.229 | 0.925 | 4 |
| 10 | Kota Jambi | 1.014 | 1.000 | 0.966 | 0.911 | 8.655 | 2.509 | 1 |
| 11 | Kota Sungai Penuh | 1.017 | 1.017 | 1.155 | 2.897 | 0.682 | 1.354 | 2 |

Untuk menganalisis daya saing *input* Provinsi Jambi, dari sisi perekonomian daerah terdiri dari 6 variabel, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Juta Rupiah atau PD1, Laju Pertumbuhan PDRB atau PD2, Realisasi PMDN Juta Rp atau PD3, Realisasi PMA (000) USD atau PD4, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ribu Rp atau PD5, dan Realisasi Pajak Daerah Ribu Rp atau PD6.

Dilihat dari dengan menggunakan indikator perekonomian daerah, seperti hal nya lingkungan usaha produktif, Kota Jambi berada pada urutan pertama dan disusul dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Sarolangun. Dengan indikator ini, Kota Sungai Penuh justru berada pada peringkat terbawah bersama Kabupaten Kerinci. Secara lengkap, daya saing ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.9 Tingkat Daya Saing *Input* Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah

| No. | Kabupaten/ Kota | Perekonomian Daerah | | | | | | PD | Peringkat |
|-----|----------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | PD1 | PD2 | PD3 | PD4 | PD5 | PD6 | | |
| 1 | Kerinci | 0.407 | 1.295 | 0.078 | 0.000 | 0.756 | 0.323 | 0.477 | 10 |
| 2 | Merangin | 0.633 | 1.201 | 0.261 | 0.193 | 0.886 | 0.556 | 0.622 | 7 |
| 3 | Sarolangun | 0.699 | 0.824 | 0.177 | 6.289 | 0.768 | 0.323 | 1.513 | 3 |
| 4 | Batang Hari | 0.756 | 0.880 | 0.441 | 0.830 | 0.887 | 0.505 | 0.717 | 6 |
| 5 | Muaro Jambi | 1.041 | 1.050 | 0.726 | 0.654 | 0.598 | 0.711 | 0.797 | 5 |
| 6 | Tanjung Jabung Timur | 1.213 | 0.522 | 0.055 | 0.429 | 0.427 | 0.425 | 0.512 | 8 |
| 7 | Tanjung Jabung Barat | 1.957 | 0.607 | 7.961 | 0.728 | 0.920 | 0.748 | 2.153 | 2 |
| 8 | Tebo | 0.652 | 1.040 | 0.084 | 0.089 | 0.756 | 0.439 | 0.510 | 9 |
| 9 | Bungo | 0.811 | 1.005 | 0.749 | 1.115 | 1.301 | 0.838 | 0.970 | 4 |
| 10 | Kota Jambi | 2.537 | 1.317 | 0.468 | 0.653 | 3.267 | 5.762 | 2.334 | 1 |
| 11 | Kota Sungai Penuh | 0.294 | 1.259 | 0.000 | 0.020 | 0.434 | 0.370 | 0.396 | 11 |

Analisis daya saing *input* berikutnya adalah dari sisi sumber daya manusia. Adapun indikatornya terdiri dari Rasio ketergantungan (SDM1), Jumlah penduduk yang bekerja (SDM2), Jumlah penduduk yang menganggur (SDM3), Jumlah angkatan kerja (SDM4), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (SDM5). Dari hasil pemeringkatan, Kota Jambi tetap menjadi peringkat pertama dalam kelompok daya saing ini.

Tabel 8.10 Tingkat Daya Saing *Input* Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Berdasarkan Variabel Sumber Daya Manusia

| No. | Kabupaten/ Kota | Sumber Daya Manusia | | | | | SDM | Peringkat |
|-----|----------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | SDM1 | SDM2 | SDM3 | SDM4 | SDM5 | | |
| 1 | Kerinci | 1.041 | 0.800 | 1.494 | 0.795 | 1.020 | 1.030 | 8 |
| 2 | Merangin | 0.988 | 1.200 | 0.785 | 1.203 | 1.026 | 1.040 | 7 |
| 3 | Sarolangun | 0.894 | 0.929 | 1.882 | 0.913 | 1.029 | 1.130 | 5 |
| 4 | Batang Hari | 1.012 | 0.792 | 1.376 | 0.789 | 0.946 | 0.983 | 10 |
| 5 | Muaro Jambi | 1.053 | 1.198 | 0.591 | 1.217 | 0.915 | 0.995 | 9 |
| 6 | Tanjung Jabung Timur | 0.982 | 0.790 | 2.111 | 0.777 | 1.116 | 1.155 | 4 |

| No. | Kabupaten/ Kota | Sumber Daya Manusia | | | | | SDM | Peringkat |
|-----|----------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | SDM1 | SDM2 | SDM3 | SDM4 | SDM5 | | |
| 7 | Tanjung Jabung Barat | 0.978 | 1.041 | 1.222 | 1.032 | 1.032 | 1.061 | 6 |
| 8 | Tebo | 0.978 | 1.130 | 1.764 | 1.108 | 1.037 | 1.203 | 2 |
| 9 | Bungo | 0.964 | 1.065 | 0.736 | 1.076 | 0.968 | 0.962 | 11 |
| 10 | Kota Jambi | 1.156 | 1.780 | 0.386 | 1.812 | 0.941 | 1.215 | 1 |
| 11 | Kota Sungai Penuh | 0.996 | 0.277 | 3.371 | 0.278 | 0.970 | 1.178 | 3 |

Dari daya saing infrastruktur dan sumber daya alam yang terdiri dari Panjang Jalan Raya km (ISDA1), Kualitas Jalan Raya % (ISDA2), Cakupan Pelayanan Perusahaan Air Bersih % (ISDA3), Persentase Rumah Tangga Yang menggunakan Listrik PLN (ISDA4), Persentase penduduk 5+ Memilik/Menguasai Telepon Selular (ISDA5), Persentase penduduk 5+ menggunakan internet (ISDA6), Persentase Penduduk 5+ Penggunaan Komputer (ISDA7), dan Persentase Rumah Tangga Memilik Akses Air Minum bersumber dari Leding Meteran (ISDA8).

Dengan menggunakan indikator infrastruktur dan sumber daya alam, Kota Sungai Penuh berada pada peringkat pertama dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada peringkat terbawah. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.11 Tingkat Daya Saing *Input* Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Berdasarkan Variabel Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

| No. | Kabupaten/ Kota | Infrastruktur dan Sumber Daya Alam | | | | | | | | ISDA | Peringkat |
|-----|----------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | ISDA1 | ISDA2 | ISDA3 | ISDA4 | ISDA5 | ISDA6 | ISDA7 | ISDA8 | | |
| 1 | Kerinci | 0.973 | 1.047 | 1.311 | 1.075 | 0.994 | 0.937 | 1.148 | 3.328 | 1.352 | 3 |
| 2 | Mera- ngin | 1.333 | 1.072 | 0.656 | 0.995 | 0.906 | 0.839 | 0.922 | 0.185 | 0.863 | 8 |
| 3 | Saro- langun | 1.446 | 0.971 | 1.311 | 0.981 | 0.946 | 0.738 | 0.674 | 0.251 | 0.915 | 6 |
| 4 | Batang Hari | 1.604 | 0.838 | 1.311 | 1.013 | 0.909 | 0.946 | 0.834 | 0.402 | 0.982 | 4 |
| 5 | Muaro Jambi | 1.079 | 1.078 | 0.590 | 1.082 | 1.045 | 0.942 | 0.878 | 0.701 | 0.924 | 5 |
| 6 | Tanjung Jabung Timur | 0.815 | 0.917 | 1.075 | 0.716 | 0.968 | 0.756 | 0.471 | 0.000 | 0.715 | 11 |
| 7 | Tanjung Jabung Barat | 1.020 | 0.945 | 0.603 | 0.839 | 1.009 | 0.801 | 0.580 | 0.184 | 0.748 | 10 |

| No. | Kabupaten/ Kota | Infrastruktur dan Sumber Daya Alam | | | | | | | | ISDA | Peringkat |
|-----|--------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | ISDA1 | ISDA2 | ISDA3 | ISDA4 | ISDA5 | ISDA6 | ISDA7 | ISDA8 | | |
| 8 | Tebo | 1.193 | 0.897 | 0.983 | 1.050 | 0.898 | 0.760 | 0.665 | 0.413 | 0.857 | 9 |
| 9 | Bungo | 1.012 | 0.990 | 0.774 | 1.015 | 0.932 | 0.917 | 0.883 | 0.434 | 0.870 | 7 |
| 10 | Kota Jambi | 0.476 | 1.143 | 1.075 | 1.118 | 1.311 | 2.000 | 2.294 | 1.517 | 1.367 | 2 |
| 11 | Kota Sungai Penuh | 0.050 | 1.102 | 1.311 | 1.116 | 1.083 | 1.363 | 1.651 | 3.587 | 1.408 | 1 |

Dari empat aspek daya saing *input* yang telah dianalisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kabupaten dan kota menurut peringkat daya saing *input* adalah sebagai berikut:

Tabel 8.12 Tingkat Daya Saing *Input* Kabupaten/Kota Secara Keseluruhan di Provinsi Jambi

| No. | Kabupaten/ Kota | Peringkat Daya Saing Input | | | | Rata-Rata Daya Saing Input | Peringkat |
|-----|----------------------|----------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------|-----------|
| | | LUP | PD | SDM | ISDA | | |
| 1 | Kerinci | 0.886 | 0.477 | 1.030 | 1.352 | 0.936 | 5 |
| 2 | Merangin | 0.796 | 0.622 | 1.040 | 0.863 | 0.830 | 10 |
| 3 | Sarolangun | 0.797 | 1.513 | 1.130 | 0.915 | 1.089 | 3 |
| 4 | Batang Hari | 0.782 | 0.717 | 0.983 | 0.982 | 0.866 | 8 |
| 5 | Muaro Jambi | 1.011 | 0.797 | 0.995 | 0.924 | 0.932 | 6 |
| 6 | Tanjung Jabung Timur | 0.753 | 0.512 | 1.155 | 0.715 | 0.784 | 11 |
| 7 | Tanjung Jabung Barat | 0.776 | 2.153 | 1.061 | 0.748 | 1.184 | 2 |
| 8 | Tebo | 0.850 | 0.510 | 1.203 | 0.857 | 0.855 | 9 |
| 9 | Bungo | 0.925 | 0.970 | 0.962 | 0.870 | 0.932 | 7 |
| 10 | Kota Jambi | 2.509 | 2.334 | 1.215 | 1.367 | 1.856 | 1 |
| 11 | Kota Sungai Penuh | 1.354 | 0.396 | 1.178 | 1.408 | 1.084 | 4 |

Kota Jambi yang unggul pada 3 kriteria *input* pada analisis sebelumnya, secara keseluruhan tetap menempati peringkat pertama dari daya saing *input*, disusul dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Sarolangun.

Daya Saing Output

Daya saing selain dilihat dari indikator *input* juga dilakukan berdasarkan indikator *output*. Indikator *output* yang dilakukan pengukuran adalah:

- DSO1 : Produktivitas tenaga kerja
- DSO2 : Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
- DSO3 : PDRB per kapita
- DSO4 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa secara rata-rata bobot tertinggi (peringkat 1) adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan nilai sebesar 1.442. Komponen tertinggi adalah Produktivitas tenaga kerja (1.906) dan PDRB per kapita yaitu sebesar 1.898. 3 Daerah tertinggi selanjutnya berturut-turut adalah Tanjung Jabung Timur; Kota Sungai Penuh; dan Kota Jambi, masing-masing memiliki nilai 1.283; 1.096; dan 1.084. Sedangkan 3 daerah terendah adalah Kabupaten Merangin dengan nilai 0.785 (peringkat 11), Kabupaten Kerinci sebesar 0.797 (peringkat 10), dan Kabupaten Tebo sebesar 0.812 (peringkat 9). Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 8.13 Tingkat Daya Saing *Output* Kabupaten/Kota Secara Keseluruhan di Provinsi Jambi

| No. | Kabupaten/ Kota | Daya Saing Output | | | | DSO | Peringkat |
|-----|----------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | DSO1 | DSO2 | DSO3 | DSO4 | | |
| 1 | Kerinci | 0.516 | 1.004 | 0.653 | 1.013 | 0.797 | 10 |
| 2 | Merangin | 0.535 | 0.996 | 0.623 | 0.988 | 0.785 | 11 |
| 3 | Sarolangun | 0.762 | 1.015 | 0.824 | 0.998 | 0.900 | 7 |
| 4 | Batang Hari | 0.968 | 1.001 | 0.967 | 0.997 | 0.983 | 5 |
| 5 | Muaro Jambi | 0.880 | 0.982 | 0.890 | 0.981 | 0.934 | 6 |
| 6 | Tanjung Jabung Timur | 1.556 | 1.014 | 1.657 | 0.905 | 1.283 | 2 |
| 7 | Tanjung Jabung Barat | 1.906 | 1.006 | 1.898 | 0.957 | 1.442 | 1 |
| 8 | Tebo | 0.585 | 1.018 | 0.660 | 0.986 | 0.812 | 9 |
| 9 | Bungo | 0.771 | 0.988 | 0.780 | 0.998 | 0.884 | 8 |
| 10 | Kota Jambi | 1.444 | 0.981 | 0.801 | 1.110 | 1.084 | 4 |
| 11 | Kota Sungai Penuh | 1.077 | 0.995 | 1.246 | 1.067 | 1.096 | 3 |

Daya Saing *Input Output*

Jika diakumulasikan antara indikator *input* dan *output* menunjukkan bahwa empat daerah yang memiliki kinerja tertinggi berturut-turut adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Sarolangun. Sedangkan empat daerah dengan kinerja terendah adalah Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Kerinci. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 8.14 Tingkat Daya Saing *Input Output* Kabupaten/Kota Secara Keseluruhan di Provinsi Jambi

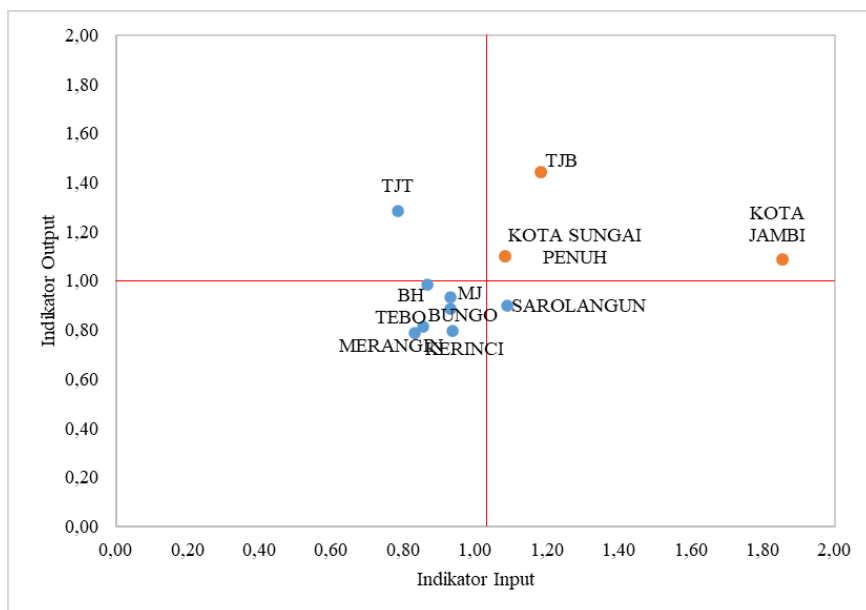
| Kab/Kota | Peringkat Daya Saing | | |
|----------------------|----------------------|--------|-------|
| | Input | Output | Total |
| Tanjung Jabung Barat | 2 | 1 | 1 |
| Kota Jambi | 1 | 4 | 2 |
| Kota Sungai Penuh | 4 | 3 | 3 |
| Sarolangun | 3 | 7 | 4 |
| Muaro Jambi | 6 | 6 | 5 |
| Batang Hari | 8 | 5 | 6 |
| Tanjung Jabung Timur | 11 | 2 | 7 |
| Kerinci | 5 | 10 | 8 |
| Bungo | 7 | 8 | 9 |
| Tebo | 9 | 9 | 10 |
| Merangin | 10 | 11 | 11 |

Selanjutnya jika dilakukan pemetaan secara kuadran menunjukkan bahwa daerah yang berada pada:

- Kuadran I: Kabupaten Tanjung Jabung Barat; Kota Jambi; dan Kota Sungai Penuh. Kabupaten/Kota tersebut mempunyai daya saing tinggi dengan didukung karakteristik unggul dari kinerja indikator *input* dan *output*-nya.
- Kuadran II: Kabupaten Sarolangun. Merupakan daerah yang mempunyai daya saing dengan karakteristik kinerja indikator *input*-nya lebih baik dibandingkan kinerja rata-rata, namun kinerja indikator *output*-nya masih di bawah kinerja rata-rata.
- Kuadran III: Kabupaten Muaro Jambi; Kabupaten Batang Hari; Kabupaten Kerinci; Kabupaten Bungo; Kabupaten Tebo; dan

Kabupaten Merangin. Merupakan daerah yang mempunyai karakteristik kinerja indikator *input* dan *output*-nya lebih rendah dibandingkan kinerja rata-rata *input* dan *output*.

- Kuadran IV: Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daerah ini mempunyai kinerja indikator *output*-nya unggul di atas kinerja rata-rata *output*, namun kinerja indikator *input*-nya masih rendah.



Gambar 8.2 Peta Daya Saing Wilayah Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Berdasarkan Indikator *Input-Output*



9. POTENSI EKONOMI PROVINSI JAMBI

Adanya otonomi daerah menuntut setiap daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki daerahnya. Dengan demikian, setiap daerah harus benar-benar mengetahui potensi ekonomi yang dimiliki agar pembangunan ekonomi daerah tersebut berjalan dengan optimal. Untuk mengidentifikasi potensi daerah, terutama sektor unggulan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat analisis, di antaranya *Location Quotient* (LQ), Tipologi Klassen, dan *Shift Share* (SS). Adapun hasil analisis ketiga alat tersebut diuraikan sebagai berikut:

Analisis *Location Quotient* (LQ)

Untuk mengetahui sektor unggulan di Provinsi Jambi, digunakan alat analisis *Location Quotient* (LQ). LQ merupakan alat analisis untuk mengetahui ada tidaknya spesialisasi suatu wilayah untuk sektor (industri) tertentu. Teknik LQ ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang dikaji dengan kemampuan yang sama pada daerah yang lebih luas. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien LQ dapat menggunakan satuan jumlah tenaga kerja, atau hasil produksi, atau satuan lainnya yang dapat digunakan sebagai kriteria. Analisis LQ

dimaksudkan untuk melihat sektor yang menjadi sektor basis dan sektor bukan basis, sehingga daerah dapat melihat keunggulan sektor yang dapat dikembangkan untuk mendorong perekonomian di daerah tersebut.

LQ kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dilakukan dengan cara membandingkan PDRB sektoral yang ada di masing-masing kabupaten dan kota terhadap Provinsi Jambi. Adapun pembagian kode untuk masing-masing sektor yang akan dianalisis sebagai berikut:

- A. Pertanian, Kehutanan, & Perikanan
- B. Pertambangan & Penggalian
- C. Industri Pengolahan
- D. Pengadaan Listrik dan Gas
- E. Pengadaan Air
- F. Konstruksi
- G. Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- H. Transportasi & Pergudangan
- I. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum
- J. Informasi dan Komunikasi
- K. Jasa Keuangan
- L. Real Estate
- M,N Jasa Perusahaan
- O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
- P Jasa Pendidikan
- Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- R,S,T Jasa Lainnya

Tabel 9.1 Hasil Perhitungan Nilai *Location Quotient* Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2010-2017

| Klasifikasi | Kerinci | Sarolangun | Muaro Jambi | Merangin | Batanghari | Kota Sungai Penuh | Kota Jambi | Tebo | Tanjung Jabung Barat | Tanjung Jabung Timur | Bungo |
|-------------|---------|------------|-------------|----------|------------|-------------------|------------|------|----------------------|----------------------|-------|
| A | 2,00 | 1,10 | 1,57 | 1,93 | 1,54 | 0,25 | 0,05 | 1,91 | 0,79 | 0,53 | 0,75 |
| B | 0,06 | 1,13 | 0,54 | 0,10 | 0,56 | 0,03 | 0,19 | 0,41 | 1,68 | 2,43 | 1,04 |
| C | 0,27 | 0,36 | 1,52 | 0,69 | 1,13 | 0,06 | 1,10 | 0,59 | 1,79 | 0,61 | 0,59 |
| D | 0,80 | 1,05 | 0,73 | 1,17 | 0,95 | 0,52 | 3,62 | 1,36 | 0,25 | 0,23 | 0,81 |
| E | 2,90 | 0,94 | 0,71 | 1,35 | 0,60 | 2,78 | 1,97 | 0,31 | 0,39 | 0,38 | 1,54 |
| F | 1,00 | 1,83 | 0,77 | 1,04 | 0,98 | 2,01 | 1,38 | 1,05 | 0,52 | 0,52 | 1,59 |
| G | 1,05 | 0,62 | 0,54 | 1,14 | 0,81 | 2,75 | 2,76 | 0,91 | 0,32 | 0,47 | 1,30 |
| H | 0,84 | 0,60 | 1,15 | 0,58 | 0,49 | 1,24 | 4,10 | 0,47 | 0,23 | 0,30 | 0,75 |
| I | 0,86 | 1,82 | 0,60 | 1,82 | 0,33 | 1,13 | 2,16 | 0,34 | 0,39 | 0,25 | 2,33 |
| J | 1,93 | 1,02 | 0,71 | 1,27 | 0,81 | 4,29 | 1,52 | 1,07 | 0,44 | 0,31 | 1,28 |
| K | 0,48 | 1,06 | 0,77 | 0,68 | 0,83 | 2,23 | 2,66 | 0,65 | 0,44 | 0,28 | 1,72 |
| L | 1,32 | 0,90 | 0,84 | 1,60 | 0,86 | 2,05 | 1,79 | 1,35 | 0,41 | 0,31 | 1,62 |
| M,N | 0,04 | 0,22 | 1,15 | 0,14 | 0,07 | 5,76 | 2,71 | 0,06 | 1,03 | 0,88 | 0,20 |
| O | 1,79 | 1,08 | 0,91 | 1,05 | 1,16 | 1,69 | 2,23 | 1,01 | 0,40 | 0,43 | 0,89 |
| P | 1,39 | 0,92 | 0,57 | 1,17 | 1,44 | 2,91 | 1,44 | 0,73 | 0,53 | 0,75 | 1,45 |
| Q | 1,54 | 1,14 | 0,89 | 1,24 | 1,24 | 2,43 | 2,30 | 0,83 | 0,39 | 0,34 | 0,57 |
| R,S,T,U | 1,64 | 1,49 | 1,40 | 1,41 | 1,13 | 2,45 | 0,81 | 2,02 | 0,53 | 0,24 | 0,65 |

Sumber: Hasil kalkulasi penulis

Dari penghitungan LQ tahun 2010 dan 2017 untuk masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jambi diperoleh sektor unggulan (ditunjukkan dengan nilai lebih dari satu).

Untuk Kabupaten Kerinci, ada dua sektor yang memiliki nilai LQ lebih dari 1 dan relatif lebih tinggi dari sektor lain, yaitu sektor pertanian, kehutanan & perikanan, dan sektor pengadaan air. Selain kedua sektor tersebut, beberapa sektor yang menjadi sektor basis adalah sektor konstruksi, sektor perdagangan & eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, sektor informasi dan komunikasi, sektor *real estate*, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor jasa lainnya. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan wajar menjadi sektor unggulan di Kabupaten Kerinci karena sektor ini memberikan kontribusi besar pada struktur ekonomi hampir sepanjang tahun kajian.

Tidak seperti Kabupaten Kerinci, di Kabupaten Sarolangun, sektor yang menjadi sektor basis tidak ada yang nilainya di atas 2, semua sektor basis memiliki nilai di atas 1 dan di bawah 2. Sektor yang memiliki nilai basis tertinggi adalah sektor konstruksi, sektor penyediaan akomodasi penyediaan makanan dan minuman, dan sektor jasa lainnya. Kabupaten Muaro Bungo hanya memiliki 4 sektor basis, yaitu sektor pertanian, kehutanan, & perikanan, sektor industri pengolahan, dan sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor jasa lainnya. Sektor yang terendah nilai LQ-nya adalah sektor pertambangan & penggalian dan sektor jasa pendidikan.

Kabupaten Merangin merupakan kabupaten yang memiliki nilai non basis yang terendah yaitu untuk sektor pertambangan dan penggalian, sektor jasa perusahaan, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor industri pengolahan. Sektor basis tertinggi di Kabupaten Merangin berasal dari sektor pertanian, kehutanan, & perikanan dan sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman.

Sektor basis di Kabupaten Batanghari yaitu terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan, & perikanan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor jasa lainnya.

Kota Sungai Penuh memiliki sektor basis yang nilainya di atas lima yaitu sektor jasa perusahaan, sementara sektor lainnya yang termasuk

basis adalah sektor informasi dan komunikasi. Untuk Tanjungjabung Barat maupun Tanjungjabung Timur, masih minim sektor yang menjadi sektor basis. Kabupaten Tanjungjabung Timur, hanya sektor pertambangan dan penggalian yang menjadi sektor basis. Fundamental ekonomi yang bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian sangat rentan terhadap perubahan eksternal yang terjadi, misalnya terjadinya fluktuasi harga minyak dunia yang dapat mengakibatkan terguncangnya perekonomian daerah yang bertumpu pada hasil bumi berupa minyak dan gas.

Analisis Tipologi Klassen

Perhitungan Tipologi Klassen didasarkan pada dua hal yaitu proporsi *output* sektor-sektor ekonomi terhadap pembentukan total produk domestik bruto dan pertumbuhan dari masing-masing sektor. Dari perhitungan proporsi dan pertumbuhan tersebut sektor dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Prima (P)
2. Berkembang (B)
3. Potensial (PO)
4. Relatif Terbelakang (RT)

Jika suatu sektor tergolong dalam kelompok prima, tentu perlu dipertahankan dan ditingkatkan, artinya daerah tersebut mempunyai kemampuan dalam pengelolaan sektor tersebut. Tetapi jika suatu sektor masuk dalam kelompok relatif terbelakang tentu pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan sektor tersebut dengan menganalisis berbagai faktor yang tersedia. Dari hasil perhitungan nilai Tipologi Klassen untuk tiap-tiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, diperoleh nilai sebagai berikut:

Tabel 9.2 Hasil Perhitungan Nilai Tipologi Kelas Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2017

| Klasifikasi | Kerinci | Sarolangun | Muaro Jambi | Merangin | Batang-hari | Sungai Penuh | Kota Jambi | Tebo | Tanjung Jabung Barat | Tanjung Jabung Timur | Bungo |
|-------------|---------|------------|-------------|----------|-------------|--------------|------------|------|----------------------|----------------------|-------|
| A | PO | PO | PR | PO | PO | PO | RT | PR | PR | PO | PO |
| B | B | PO | PO | RT | PR | RT | RT | PR | PO | PO | PO |
| C | B | RT | PR | PR | PO | B | PO | PO | PO | PO | PR |
| D | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| E | RT | RT | RT | RT | RT | RT | RT | RT | RT | RT | RT |
| F | PR | PO | B | PR | PR | PR | PR | PR | B | B | PR |
| G | PR | RT | B | PR | PR | PR | PR | PR | B | B | PR |
| H | B | RT | RT | B | RT | RT | PR | B | B | RT | B |
| I | B | RT | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| J | PR | RT | B | B | B | PR | RT | B | B | B | B |
| K | B | RT | B | B | B | B | PR | B | B | B | B |
| L | RT | RT | RT | RT | RT | RT | RT | RT | RT | RT | RT |
| M,N | RT | RT | RT | RT | RT | PO | RT | RT | RT | RT | RT |
| O | PO | RT | B | B | B | B | PO | RT | B | RT | RT |
| P | RT | RT | RT | RT | RT | PO | RT | RT | RT | RT | RT |
| Q | B | RT | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| R,S,T,U | RT | RT | RT | RT | RT | RT | RT | RT | RT | RT | RT |

Sumber: Hasil kalkulasi penulis

Secara umum, sebagian besar kabupaten di Provinsi Jambi memiliki keunggulan di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Untuk sektor ini, Kabupaten Muaro Jambi merupakan kabupaten dengan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang tergolong prima. Dapat dipahami untuk beberapa kabupaten dan kota yang tidak termasuk unggul di sektor ini adalah Kota Jambi, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selain itu, ada catatan penting bagi perekonomian Provinsi Jambi dalam hal daya saing sektoral di masing-masing kabupaten dan Kota. Ada tiga sektor yang masih tergolong sektor relatif terbelakang hampir di seluruh kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jambi. Sektor tersebut adalah sektor pengadaan air, sektor *real estate*, dan sektor jasa pendidikan. Perlu upaya secara menyeluruh dan merata di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi untuk mendorong perkembangan sektor ini agar memiliki kontribusi dan daya saing yang pada akhirnya dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.

Ada tiga sektor yang tergolong sektor prima di Kabupaten Kerinci, yaitu sektor Konstruksi, sektor Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta sektor Informasi dan Komunikasi. Perkembangan sektor-sektor prima ini dapat dipahami karena di Kabupaten Kerinci dalam 3 tahun terakhir ini, kontribusi sektor tersebut dominan dalam struktur perekonomian daerah. Selain itu, pesatnya pembangunan di Kabupaten Kerinci, baik secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh pada perkembangan sektor konstruksi, sektor reparasi mobil dan sepeda motor, serta pastinya kebutuhan akan informasi dan komunikasi.

Di Kabupaten Sarolangun, meskipun tidak ada sektor yang tergolong pada sektor prima, tetapi ada tiga sektor yang tergolong potensial untuk dikembangkan yaitu sektor pertanian, kehutanan, & perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor konstruksi. Hal terpenting yang perlu diperhatikan pada perekonomian Kabupaten Sarolangun ini adalah bahwa meskipun terdapat 3 sektor yang potensial dan satu sektor berkembang, akan tetapi hampir seluruh sektor lainnya yang berjumlah 14 sektor masih tergolong sektor relatif tertinggal. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian dan strategi pengembangan agar Kabupaten Sarolangun tidak tertinggal dengan kabupaten dan kota lain di Provinsi Jambi.

Di Kabupaten Muaro Jambi, hanya ada dua sektor yang tergolong pada sektor prima, yaitu sektor pertanian, kehutanan, & perikanan dan sektor industri pengolahan. Sektor lain masih tergolong sektor berkembang dan sektor relatif tertinggal. Sektor potensial hanya ada satu, tetapi sektor tersebut adalah sektor pertambangan dan penggalian sehingga tidak bisa dijadikan tumpuan dalam penentuan daya saing daerah.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan kabupaten yang tidak memiliki satu pun sektor yang dapat digolongkan sebagai sektor prima, dan hanya memiliki 3 sektor potensial, yaitu sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian.

Analisis *Shift Share* (SS)

Analisis *shift share* menganalisis berbagai perubahan indikator kegiatan ekonomi. Hasil analisis dapat menunjukkan perkembangan suatu sektor di suatu wilayah jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya, apakah perkembangan dengan cepat atau lambat. Hasil analisis ini juga dapat menunjukkan bagaimana perkembangan suatu wilayah bila dibandingkan dengan wilayah lain. Tujuan analisis *shift share* adalah untuk menentukan produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkan dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional). Hasil analisis *shift share* dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kuadran, yaitu:

1. Kuadran I menginterpretasikan bahwa sektor perekonomian di suatu wilayah memiliki laju pertumbuhan yang cepat dan mampu bersaing dengan sektor perekonomian dari wilayah lain, dimana wilayah yang bersangkutan merupakan wilayah yang *progressive* (maju).
2. Kuadran II menginterpretasikan bahwa sektor perekonomian di suatu wilayah memiliki laju pertumbuhan yang cepat tetapi tidak mampu bersaing dengan sektor perekonomian dari wilayah lain.
3. Kuadran III menginterpretasikan bahwa sektor perekonomian di suatu wilayah memiliki laju pertumbuhan yang lambat dan tidak mampu bersaing dengan sektor perekonomian dari wilayah lain.
4. Kuadran IV menginterpretasikan bahwa sektor perekonomian di suatu wilayah memiliki laju pertumbuhan yang lambat tetapi sektor

tersebut mampu bersaing dengan sektor perekonomian dari wilayah lain.

5. Pada kuadran II dan IV terdapat garis diagonal yang memotong kedua kuadran tersebut. Bagian atas garis diagonal mengindikasikan bahwa suatu wilayah merupakan wilayah yang *progressive*, sedangkan di bawah garis berarti suatu wilayah merupakan wilayah yang pertumbuhannya lambat.

Berdasarkan hasil perhitungan *shift share* di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa sektor yang berada di kuadran 1 meliputi:

1. Kabupaten Kerinci, yaitu Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, Transportasi & Pergudangan.
2. Kabupaten Sarolangun, yaitu Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Kabupaten Muaro Jambi, Pertanian, Kehutanan, & Perikanan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
3. Kabupaten Merangin, yaitu Transportasi & Pergudangan, Penyediaan Akomodasi & Makan Minum, Pengadaan Listrik dan Gas
4. Kabupaten Batang Hari, yaitu Penyediaan Akomodasi & Makan Minum
5. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Penyediaan Akomodasi & Makan Minum
6. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Pertanian, Kehutanan, & Perikanan, Pengadaan Listrik dan Gas, Informasi dan Komunikasi, Konstruksi
7. Kabupaten Tebo, yaitu Pertanian, Kehutanan, & Perikanan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
8. Kabupaten Bungo, yaitu Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Informasi dan Komunikasi, Konstruksi, Transportasi & Pergudangan, Pertanian, Kehutanan, & Perikanan, Penyediaan Akomodasi & Makan Minum
9. Kota Jambi, yaitu Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi & Pergudangan, Penyediaan Akomodasi & Makan Minum, Konstruksi, Jasa Keuangan, Pengadaan Listrik dan Gas, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

10. Kota Sungai Penuh, yaitu Informasi dan Komunikasi, Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa Keuangan.

Produk Unggulan Daerah Provinsi Jambi

Produk unggulan daerah Provinsi Jambi sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 599/Kep.Gub/Balitbangda/2013 tentang Penetapan Pengembangan Komoditi Unggulan Lokal Penguatan Sistem Inovasi Daerah yaitu:

Tabel 9.3 Produk Unggulan Daerah Provinsi Jambi

| | | |
|------------------|---|---|
| Karet | : | Kabupaten Merangin, Sarolangun dan Bungo Tebo |
| Kondisi saat ini | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Budidaya tanaman karet di Provinsi Jambi sejak dahulu kala (familier), sehingga pada waktu tertentu tanaman karet rakyat terbesar di Indonesia terdapat di Provinsi Jambi. 2. Budidaya ini terus berlanjut dan berkembang sehingga tumbuhlah perusahaan-perusahaan karet skala besar. 3. Pangsa pasar cukup menjanjikan, namun tingkat pengolahan di Provinsi Jambi belum dapat memberikan nilai tambah secara optimal karena produk yang dihasilkan dari seluruh kabupaten masih bersifat bahan baku (raw material), bahan setengah jadi dan belum disertai dengan tumbuhnya industri ikutan. |
| Sirsak | : | Kota Sungai Penuh |
| Kondisi saat ini | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Budidaya sirsak pada awalnya belum dikelola secara baik karena pada saat itu pasar masih sangat terbatas, namun akhir-akhir ini pasar telah berkembang sehingga permintaan akan sirsak menjadi menguat. 2. Atas dasar itu, kegiatan budidaya tanaman sirsak telah berkembang khususnya di daerah dataran tinggi seperti di Kota Sungai Penuh. |
| Kopi Exelsa | : | Kabupaten Tanjung Jabung Barat |
| Kondisi saat ini | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejak dahulu kala daerah penghasil kopi di Provinsi Jambi di didominasi oleh 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 2. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi serta terbukanya pasar, Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengkhususkan untuk mengembangkan Kopi Exelsa (pengembangan kopi arabika di daerah gambut). 3. Prospek pengembangan kegiatan ini cukup menjanjikan karena lahan memadai dan masyarakat sudah terbiasa dengan budidaya kopi. |
| Casiavera | : | Kabupaten Kerinci |

| | | |
|------------------|---|--|
| Kondisi saat ini | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejak dahulu masyarakat Kerinci telah lama membudidayakan tanaman casiavi (kulit/kayu manis) dan hasil dari kegiatan ini telah mempengaruhi pola dan tingkat kehidupan masyarakat Kerinci menjadi lebih berkembang. 2. Kendala yang dihadapi dalam menunjang kegiatan budidaya ini adalah semakin terbatasnya lahan dan waktu (periode) panen yang relatif panjang. 3. Kendala lain adalah tidak stabilnya harga dan diversifikasi produk olahan masih relatif terbatas |
| Olahan Ikan | : | Kabupaten Tanjung Jabung Timur |
| Kondisi saat ini | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejalan dengan potensi yang tersedia ada dua kabupaten yang berbatasan dengan laut atau berada di kawasan pantai yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 2. Dalam kegiatan pengolahan ikan kedua kabupaten ini tidak dapat dipisahkan karena saling menunjang. 3. Potensi laut dan sungai yang tinggi sangat mendukung kegiatan olahan ikan. Hal ini sangat didukung oleh permintaan pasar domestik dan luar negeri yang tinggi atas produk-produk olahan ikan. |
| Kelapa sawit | : | Kabupaten Muaro Jambi, Batang Hari, |
| Kondisi saat ini | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Budidaya tanaman sawit di Provinsi Jambi berkembang pesat sejak tahun 1990-an. 2. Budidaya ini terus berlanjut dan berkembang baik yang dikelola oleh masyarakat maupun oleh perusahaan skala besar. 3. Pangsa pasar cukup menjanjikan, namun tingkat pengolahan di Provinsi Jambi belum dapat memberikan nilai tambah secara optimal karena produk yang dihasilkan dari seluruh kabupaten masih bersifat bahan baku (raw mterial) dan bahan setengah jadi (crude palm oil) serta belum tumbuh industri ikutannya. |
| Batik | : | Kota Jambi |
| Kondisi saat ini | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Batik di Provinsi Jambi khususnya di Kota Jambi telah berkembang sejak dahulu kala, namun dalam pemasaran dan produknya masih sangat terbatas. 2. Peluang pasar yang masih terbatas karena Di samping karena saingan dari produk-produk provinsi lain juga dipengaruhi oleh bahan obat-obatan yang relatif mahal. 3. Akibatnya kegiatan ini relatif stagnant, namun sejak tahun 1990-an Pemerintah dan Kabupaten terus menggalakkan industri batik sebagai salah satu Produk Unggulan Daerah yang mampu bersaing di pasar domestik dan pasar global. |

Selanjutnya berdasarkan hasil kajian pembuatan peta potensi investasi Provinsi Jambi Tahun 2017 yang dilakukan oleh DPMPSTP Provinsi Jambi menunjukkan bahwa potensi Investasi di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Kota Jambi
 - a. Industri pengolahan seperti remiling karet, batu bata, *crumb rubber*.
 - b. Industri manufaktur yaitu industri perabot dan kelengkapan rumah tangga serta alat dapur dari kayu, bambu dan rotan.
 - c. Usaha perdagangan besar maupun kecil serta reparasi mobil dan sepeda motor.
 - d. Usaha dalam rangka meningkatkan infrastruktur dasar seperti air, listrik, telekomunikasi, dan jalan.
 - e. Usaha konstruksi baik kecil, menengah dan besar bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil.
 - f. Sektor transportasi dan pergudangan. Hal ini dikarenakan Kota Jambi merupakan sentra perdagangan sehingga diperlukan kemudahan dalam akses transportasi dan pergudangan;
 - g. Penyediaan akomodasi dan makan minum seperti perhotelan, restoran atau rumah makan dan tempat wisata.
 - h. *Real estate*.
2. Kabupaten Muaro Jambi
 - a. Pengembangan industri hilir karet yang perlu ditingkatkan agar nilai tambah produk karet dapat meningkat. Industri hilir karet antara lain:
 - 1). Industri ban untuk otomotif
 - 2). Industri *chemical rubber*
 - 3). Industri *crumb rubber*
 - 4). Industri barang jadi untuk keperluan industri, bahan dari karet untuk keperluan kemiliteran, alas kaki dan komponennya, serta penggunaan umum serta alat kesehatan dan laboratorium.
 - 5). Sentra-sentra industri berbahan dasar karet dan plastik.
 - b. Pengembangan industri hilir kelapa sawit.
 - 1). Hilirisasi Oleopangan (*oleofood complex*), yaitu minyak goreng sawit, margarin, vitamin A, vitamin E, *shortening*, *ice cream*, *creamer*, *cocoa butter/speciality fat* dan lain-lain.

- 2). Hilirisasi Oleokimia (*oleochemical complex*), yaitu produk biosurfaktan misalnya ragam produk detergen, sabun, shampo, biolubrikin (misalnya biopelumas) dan biomaterial (misalnya bioplastik).
 - 3). Hilirisasi Biofuel (*biofuel complex*), yaitu biodiesel, biogas, biopremium, bioavtur.
- c. Pengembangan industri pengolahan makanan dan minuman.
 - d. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya untuk industri manufaktur.
 - e. Transportasi laut berupa pelabuhan yang perlu ditingkatkan sarana dan prasarananya agar lebih memadai dalam proses perdagangan.
3. Kabupaten Batang Hari
 - a. Pengembangan industri hilir karet yang perlu ditingkatkan agar nilai tambah produk karet dapat meningkat. industri hilir karet antara lain:
 - 1). Industri ban untuk otomotif
 - 2). Industri *chemical rubber*
 - 3). Industri *crumb rubber*
 - 4). Industri barang jadi untuk keperluan industri, bahan dari karet untuk Keperluan kemiliteran, alas kaki dan komponennya, serta penggunaan umum serta alat kesehatan dan laboratorium.
 - 5). Sentra-sentra industri berbahan dasar karet dan plastik
 - b. Pengembangan industri hilir kelapa sawit
 - 1). Hilirisasi Oleopangan (*oleofood complex*), yaitu minyak goreng sawit, margarin, vitamin A, vitamin E, shortening, ice cream, creamer, cocoa butter/speciality fat dan lain-lain.
 - 2). Hilirisasi Oleokimia (*oleochemical complex*), yaitu produk biosurfaktan misalnya ragam produk detergen, sabun, shampo, biolubrikin (misalnya biopelumas) dan biomaterial (misalnya bioplastik).
 - 3). Hilirisasi Biofuel (*biofuel complex*), yaitu biodiesel, biogas, biopremium, bioavtur

- c. Pengembangan industri pengolahan makanan dan minuman.
 - d. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya untuk industri manufaktur.
4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- a. Pengembangan industri hilir kelapa sawit
 - 1). Hilirisasi Oleopangan (*oleofood complex*), yaitu minyak goreng sawit, margarin, vitamin A, vitamin E, *shortening*, *ice cream*, *creamer*, *cocoa butter/speciality fat* dan lain-lain.
 - 2). Hilirisasi Oleokimia (*oleochemical complex*), yaitu produk biosurfaktan misalnya ragam produk detergen, sabun, shampo, biolubrikin (misalnya biopelumas) dan biomaterial (misalnya bioplastik).
 - 3). Hilirisasi Biofuel (*biofuel complex*), yaitu biodiesel, biogas, biopremium, bioavtur.
 - b. Pengembangan industri hilir karet
 - 1). Industri ban untuk otomotif
 - 2). Industri *chemical rubber*
 - 3). Industri *crumb rubber*
 - 4). Industri barang jadi untuk keperluan industri, bahan dari karet untuk Keperluan kemiliteran, alas kaki dan komponennya, serta penggunaan umum serta alat kesehatan dan laboratorium.
 - 5). Sentra-Sentra Industri Berbahan
 - c. Pengembangan industri pengolahan makanan dan minuman.
 - d. Pengembangan industri pengolahan kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.
 - e. Pengembangan industri hulu dan hilir migas.
 - 1). Produk bahan bakar terdiri dari bensin, kerosin, minyak diesel, avtur, minyak bakar, LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) dan beberapa produk hasil olahan lainnya.
 - 2). Produk setengah jadi atau sering juga disebut produk antara adalah bahan-bahan hasil olahan yang dapat digunakan sebagai bahan baku pada industri lain, misalnya saja industri petrokimia. Contoh produk antara tersebut seperti *propilena*, *etilena*, *benzena*, *toluena*, *methanol* dan sebagainya.

5. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

a. Pengembangan industri hulu dan hilir migas

- 1). Produk bahan bakar terdiri dari bensin, kerosin, minyak diesel, avtur, minyak bakar, LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) dan beberapa produk hasil olahan lainnya.
- 2). Produk setengah jadi atau sering juga disebut produk antara adalah bahan-bahan hasil olahan yang dapat digunakan sebagai bahan baku pada industri lain, misalnya saja industri petrokimia. Contoh produk antara tersebut seperti *propilena, etilena, benzena, toluena, methanol* dan sebagainya.



10.

STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING PROVINSI JAMBI

Analisis SWOT Provinsi Jambi

Diperlukan berbagai upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam peningkatan daya saing daerah. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan, maka dilakukan dengan teknik analisis SWOT. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan atau hambatan (*threats*). Dalam hal ini kekuatan dan kelemahan merupakan aspek penilaian terhadap faktor internal, sedangkan peluang dan tantangan/ancaman merupakan aspek penilaian dari faktor eksternal. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Adapun identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan diuraikan sebagai berikut:

Kekuatan

1. Letak geografis Provinsi Jambi yang strategis, Provinsi Jambi terletak pada titik pertumbuhan segitiga kawasan pembangunan yaitu pertumbuhan regional IMT-GT (*Indonesia, Malaysia dan Thailand-Growth Triangle*) dan IMS-GT (*Indonesia, Malaysia dan Singapura-*

Growth Triangle). Dengan demikian posisi Provinsi Jambi mempunyai keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan provinsi lain.

2. Provinsi Jambi memiliki sektor dan produk unggulan .
3. Provinsi Jambi memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan angka pertumbuhan yang tinggi setiap tahunnya.
4. Ketersediaan sumber daya alam yang potensial berupa hutan, lahan pertanian, pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan, bahan tambang (batu bara, emas, bentonit) serta potensi pariwisata baik wisata alam maupun wisata budaya.
5. Telah dibentuknya badan pelayanan terpadu satu pintu untuk menangani perijinan dan penanaman modal.
6. Meningkatnya daya beli masyarakat, misalnya di Kota Jambi, dari 26,50 juta di tahun 2013, meningkat menjadi 29,62 juta di tahun 2014, dan di tahun 2015 juga mengalami peningkatan menjadi 37,01 juta.

Kelemahan

1. Daya saing provinsi Jambi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia masih berada pada posisi rendah.
2. Kurangnya daya dukung sarana dan prasarana infrastruktur dasar seperti listrik, telekomunikasi, jalan, air bersih, dan transportasi darat maupun laut (pelabuhan).
3. Minimnya ketersediaan data yang komprehensif, valid, dan *up to date*.
4. Kurangnya sumber dana pembangunan. Salah satu konsekuensi dari penerapan otonomi daerah adalah daerah harus mampu membiayai jalannya roda pembangunan.
5. Penguasaan teknologi yang masih rendah atau tradisional. Teknologi dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi yang menjadi faktor penting untuk bersaing di pasar bebas.
6. Potensi Provinsi Jambi belum memiliki keunikan dan daya tarik yang spesifik, sehingga tidak memberikan *competitive advantage* dalam kemampuan bersaing.
7. Masih kurangnya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga ekonomi non-bank mengakibatkan masih belum optimalnya pemberdayaan UMKM.
8. Lemahnya promosi investasi di daerah, artinya lemahnya penyampaian informasi agar investor mau menanamkan modal di daerah masing-

- masing serta memperkuat citra daerah sebagai lahan investasi.
9. Masih Rendahnya kualitas, pasokan tenaga kerja, dan belum meratanya sebaran tenaga kerja antar-wilayah mengakibatkan kesempatan kerja yang ada dimanfaatkan oleh pendatang yang berasal dari luar Provinsi Jambi
 10. Ketidakjelasan status lahan dapat menimbulkan rendahnya realisasi investasi dibandingkan rencananya, dan munculnya konflik sosial di lapangan.
 11. Belum maksimalnya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan investor untuk mengetahui peluang investasi dan peruntukan lahan.
 12. Produk belum diolah lebih lanjut (memiliki nilai tambah).
 13. Kepastian berusaha/hukum perlu ditingkatkan.
 14. Belum meratanya persebaran investasi.
 15. Lemahnya sistem jaringan koleksi dan distribusi. Sampai dengan saat ini jaringan koneksi dan distribusi barang dan jasa perdagangan di Provinsi Jambi banyak mengalami hambatan karena belum terintegrasinya sistem perdagangan di tiga tingkatan pasar yaitu pengumpul, pengecer dan grosir. Hal ini menyebabkan rendahnya daya saing produk, yang akibatnya lebih jauh adalah kelesuan untuk meningkatkan volume produksi. Perbaikan dan sistem koleksi dan distribusi selain bermanfaat untuk meningkatkan daya saing produk juga akan meningkatkan ketahanan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh terdorongnya integrasi komponen-komponen produksi yang terkait di Provinsi Jambi.
 16. Kurangnya pengembangan industri hilir di Provinsi Jambi. Kebanyakan di Provinsi Jambi lebih berorientasi pada Industri Hulu yaitu kegiatannya hanya mengolah bahan-bahan mentah menjadi bahan setengah jadi artinya sifatnya hanya menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri. Sementara di Provinsi Jambi belum banyak memiliki industri hilir dimana kegiatannya mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Keberadaan industri hilir bertujuan untuk menyediakan barang-barang yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Industri hilir memiliki banyak manfaat bagi perekonomian di antaranya menambah devisa negara, memajukan potensi pengusaha lokal, membuka lapangan

pekerjaan sehingga mengurangi jumlah pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Peluang

1. Masyarakat Provinsi Jambi yang heterogen, terutama penduduk asli Jambi lebih adaptif dan terbuka terhadap investasi dalam beberapa bidang.
2. Tingginya komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan daya saing daerah.
3. Adanya berbagai pelaku (asosiasi, perusahaan) dalam peningkatan daya saing daerah.
4. Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi. Kemajuan teknologi dibidang informasi dan komunikasi yang semakin pesat dan cepat dewasa ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan perseorangan, bisnis maupun penyelenggaraan pemerintahan.
5. Terjadinya bonus demografi di Provinsi Jambi, sehingga jumlah usia produktif akan mengalami peningkatan.
6. Belum tersedianya *technopark* yang memungkinkan terciptanya peningkatan produktivitas dan penggunaan teknologi tepat guna.
7. Meningkatnya geliat investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jambi.
8. Pelayanan penanaman modal di Jambi masih berpeluang besar untuk terus ditingkatkan.
9. Adanya hubungan kerja sama bisnis dengan negara-negara Asia Timur dan Tenggara serta negara-negara lainnya dengan pelaku-pelaku bisnis daerah Jambi (*private to private/people to people*). Kegiatan ini mempunyai dampak akan memberikan peluang untuk meningkatkan investasi.

Ancaman/Tantangan

1. Struktur ekonomi Provinsi Jambi didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (29,41%); dan Pertambangan dan Penggalian (17,66%); sedangkan Industri Pengolahan hanya 10,28%.

2. Industri pengolahan mengalami perlambatan dan mengarah pada penurunan. Kontribusi pada tahun 2013 sebesar 11,15% dan terus menurun hingga menyentuh level 10,28% di tahun 2017.
3. Fluktuasi harga produk perkebunan, seperti karet dan kelapa sawit yang sangat tergantung pada harga secara nasional maupun internasional.
4. Adanya dampak negatif terhadap usaha bidang pertanian secara umum (pertanian, kehutanan, pertambangan dan penggalian).
5. Adanya perdagangan bebas, seperti MEA akan meningkatkan persaingan
6. Provinsi Jambi, terutama di Kota Jambi masih tergantung pada daerah lain dalam ketersediaan dan kemandirian pangan, terutama bahan makanan utama.
7. Pola pikir serta sikap budaya masyarakat yang memiliki inovasi rendah, konsumtif, dan *primary product oriented* menjadi *manufactured product oriented*.
8. Keterbatasan kemampuan dalam menembus pasar regional dan nasional untuk produk UMKM dan kesamaan karakteristiknya dengan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi terjadi perlambatan, pada tahun 2013 sebesar 6,84 dan tahun 2017 hanya sebesar 4,64%.

Strategi Kebijakan Provinsi Jambi

Berdasarkan hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan/ancaman dapat ditentukan strategi kebijakan sebagaimana terlihat pada Tabel 10.1.

Tabel 10.1 Analisis SWOT dan Strategi

| INTERNAL FACTOR EFFECT (IFE) | KEKUATAN (S) | KELEMAHAN (W) | |
|---------------------------------|--|--|---|
| EXTERNAL FACTOR EFFECT (EFE) | 1. Letak geografis Provinsi Jambi yang strategis. | 1. Daya saing provinsi Jambi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia masih berada pada posisi rendah. | |
| | 2. Provinsi Jambi memiliki sektor dan produk unggulan. | 2. Provinsi Jambi memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan angka pertumbuhan yang tinggi setiap tahunnya. | 2. Kurangnya daya dukung sarana dan prasarana infrastruktur dasar. |
| | 3. Tersedia sumber daya alam yang potensial. | 4. Ketersediaan sumber daya alam yang potensial. | 3. Minimnya ketersediaan data yang komprehensif. |
| | 4. Telah dibentuknya badan pelayanan terpadu satu pintu untuk menangani perijinan dan penanaman modal. | 5. Telah dibentuknya badan pelayanan terpadu satu pintu untuk menangani perijinan dan penanaman modal. | 4. Kurangnya sumber dana pembangunan. |
| | 5. Meningkatkan daya beli masyarakat. | 6. Meningkatkan daya beli masyarakat. | 5. Penguasaan teknologi yang masih rendah atau tradisional. |
| | | | 6. Potensi Provinsi Jambi belum memiliki keunikan dan daya tarik yang spesifik. |
| | | | 7. Masih kurangnya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga ekonomi non-bank mengakibatkan masih belum optimalnya pemberdayaan UMKM. |
| | | | 8. Lemahnya promosi investasi di daerah. |
| | | | 9. Masih Rendahnya kualitas, pasokan tenaga kerja, dan belum meratanya sebaran tenaga kerja antar-wilayah. |
| | | | 10. Ketidaktjelasan status lahan. |
| | | | 11. Belum maksimalnya keterbukaan dan kemudahan akses informasi. |
| | | | 12. Produk belum diolah lebih lanjut (memiliki nilai tambah). |
| | | | 13. Kepastian berusaha/hukum perlu ditingkatkan. |
| | | | 14. Belum meratanya persebaran investasi. |
| | | | 15. Lemahnya sistem jaringan koneksi dan distribusi. |
| | | | 16. Kurangnya pengembangan industri hilir di Provinsi Jambi. |

Tabel 10.1 Analisis SWOT dan Strategi (lanjutan)

| PELUANG (O) | STRATEGI (SO) | STRATEGI (WO) |
|--|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan daya saing daerah. 2. Masyarakat Provinsi Jambi yang heterogen. 3. Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi. 4. Terjadinya bonus demografi di Provinsi Jambi. 5. Adanya berbagai pelaku dalam peningkatan daya saing daerah . 6. Belum tersedianya <i>technopark</i> yang memungkinkan terciptanya peningkatan produktivitas dan penggunaan teknologi tepat guna. 7. Meningkatnya geliat investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jambi . 8. Pelayanan penanaman modal di Kota Jambi masih berpeluang besar untuk terus ditingkatkan. 9. Adanya hubungan kerja sama bisnis dengan negara-negara Asia Timur dan Tenggara serta negara-negara lainnya dengan pelaku-pelaku bisnis daerah Jambi (<i>private to private/people to people</i>). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan iklim penanaman modal. 2. Optimalisasi sektor dan produk unggulan. 3. Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. 4. Meningkatkan kemitraan/ kerja sama lintas sektoral. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan promosi/pemasaran daerah . 2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, dan Infrastruktur dasar . 3. Meningkatkan persebaran investasi. 4. Meningkatkan realisasi investasi. 5. Meningkatkan sumber pendanaan daerah, di antaranya dengan kerja sama dengan swasta, dan optimalisasi pajak dan retribusi daerah. 6. Meningkatkan ketersediaan data yang komprehensif dan <i>up to date</i>. 7. Meningkatkan citra produk Provinsi Jambi. 8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi. 9. Meningkatkan ketersediaan dan penyampaian informasi terkait status lahan. 10. Meningkatkan pengolahan produk yang bernilai tambah. 11. Meningkatkan kepastian berusaha/hukum. 12. Meningkatkan sistem jaringan koneksi dan distribusi. 13. Meningkatkan industri hilir di Provinsi Jambi. 14. Meningkatkan kemudahan akses terutama kepada UMKM. 15. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM/tenaga kerja. |

Tabel 10.1 Analisis SWOT dan Strategi (lanjutan)

| ANCAMAN (T) | STRATEGI (ST) | STRATEGI (WT) |
|--|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur ekonomi Provinsi Jambi didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (29,41%); dan Pertambangan dan Penggalian (17,66%); sedangkan Industri Pengolahan hanya 10,28%. 2. Industri pengolahan mengalami perlambatan dan mengarah pada penurunan. 3. Fluktuasi harga produk perkebunan. 4. Adanya dampak negatif terhadap usaha bidang pertanian secara umum (pertanian, kehutanan, pertambangan dan penggalian). 5. Adanya perdagangan bebas, seperti MEA akan meningkatkan persaingan. 6. Provinsi Jambi, terutama di Kota Jambi masih tergantung pada daerah lain dalam ketersediaan dan kemandirian pangan, terutama bahan makanan utama. 7. Pola pikir serta sikap budaya masyarakat yang memiliki inovasi rendah, konsumtif, dan <i>primary product oriented</i> menjadi <i>manufactured product oriented</i>. 8. Keterbatasan kemampuan dalam menembus pasar regional dan nasional untuk produk UMKM dan kesamaan karakteristiknya dengan Provinsi Sumatera Selatan. 9. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi terjadi perlambatan, pada tahun 2013 sebesar 6,84 dan tahun 2017 hanya sebesar 4,64%. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (<i>green investment</i>). 2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya pertanian dan perkebunan yang lestari. 3. Memantapkan keberadaan lahan pertanian yang lestari serta menjaga tingkat kesuburan tanah. 4. Mengubah pola pikir serta sikap budaya masyarakat yang memiliki inovasi rendah, konsumtif, dan <i>primary product oriented</i> menjadi <i>manufactured product oriented</i>. 5. Meningkatkan pasokan kesiediaan bahan pangan secara terukur melalui kebijakan antisipatif. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produktivitas dan mutu produk 2. Meningkatkan penerapan standarisasi produk (SNI), HAKI, dan sertifikasi produk. |

Berdasarkan hasil analisis SWOT pada Tabel 9.1, dapat diidentifikasi strategi dalam meningkatkan daya saing Provinsi Jambi sebagai berikut:

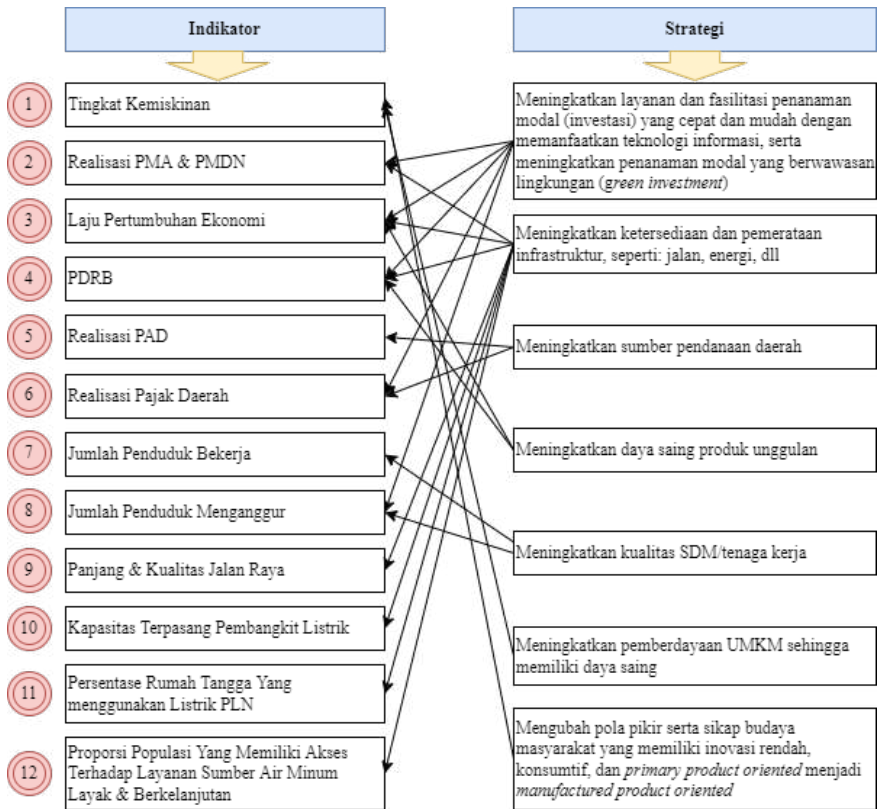
1. Meningkatkan iklim penanaman modal.
2. Optimalisasi sektor dan produk unggulan.
3. Meningkatkan pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.
4. Meningkatkan kemitraan/ kerja sama lintas sektoral.
5. Meningkatkan promosi/pemasaran daerah.
6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, dan infrastruktur dasar.
7. Meningkatkan persebaran investasi.
8. Meningkatkan realisasi investasi.
9. Meningkatkan sumber pendanaan daerah, di antaranya dengan kerja sama dengan swasta, dan optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
10. Meningkatkan ketersediaan data yang komprehensif dan *up to date*.
11. Meningkatkan citra produk Provinsi Jambi.
12. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.
13. Meningkatkan ketersediaan dan penyampaian informasi terkait status lahan.
14. Meningkatkan pengolahan produk yang bernilai tambah.
15. Meningkatkan kepastian berusaha/hukum.
16. Meningkatkan sistem jaringan koneksi dan distribusi.
17. Meningkatkan industri hilir di Provinsi Jambi.
18. Meningkatkan kemudahan akses terutama kepada UMKM.
19. Meningkatkan kualitas SDM/tenaga kerja.
20. Meningkatkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*).
21. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya pertanian dan perkebunan yang lestari.
22. Memantapkan keberadaan lahan pertanian yang lestari serta menjaga tingkat kesuburan tanah.
23. Mengubah pola pikir serta sikap budaya masyarakat yang memiliki inovasi rendah, konsumtif, dan *primary product oriented* menjadi *manufactured product oriented*.

24. Meningkatkan pasokan kesediaan bahan pangan secara terukur melalui kebijakan antisipatif.
25. Meningkatkan produktivitas dan mutu produk.
26. Meningkatkan penerapan standarisasi produk (SNI), HAKI, dan sertifikasi produk.

Dari hasil identifikasi tersebut jika strategi tersebut dilakukan *regrouping* maka menghasilkan strategi strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi melalui layanan dan fasilitasi penanaman modal (investasi) yang cepat dan mudah dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta meningkatkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*)
2. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur, seperti: jalan, energi, dll.
3. Meningkatkan sumber pendanaan daerah, di antaranya dengan kerja sama pemerintah daerah dengan swasta, dan optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
4. Meningkatkan daya saing produk, yaitu meningkatkan produktivitas dan mutu produk, terutama pada produk unggulan seperti pada sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan.
5. Meningkatkan kualitas SDM/tenaga kerja.
6. Meningkatkan pemberdayaan UMKM sehingga memiliki daya saing.
7. Mengubah pola pikir serta sikap budaya masyarakat yang memiliki inovasi rendah, konsumtif, dan *primary product oriented menjadi manufactured product oriented*.

Jika dikaitkan antara indikator yang memiliki daya saing rendah di Provinsi Jambi dengan strategi strategis yang ditetapkan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 10.1 Keterkaitan antara Indikator yang Memiliki Daya Saing Rendah dengan Strategi yang Ditetapkan



11. **PENUTUP**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil perhitungan analisis pembentuk daya saing *input* dengan indikator lingkungan usaha produktif menunjukkan bahwa Provinsi Jambi hanya berada di peringkat ke-19 secara nasional. Apabila dilihat dari indikator daya saing *input* dengan variabel sumber daya manusia, terlihat bahwa Provinsi Jambi menempati urutan ke 17. Untuk lingkup infrastruktur dan sumber daya alam, terlihat bahwa Provinsi Jambi menempati urutan ke 25. Provinsi Jambi menempati peringkat ke 19 yang masuk dalam kategori provinsi dengan daya saing menengah. Berdasarkan daya saing *output*, apabila dilihat dari variabel produktivitas tenaga kerja, terlihat bahwa Provinsi Jambi memperoleh skor 0.917 dan menempati urutan ke 8 yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing tinggi”. Berdasarkan variabel tingkat kesempatan kerja, terlihat bahwa Provinsi Jambi menempati urutan ke 11 yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing menengah”. Bila daya saing diukur dengan variabel PDRB per kapita, terlihat bahwa Provinsi Jambi menempati urutan ke 8 yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing tinggi”. . Berdasarkan daya saing *output* menggunakan variabel IPM, terlihat bahwa

Provinsi Jambi menempati urutan ke 16 yang berarti Provinsi Jambi bagian dari kelompok “daya saing menengah”. Untuk Daya Saing *Input Output* Keseluruhan, Provinsi Jambi menempati posisi ke-13, berarti ini adalah bagian dari kelompok “daya saing menengah”.

Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, Pemerintah Provinsi Jambi seyogyanya perlu melakukan strategi sebagai berikut: (1) Meningkatkan investasi melalui layanan dan fasilitasi penanaman modal (investasi) yang cepat dan mudah dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta meningkatkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment). (2) Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur, seperti: jalan, energi, dll. (3) Meningkatkan sumber pendanaan daerah, di antaranya dengan kerja sama pemerintah daerah dengan swasta, dan optimalisasi pajak dan retribusi daerah. (4) Meningkatkan daya saing produk, yaitu meningkatkan produktivitas dan mutu produk, terutama pada produk unggulan seperti pada sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan. (5) Meningkatkan kualitas SDM/tenaga kerja. (6) Meningkatkan pemberdayaan UMKM sehingga memiliki daya saing. (7) Mengubah pola pikir serta sikap budaya masyarakat yang memiliki inovasi rendah, konsumtif, dan *primary product oriented* menjadi *manufactured product oriented*.

Hal ini dikarenakan dengan adanya bencana alam, infrastruktur jalanlah yang paling terkenal dampak akibat bencana tersebut, sehingga memengaruhi ketimpangan pendapatan. Apabila variabel kontrol dimasukkan ke dalam model seperti PDRB, investasi langsung, pembangunan manusia, dan tingkat kemiskinan, maka pengaruh bencana tidaklah signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Untuk memperkecil ketimpangan pendapatan di Indonesia, pengambil kebijakan perlu fokus dalam pengembangan infrastruktur jalan dan pembangunan manusia baik secara kuantitas maupun kualitas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P., Alisjahbana, A., Effendi, N., Budiono. 2002. *Daya Saing Daerah : Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia. BPFE. Yogyakarta.
- Afonso, Antonio. 2003. Public Sector Efficiency: An International Comparison. *European Central Bank Working Papers Series*, No 242. <http://ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp242.pdf>.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan Ekonomi Daerah (edisi kedua)*. BPFE. Yogyakarta.
- Ary, D., Lucy C.J., dan Asghar, R. 1982. *Introduction to Research in Education*. Terjemahan Arief Furchan. Usaha Nasional. Surabaya.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL UGM. (199). *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah*.
- Badan Pusat Statistik. 2010-2020. *Provinsi Jambi Dalam Angka*. BPS Provinsi Jambi.

- Badan Pusat Statistik. 2014. Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Bappenas, 1999. Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. Menata Ke Depan Perekonomian Nasional.
- Bogdan, R. and Taylor, S.J. 1975. *Introduction to Qualitative Research Methode*. John Willey and Sons New York.
- Budiharsono, S. 2001. *Teknik Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Budiharsono, S. 2001. *Teknik Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Cho, Dong-Sung. 2003. *From Adam Smith to Michael Porter: Evolusi Teori Daya Saing*. Salemba Empat. Jakarta
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Damanhuri, Didin S, Heru Nugroho, Ignas Kleden, Mohtar M, Ramlan Subakti. 1997. Tinjauan Kritis Idiologi Liberalisme dan Sosialisme. Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen dalam Negeri.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- Fei, J.C., and G. Ranis. 1964. *Development of the Labor-Surplus Economy: Theory and Policy*. Homewood, Irwin, Illinois.
- Fitriyanti NI, Handayani HR. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2): 79-90.
- Glasson, J. (1977). *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan Oleh Paul Sitohang. Program Perencanaan Nasional FEUI-Bappenas. Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta.
- Hakim, A. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Ekonisia. Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta.
- Hidayat, Paidi 2012. Analisis Daya Saing Ekonomi Kota Medan. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Volume 4 Nomor 3, hal 228-238

- Irawati, I., Urufi, Z., Resobeoen, R. E. I. R. 2012. Pengukuran Tingkat Daya Saing Daerah Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Variabel Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Serta Variabel Sumber Daya Manusia di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara”. *Jurnal Teknik Industri*. Vol. VII No. 1. Hal: 43-50.
- Isramiwarti R, Rasuli M, Taufik T. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*. 9(3): 195-213.
- Jinghan, M. L. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Penerjemah D Guritno. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kadariah. 1985. *Ekonomi Perencanaan*. Lembaga Penerbit FE-UI
- Koetin, E. A. 2002. *Analisis Pasar Modal*. Cetakan keempat. Januari. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- KPPOD. 2005. *Daya Tarik Investasi 214 Kabupaten/kota di Indonesia tahun 2004*. KPPOD. Jakarta.
- Kuncoro, M., Aswandi, H. 2002. Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris Di Kalimantan Selatan 1993-1999. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 17. No. 1. Hal: 27– 45.
- Lewis, W. A. 1959. *Economic Development with Unlimited Supplies of Labor*. In Chenery and Srinivasan (Editors). Handbook of Development Economics. Science Publisher B.V. Amsterdam.
- Lipsey, R .G, Courant, P. N, Purvis, D. D, Steiner, P. O. 1995. *Pengantar Mikro Ekonomi*. Edisi Kesepuluh. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Lorenzo, A. M. 2002. Regional Disparities in Developing East Asia: Challeges for The Future. Seminar Globalisation.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nanga, M. 2005. *Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. PT Grafindo Persada. Jakarta.
- Porter, Michael E., 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. The Free Press.

- Porter, Michael, E. 2008. *Strategi Bersaing (Competitive strategy)*. Karisma publishing Group. Tangerang.
- PPSK Bank Indonesia dan LP3E FE Unpad. 2008. *Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Prakoso JA, Islami FS, Sugiharti RR. 2019. Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, 4(1): 87-100.
- Priyarsono, D.S. dan Sahara. 2006. *Modul Mata Kuliah Ekonomi Regional*, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. IPB.
- Putra, D.E. 2003. *Berburu Uang di Pasar Modal: Panduan Investasi Menuju Kebebasan Finansial*. Cetakan kedua, November. Penerbit Effhar. Semarang.
- Putra, E.P. 2016. Dampak Program Bantuan Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten Tertinggal di Indonesia. [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Richardson, H. W. 1977. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. FEUI. Jakarta.
- Riyadi dan Bratakusumah, D. S. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rustiadi, E. Saefulhakim, S., dan Panuju, D. R. 2007. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Bogor. Materi Kuliah Program Studi PWD Pasca Sarjana IPB. Tidak Dipublikasi.
- _____. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor. Jakarta
- Saefulhakim, S. 2003. Prinsip-Prinsip Ekonomi Regional dan Perdesaan. Bogor. Program Studi Ilmu-Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Institut Pertanian Bogor. Tidak Dipublikasi.
- Santoso, E., B. 2009. *Daya saing kota-kota besar di Indonesia*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS, 29 Oktober.

- Setiyawati A, Hamzah A. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 4(2):211–228. doi:10.21002/jaki.2007.11.
- Siamat, D. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Ketiga. Fakultas Ekonomi Indonesia. Jakarta.
- Simanjuntak P J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber daya Manusia*. FE UI. Jakarta.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Baduose Media. Padang.
- Suci SC, Asmara A. 2013. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*. 3(1):8–22. doi:10.29244/jekp.3.1.8-22.
- Sudantoko, D. 2009. *Dasar-Dasar Pengantar Ekonomi Pembangunan*. PT PP Mardi Mulya. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan metode R&D*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sukirno, S. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*. Cetakan Ketiga. Penerbit Kencana. Jakarta.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Sutedi Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sutopo, H. B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. UNS Press. Surakarta.
- Tambunan, T. 2003. *Perekonomian Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

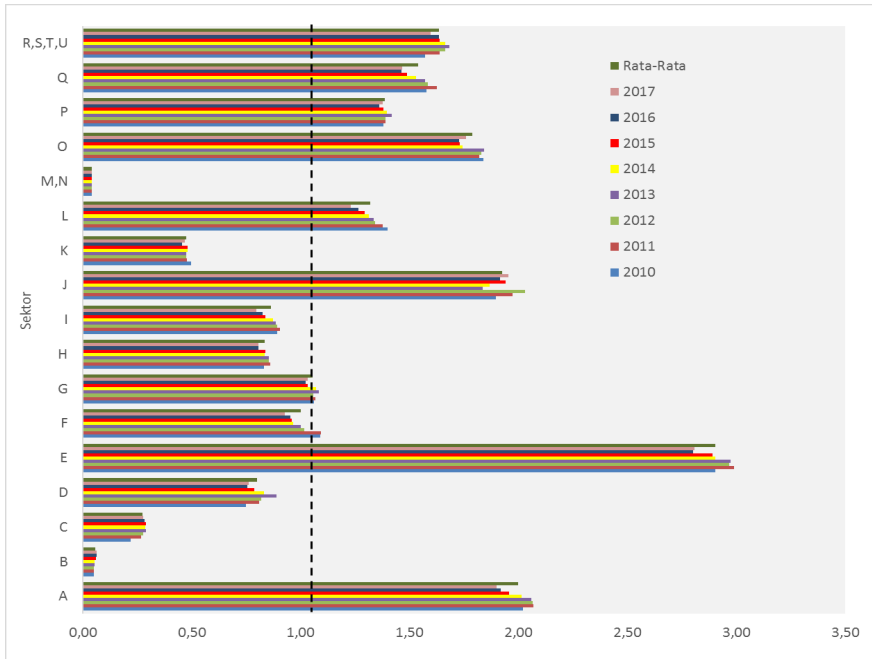


LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Perhitungan *Location Quotient* (LQ) KABUPATEN KERINCI

| Klasifikasi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata-Rata |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| A | 2,02 | 2,07 | 2,06 | 2,06 | 2,01 | 1,96 | 1,92 | 1,90 | 2,00 |
| B | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| C | 0,22 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 |
| D | 0,75 | 0,81 | 0,82 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,76 | 0,76 | 0,80 |
| E | 2,90 | 2,99 | 2,97 | 2,97 | 2,90 | 2,89 | 2,80 | 2,81 | 2,90 |
| F | 1,09 | 1,09 | 1,02 | 1,00 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 1,00 |
| G | 1,06 | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 1,07 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| H | 0,83 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,81 | 0,81 | 0,84 |
| I | 0,89 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,87 | 0,84 | 0,83 | 0,80 | 0,86 |
| J | 1,90 | 1,97 | 2,03 | 1,83 | 1,87 | 1,94 | 1,92 | 1,95 | 1,93 |
| K | 0,50 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,47 | 0,48 |
| L | 1,40 | 1,38 | 1,34 | 1,34 | 1,31 | 1,29 | 1,26 | 1,23 | 1,32 |
| M,N | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

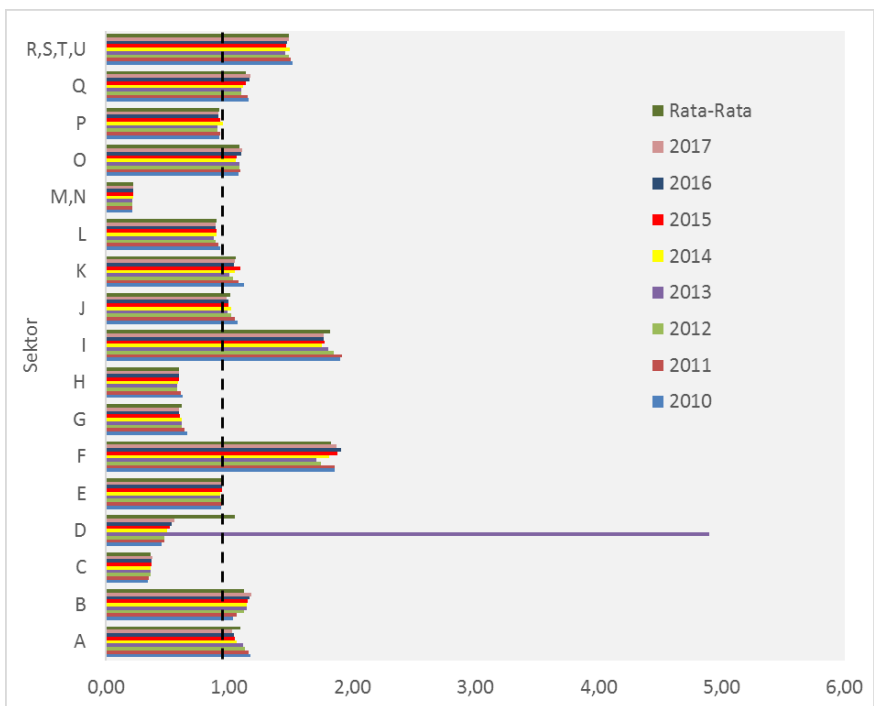
| | | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| O | 1,84 | 1,82 | 1,83 | 1,84 | 1,74 | 1,73 | 1,73 | 1,76 | 1,79 |
| P | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,42 | 1,40 | 1,38 | 1,36 | 1,38 | 1,39 |
| Q | 1,58 | 1,62 | 1,58 | 1,57 | 1,53 | 1,49 | 1,46 | 1,47 | 1,54 |
| R,S,T,U | 1,57 | 1,64 | 1,66 | 1,68 | 1,66 | 1,64 | 1,64 | 1,60 | 1,64 |



KABUPATEN SAROLANGUN

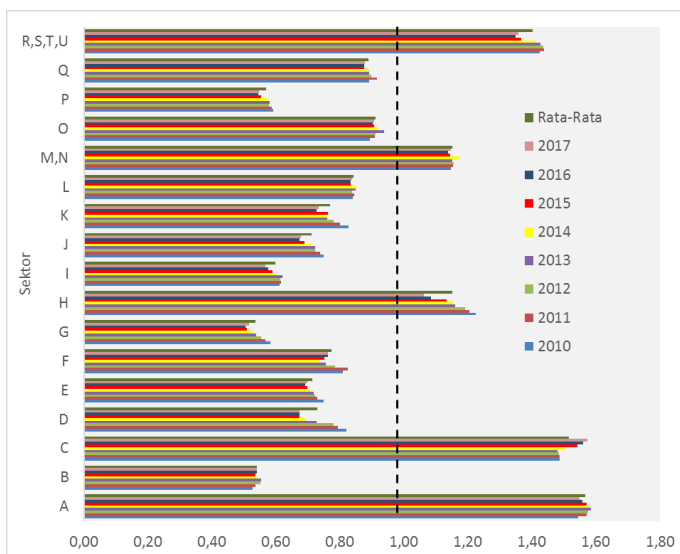
| Klasifikasi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata-Rata |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| A | 1,18 | 1,16 | 1,13 | 1,12 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,10 |
| B | 1,03 | 1,06 | 1,12 | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,18 | 1,13 |
| C | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,36 |
| D | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 4,90 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 1,05 |
| E | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,94 |
| F | 1,86 | 1,86 | 1,75 | 1,71 | 1,81 | 1,88 | 1,91 | 1,87 | 1,83 |
| G | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,62 |
| H | 0,62 | 0,61 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,60 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| I | 1,90 | 1,92 | 1,85 | 1,81 | 1,76 | 1,78 | 1,77 | 1,77 | 1,82 |
| J | 1,07 | 1,05 | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 1,02 |
| K | 1,13 | 1,08 | 1,03 | 1,00 | 1,05 | 1,09 | 1,04 | 1,05 | 1,06 |
| L | 0,93 | 0,92 | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,90 |
| M,N | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,22 |
| O | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,05 | 1,07 | 1,10 | 1,11 | 1,08 |
| P | 0,92 | 0,93 | 0,91 | 0,91 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,91 | 0,92 |
| Q | 1,16 | 1,15 | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,14 | 1,17 | 1,18 | 1,14 |
| R,S,T,U | 1,52 | 1,50 | 1,49 | 1,46 | 1,49 | 1,47 | 1,47 | 1,49 | 1,49 |



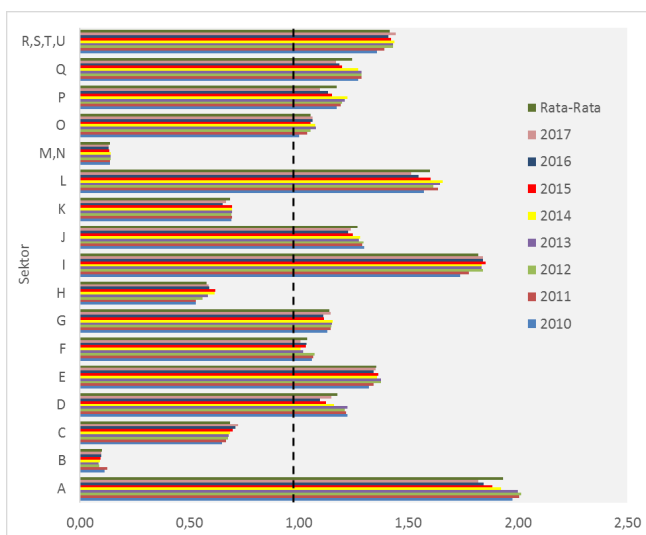
KABUPATEN MUARO JAMBI

| Klasifikasi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata-Rata |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| A | 1,54 | 1,57 | 1,58 | 1,59 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | 1,57 |
| B | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| C | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,56 | 1,57 | 1,52 |
| D | 0,82 | 0,80 | 0,78 | 0,73 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,73 |
| E | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,71 |
| F | 0,81 | 0,83 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,77 |
| G | 0,58 | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,54 |
| H | 1,23 | 1,21 | 1,19 | 1,16 | 1,16 | 1,14 | 1,08 | 1,06 | 1,15 |
| I | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,60 |
| J | 0,75 | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,69 | 0,67 | 0,68 | 0,71 |
| K | 0,83 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,73 | 0,73 | 0,77 |
| L | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 |
| M,N | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,15 |
| O | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 0,94 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,91 |
| P | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,57 |
| Q | 0,89 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,89 |
| R,S,T,U | 1,42 | 1,44 | 1,44 | 1,43 | 1,41 | 1,37 | 1,35 | 1,36 | 1,40 |



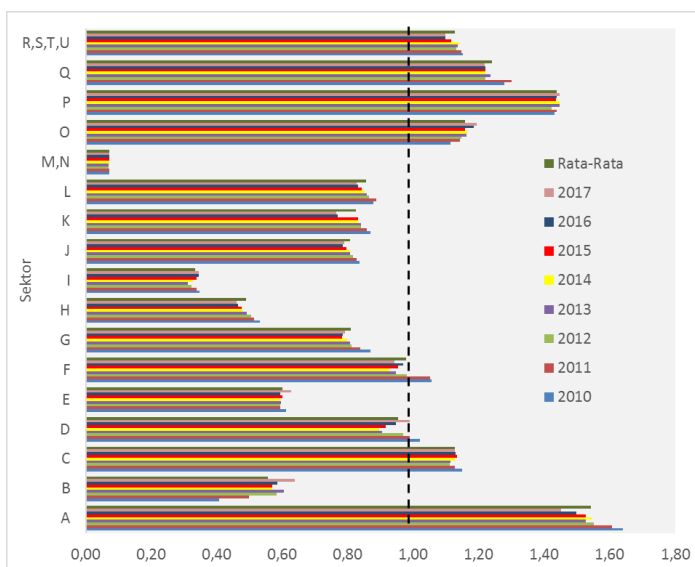
KABUPATEN MERANGIN

| Klasifikasi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata-Rata |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| A | 1,98 | 2,01 | 2,01 | 2,00 | 1,92 | 1,88 | 1,84 | 1,82 | 1,93 |
| B | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| C | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,69 |
| D | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 1,16 | 1,13 | 1,10 | 1,15 | 1,17 |
| E | 1,32 | 1,34 | 1,37 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,34 | 1,35 | 1,35 |
| F | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,04 |
| G | 1,13 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,12 | 1,11 | 1,15 | 1,14 |
| H | 0,53 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,62 | 0,59 | 0,59 | 0,58 |
| I | 1,74 | 1,78 | 1,84 | 1,84 | 1,83 | 1,85 | 1,84 | 1,84 | 1,82 |
| J | 1,30 | 1,29 | 1,30 | 1,27 | 1,28 | 1,25 | 1,22 | 1,24 | 1,27 |
| K | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,65 | 0,67 | 0,68 |
| L | 1,57 | 1,63 | 1,62 | 1,65 | 1,66 | 1,60 | 1,55 | 1,51 | 1,60 |
| M,N | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
| O | 1,00 | 1,04 | 1,05 | 1,08 | 1,08 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,05 |
| P | 1,17 | 1,19 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,15 | 1,13 | 1,10 | 1,17 |
| Q | 1,27 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,27 | 1,20 | 1,19 | 1,17 | 1,24 |
| R,S,T,U | 1,36 | 1,39 | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 1,42 | 1,41 | 1,44 | 1,41 |



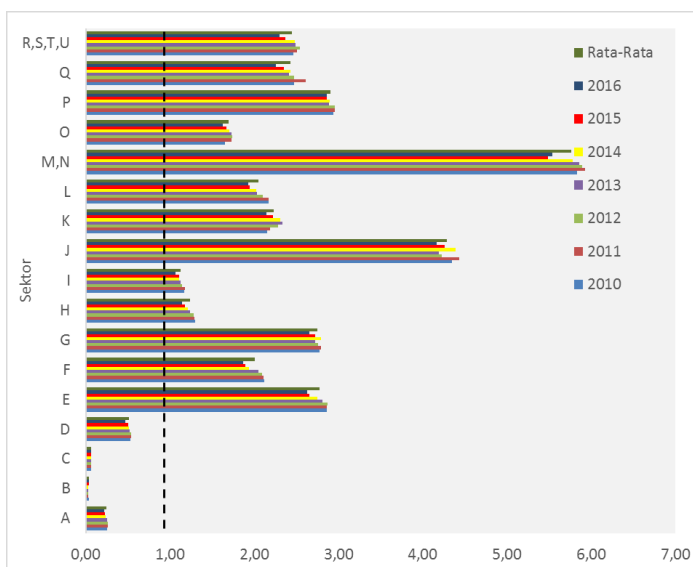
KABUPATEN BATANG HARI

| Klasifikasi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata-Rata |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| A | 1,64 | 1,61 | 1,55 | 1,53 | 1,54 | 1,53 | 1,50 | 1,45 | 1,54 |
| B | 0,41 | 0,50 | 0,58 | 0,61 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,64 | 0,56 |
| C | 1,15 | 1,13 | 1,11 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| D | 1,02 | 0,99 | 0,97 | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,95 | 0,99 | 0,95 |
| E | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0,63 | 0,60 |
| F | 1,06 | 1,05 | 0,98 | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 0,94 | 0,98 |
| G | 0,87 | 0,84 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,81 |
| H | 0,53 | 0,51 | 0,51 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,49 |
| I | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,33 |
| J | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,81 |
| K | 0,87 | 0,86 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,77 | 0,76 | 0,83 |
| L | 0,88 | 0,89 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,86 |
| M,N | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| O | 1,11 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,19 | 1,16 |
| P | 1,43 | 1,44 | 1,42 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,44 | 1,45 | 1,44 |
| Q | 1,28 | 1,30 | 1,22 | 1,24 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,24 |
| R,S,T,U | 1,15 | 1,15 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,12 | 1,10 | 1,10 | 1,13 |



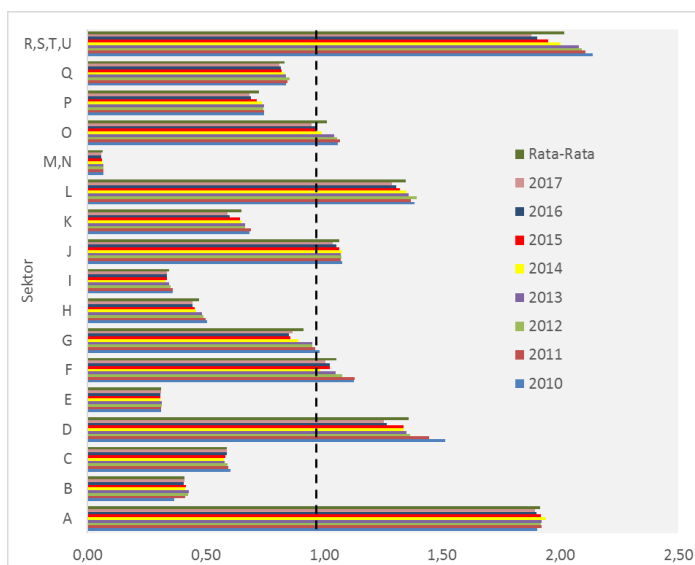
KOTA SUNGAI PENUH

| Klasifikasi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata-Rata |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| A | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | | 0,25 |
| B | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| C | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| D | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,47 | | 0,52 |
| E | 2,87 | 2,86 | 2,87 | 2,81 | 2,76 | 2,66 | 2,63 | | 2,78 |
| F | 2,12 | 2,11 | 2,09 | 2,05 | 1,94 | 1,90 | 1,87 | | 2,01 |
| G | 2,78 | 2,80 | 2,76 | 2,73 | 2,79 | 2,73 | 2,66 | | 2,75 |
| H | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 1,24 | 1,22 | 1,18 | 1,14 | | 1,24 |
| I | 1,17 | 1,18 | 1,14 | 1,13 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | | 1,13 |
| J | 4,35 | 4,44 | 4,22 | 4,19 | 4,39 | 4,27 | 4,17 | | 4,29 |
| K | 2,15 | 2,19 | 2,28 | 2,33 | 2,31 | 2,23 | 2,14 | | 2,23 |
| L | 2,17 | 2,17 | 2,10 | 2,03 | 2,03 | 1,95 | 1,93 | | 2,05 |
| M,N | 5,83 | 5,93 | 5,90 | 5,86 | 5,78 | 5,49 | 5,55 | | 5,76 |
| O | 1,65 | 1,73 | 1,74 | 1,73 | 1,71 | 1,67 | 1,63 | | 1,69 |
| P | 2,94 | 2,96 | 2,96 | 2,89 | 2,89 | 2,86 | 2,86 | | 2,91 |
| Q | 2,47 | 2,61 | 2,48 | 2,41 | 2,43 | 2,35 | 2,26 | | 2,43 |
| R,S,T,U | 2,46 | 2,51 | 2,54 | 2,50 | 2,48 | 2,37 | 2,30 | | 2,45 |



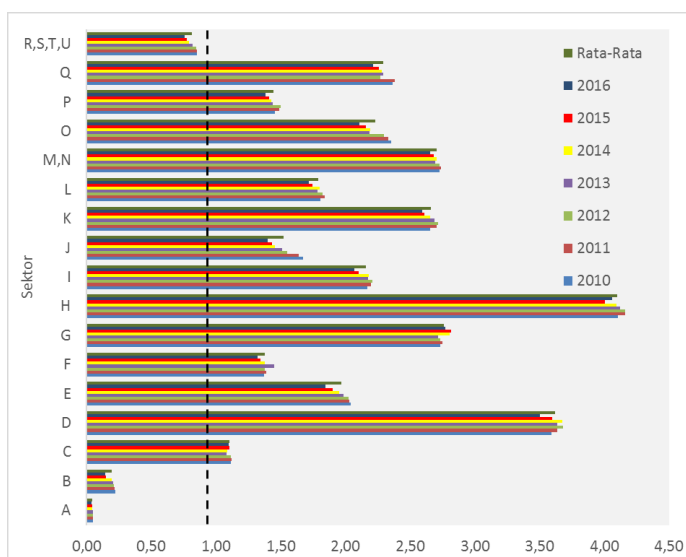
KABUPATEN TEBO

| Klasifikasi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata-Rata |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| A | 1,90 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,94 | 1,92 | 1,90 | 1,89 | 1,91 |
| B | 0,37 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| C | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| D | 1,51 | 1,45 | 1,37 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,27 | 1,25 | 1,36 |
| E | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| F | 1,13 | 1,13 | 1,08 | 1,05 | 0,99 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,05 |
| G | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,89 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,91 |
| H | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,47 |
| I | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 |
| J | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,07 |
| K | 0,69 | 0,69 | 0,67 | 0,67 | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 0,59 | 0,65 |
| L | 1,39 | 1,37 | 1,39 | 1,36 | 1,35 | 1,32 | 1,31 | 1,29 | 1,35 |
| M,N | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| O | 1,06 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 1,01 |
| P | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,72 | 0,69 | 0,68 | 0,73 |
| Q | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,83 |
| R,S,T,U | 2,14 | 2,11 | 2,09 | 2,08 | 2,00 | 1,95 | 1,90 | 1,88 | 2,02 |



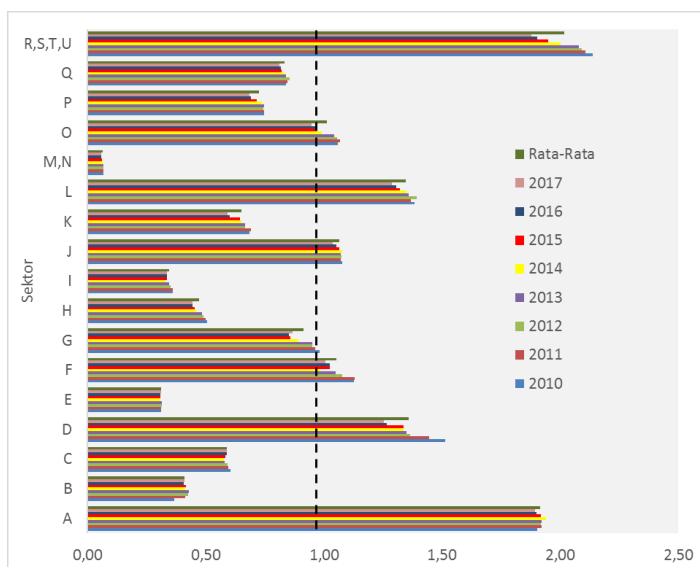
KOTA JAMBI

| Klasifikasi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata-Rata |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| A | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | | 0,05 |
| B | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,15 | 0,14 | | 0,19 |
| C | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,08 | 1,09 | 1,11 | 1,10 | | 1,10 |
| D | 3,59 | 3,64 | 3,68 | 3,63 | 3,68 | 3,60 | 3,50 | | 3,62 |
| E | 2,04 | 2,03 | 2,02 | 1,99 | 1,95 | 1,90 | 1,85 | | 1,97 |
| F | 1,38 | 1,39 | 1,38 | 1,45 | 1,38 | 1,35 | 1,32 | | 1,38 |
| G | 2,73 | 2,75 | 2,73 | 2,72 | 2,81 | 2,82 | 2,77 | | 2,76 |
| H | 4,10 | 4,16 | 4,16 | 4,12 | 4,09 | 4,01 | 4,06 | | 4,10 |
| I | 2,17 | 2,20 | 2,21 | 2,17 | 2,18 | 2,11 | 2,07 | | 2,16 |
| J | 1,67 | 1,64 | 1,55 | 1,51 | 1,46 | 1,43 | 1,40 | | 1,52 |
| K | 2,66 | 2,71 | 2,72 | 2,69 | 2,65 | 2,61 | 2,59 | | 2,66 |
| L | 1,81 | 1,84 | 1,82 | 1,78 | 1,80 | 1,75 | 1,72 | | 1,79 |
| M,N | 2,73 | 2,74 | 2,73 | 2,70 | 2,71 | 2,68 | 2,65 | | 2,71 |
| O | 2,36 | 2,33 | 2,30 | 2,19 | 2,19 | 2,16 | 2,11 | | 2,23 |
| P | 1,46 | 1,49 | 1,50 | 1,44 | 1,43 | 1,41 | 1,38 | | 1,44 |
| Q | 2,37 | 2,38 | 2,27 | 2,29 | 2,28 | 2,26 | 2,22 | | 2,30 |
| R,S,T,U | 0,85 | 0,86 | 0,85 | 0,82 | 0,79 | 0,78 | 0,76 | | 0,81 |



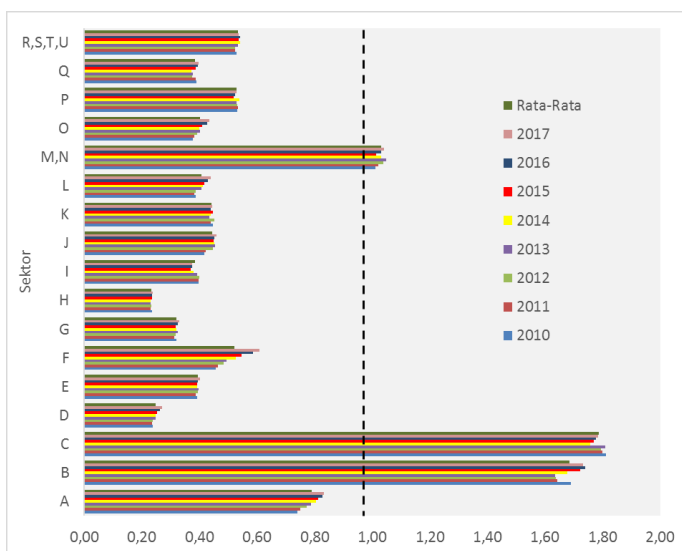
KABUPATEN TEBO

| Klasifikasi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata-Rata |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| A | 1,90 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,94 | 1,92 | 1,90 | 1,89 | 1,91 |
| B | 0,37 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| C | 0,61 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| D | 1,51 | 1,45 | 1,37 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,27 | 1,25 | 1,36 |
| E | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| F | 1,13 | 1,13 | 1,08 | 1,05 | 0,99 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,05 |
| G | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,89 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,91 |
| H | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,47 |
| I | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 |
| J | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,07 |
| K | 0,69 | 0,69 | 0,67 | 0,67 | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 0,59 | 0,65 |
| L | 1,39 | 1,37 | 1,39 | 1,36 | 1,35 | 1,32 | 1,31 | 1,29 | 1,35 |
| M,N | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| O | 1,06 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 1,01 |
| P | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,72 | 0,69 | 0,68 | 0,73 |
| Q | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,83 |
| R,S,T,U | 2,14 | 2,11 | 2,09 | 2,08 | 2,00 | 1,95 | 1,90 | 1,88 | 2,02 |



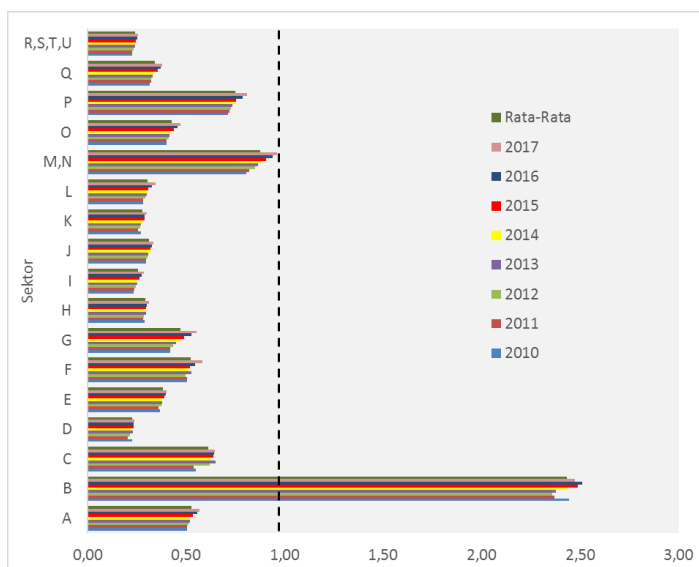
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| Klasifikasi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata-Rata |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| A | 0,74 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,79 |
| B | 1,69 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,68 | 1,72 | 1,74 | 1,73 | 1,68 |
| C | 1,81 | 1,80 | 1,79 | 1,81 | 1,76 | 1,77 | 1,78 | 1,78 | 1,79 |
| D | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,25 |
| E | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,39 |
| F | 0,46 | 0,46 | 0,48 | 0,49 | 0,53 | 0,55 | 0,59 | 0,61 | 0,52 |
| G | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,32 |
| H | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,23 |
| I | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,39 |
| J | 0,42 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,44 |
| K | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,44 |
| L | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,41 |
| M,N | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,03 |
| O | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,40 |
| P | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Q | 0,39 | 0,39 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,39 |
| R,S,T,U | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 |



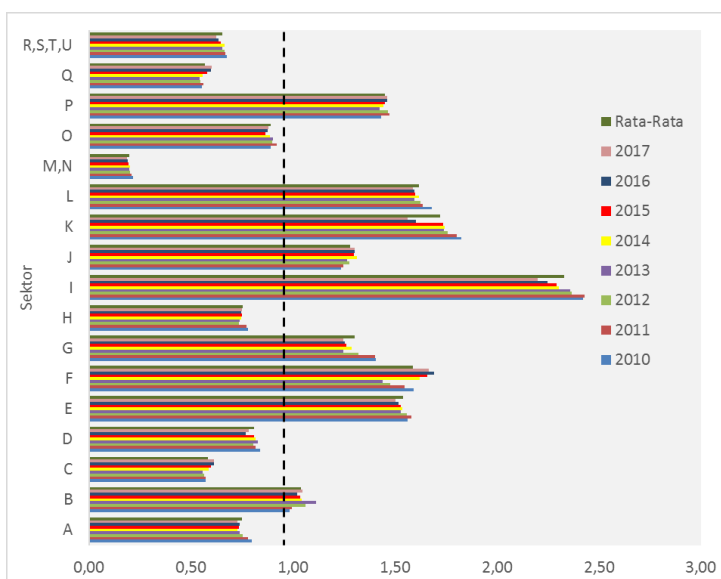
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| Klasifikasi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata-Rata |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| A | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,56 | 0,57 | 0,53 |
| B | 2,44 | 2,37 | 2,36 | 2,38 | 2,44 | 2,49 | 2,51 | 2,48 | 2,43 |
| C | 0,55 | 0,54 | 0,62 | 0,65 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,61 |
| D | 0,23 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,23 |
| E | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,38 |
| F | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,53 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,58 | 0,52 |
| G | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,53 | 0,55 | 0,47 |
| H | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,30 |
| I | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,25 |
| J | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,31 |
| K | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,28 |
| L | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,31 |
| M,N | 0,80 | 0,82 | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,96 | 0,88 |
| O | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,43 |
| P | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,79 | 0,81 | 0,75 |
| Q | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,34 |
| R,S,T,U | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,24 |



KABUPATEN BUNGO

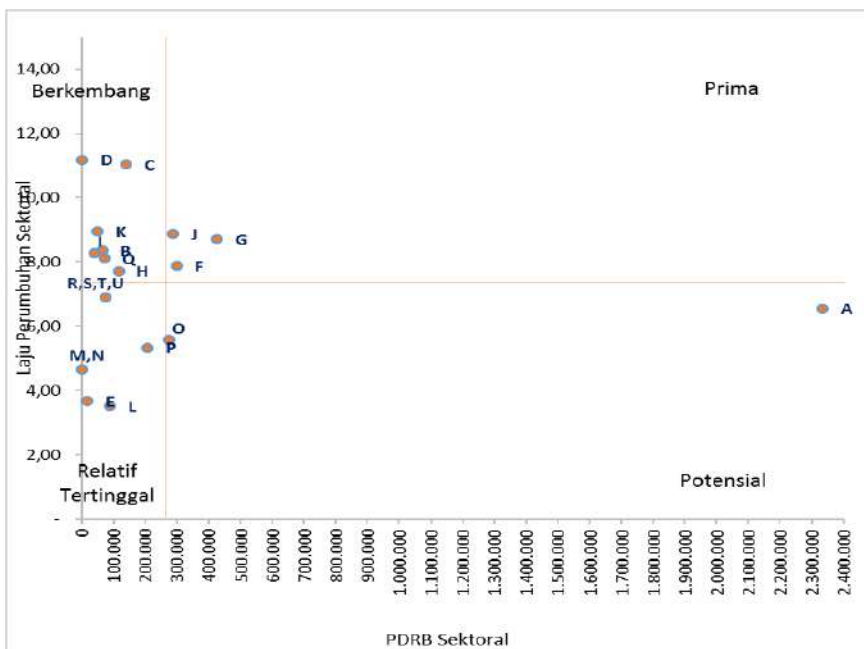
| Klasifikasi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata-Rata |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| A | 0,80 | 0,78 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 0,75 |
| B | 0,99 | 1,00 | 1,06 | 1,11 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,05 | 1,04 |
| C | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,59 |
| D | 0,84 | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,77 | 0,78 | 0,81 |
| E | 1,56 | 1,58 | 1,56 | 1,53 | 1,54 | 1,53 | 1,52 | 1,50 | 1,54 |
| F | 1,59 | 1,55 | 1,48 | 1,44 | 1,62 | 1,66 | 1,69 | 1,67 | 1,59 |
| G | 1,41 | 1,40 | 1,32 | 1,25 | 1,29 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,30 |
| H | 0,78 | 0,77 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| I | 2,42 | 2,43 | 2,37 | 2,36 | 2,30 | 2,29 | 2,25 | 2,20 | 2,33 |
| J | 1,23 | 1,25 | 1,28 | 1,27 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,28 |
| K | 1,82 | 1,80 | 1,76 | 1,74 | 1,75 | 1,74 | 1,60 | 1,56 | 1,72 |
| L | 1,68 | 1,64 | 1,63 | 1,60 | 1,62 | 1,60 | 1,60 | 1,59 | 1,62 |
| M,N | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 |
| O | 0,89 | 0,92 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 |
| P | 1,43 | 1,47 | 1,47 | 1,43 | 1,45 | 1,45 | 1,46 | 1,46 | 1,45 |
| Q | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 0,57 |
| R,S,T,U | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 0,63 | 0,62 | 0,65 |



Lampiran 2. Hasil Tipologi Klassen

KABUPATEN KERINCI

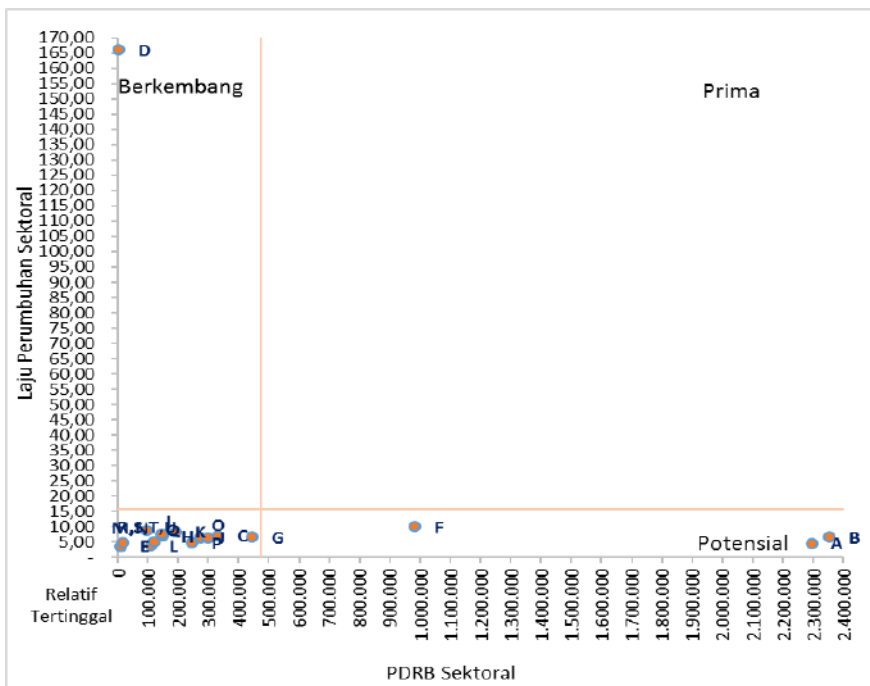
| Klasifikasi | Lapangan Usaha (Jambi) | PDRB Sektoral | Laju Pertumbuhan Sektoral | Keterangan |
|-------------|--|---------------|---------------------------|--------------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 2.412.768,12 | 6,44 | Potensial |
| B | Pertambangan & Penggalan | 67.971,53 | 7,85 | Berkembang |
| C | Industri Pengolahan | 144.708,73 | 9,79 | Berkembang |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 1.800,11 | 10,12 | Berkembang |
| E | Pengadaan Air | 19.173,17 | 3,73 | Relatif Tertinggal |
| F | Konstruksi | 310.342,18 | 7,53 | Prima |
| G | Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 443.567,35 | 8,39 | Prima |
| H | Transportasi & Pergudangan | 120.636,69 | 7,63 | Berkembang |
| I | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 40.087,54 | 7,88 | Berkembang |
| J | Informasi dan Komunikasi | 301.928,95 | 9,06 | Prima |
| K | Jasa Keuangan | 50.349,05 | 8,65 | Berkembang |
| L | Real Estate | 91.119,57 | 3,45 | Relatif Tertinggal |
| M,N | Jasa Perusahaan | 2.102,03 | 4,88 | Relatif Tertinggal |
| O | Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 285.047,25 | 5,60 | Potensial |
| P | Jasa Pendidikan | 212.908,73 | 5,55 | Relatif Tertinggal |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 75.302,32 | 7,99 | Berkembang |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 77.519,69 | 6,39 | Relatif Tertinggal |
| | Rata-Rata | 273.960,76 | 7,11 | |



KABUPATEN SAROLANGUN

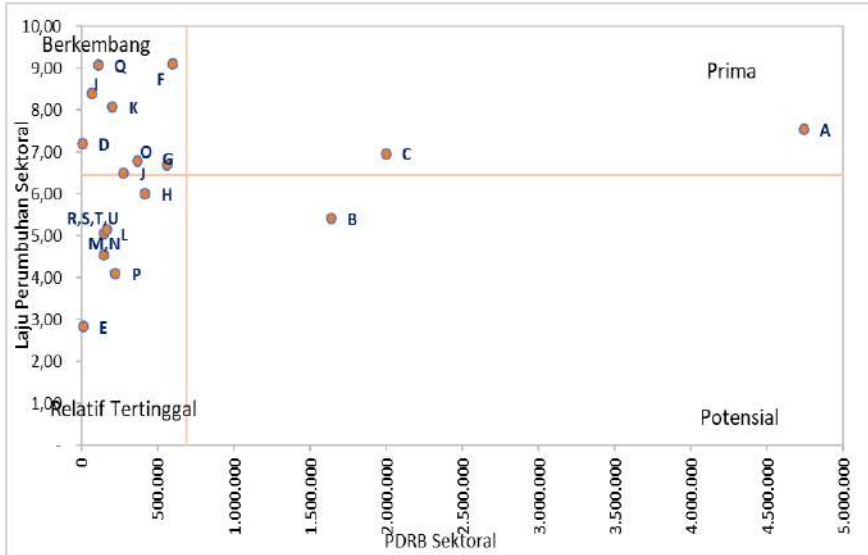
| Klasifikasi | Lapangan Usaha (Jambi) | PDRB Sektoral | Laju Pertumbuhan Sektoral | Keterangan |
|-------------|---|---------------|---------------------------|--------------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 2.347.784,40 | 4,53 | Potensial |
| B | Pertambangan & Penggalian | 2.400.371,44 | 6,33 | Potensial |
| C | Industri Pengolahan | 340.542,39 | 6,53 | Relatif Tertinggal |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 4.142,46 | 143,31 | Berkembang |
| E | Pengadaan Air | 11.058,02 | 3,64 | Relatif Tertinggal |
| F | Konstruksi | 1.024.668,26 | 9,39 | Potensial |
| G | Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 460.378,33 | 6,32 | Relatif Tertinggal |
| H | Trasportasi & Pergudangan | 153.319,83 | 6,65 | Relatif Tertinggal |
| I | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 150.633,82 | 7,61 | Relatif Tertinggal |

| | | | | |
|---------|--|------------|-------|--------------------|
| J | Informasi dan Komunikasi | 281.571,50 | 6,32 | Relatif Tertinggal |
| K | Jasa Keuangan | 198.966,01 | 7,68 | Relatif Tertinggal |
| L | Real Estate | 111.339,16 | 3,88 | Relatif Tertinggal |
| M,N | Jasa Perusahaan | 19.640,53 | 4,78 | Relatif Tertinggal |
| O | Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 308.918,39 | 5,81 | Relatif Tertinggal |
| P | Jasa Pendidikan | 251.996,79 | 4,63 | Relatif Tertinggal |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 100.002,83 | 8,59 | Relatif Tertinggal |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 125.164,89 | 5,09 | Relatif Tertinggal |
| | Rata-Rata | 487.676,41 | 14,18 | |



KABUPATEN MUARO JAMBI

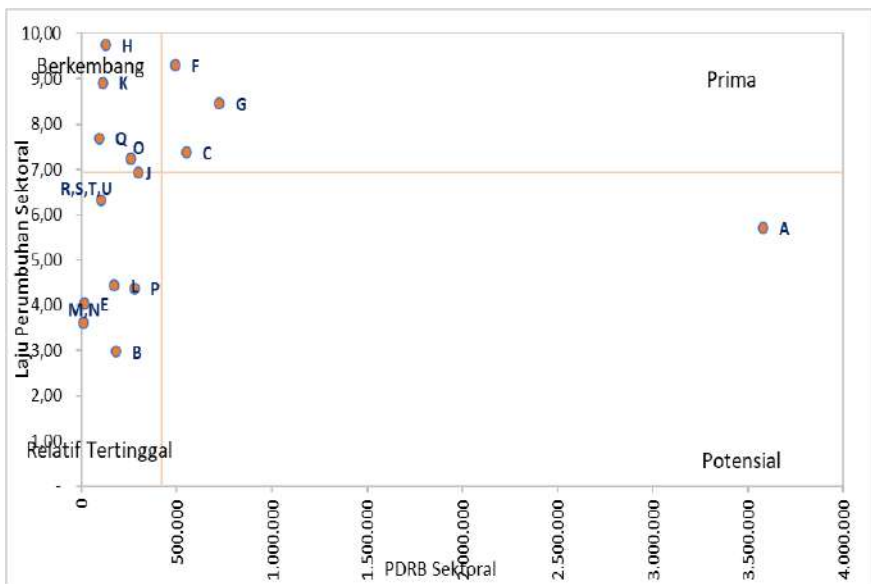
| Klasifikasi | Lapangan Usaha (Jambi) | PDRB Sektoral | Laju Pertumbuhan Sektoral | Keterangan |
|-------------|---|---------------|---------------------------|--------------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 4.916.155,86 | 7,21 | Prima |
| B | Pertambangan & Penggalian | 1.669.982,73 | 5,19 | Potensial |
| C | Industri Pengolahan | 2.059.404,33 | 6,60 | Prima |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 4.189,86 | 6,48 | Berkembang |
| E | Pengadaan Air | 12.213,16 | 2,96 | Relatif Tertinggal |
| F | Konstruksi | 624.856,90 | 8,88 | Berkembang |
| G | Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 581.329,98 | 6,71 | Berkembang |
| H | Transportasi & Pergudangan | 428.239,46 | 5,74 | Relatif Tertinggal |
| I | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 72.184,38 | 8,12 | Berkembang |
| J | Informasi dan Komunikasi | 286.517,90 | 6,68 | Berkembang |
| K | Jasa Keuangan | 209.562,71 | 7,54 | Berkembang |
| L | Real Estate | 151.223,89 | 5,12 | Relatif Tertinggal |
| M,N | Jasa Perusahaan | 149.157,21 | 4,71 | Relatif Tertinggal |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 377.646,08 | 6,32 | Berkembang |
| P | Jasa Pendidikan | 226.009,20 | 4,17 | Relatif Tertinggal |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 113.321,48 | 8,68 | Berkembang |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 171.369,34 | 5,21 | Relatif Tertinggal |
| | Rata-Rata | 709.021,44 | 6,25 | |



KABUPATEN MERANGIN

| Klasifikasi | Lapangan Usaha (Jambi) | PDRB Sektoral | Laju Pertumbuhan Sektoral | Keterangan |
|-------------|---|---------------|---------------------------|--------------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 3.681.468,34 | 5,60 | Potensial |
| B | Pertambangan & Penggalian | 184.193,26 | 3,22 | Relatif Tertinggal |
| C | Industri Pengolahan | 569.071,13 | 7,07 | Prima |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 4.148,89 | 8,22 | Berkembang |
| E | Pengadaan Air | 14.142,64 | 4,05 | Relatif Tertinggal |
| F | Konstruksi | 511.901,72 | 8,76 | Prima |
| G | Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 756.946,08 | 8,46 | Prima |
| H | Transportasi & Pergudangan | 132.747,19 | 9,29 | Berkembang |
| I | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 134.940,67 | 9,93 | Berkembang |
| J | Informasi dan Komunikasi | 312.599,47 | 7,18 | Berkembang |

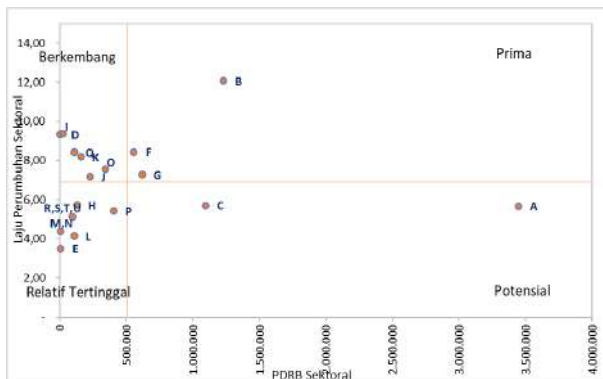
| | | | | |
|---------|--|------------|------|--------------------|
| K | Jasa Keuangan | 114.320,78 | 8,61 | Berkembang |
| L | Real Estate | 174.975,84 | 4,33 | Relatif Tertinggal |
| M,N | Jasa Perusahaan | 10.711,29 | 3,95 | Relatif Tertinggal |
| O | Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 266.681,12 | 6,67 | Berkembang |
| P | Jasa Pendidikan | 283.707,33 | 4,03 | Relatif Tertinggal |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 96.102,74 | 7,29 | Berkembang |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 106.017,65 | 6,54 | Relatif Tertinggal |
| | Rata-Rata | 432.628,01 | 6,66 | |



KABUPATEN BATANG HARI

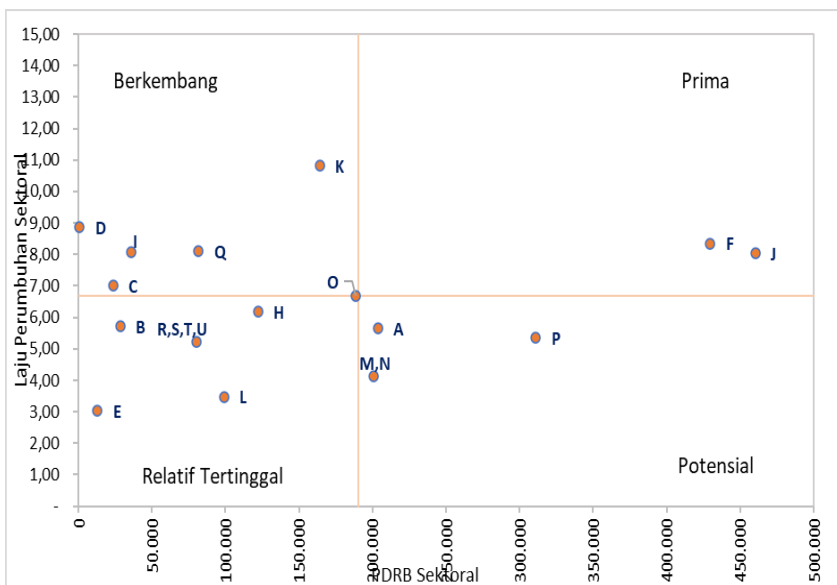
| Klasifikasi | Lapangan Usaha (Jambi) | PDRB Sektoral | Laju Pertumbuhan Sektoral | Keterangan |
|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 3.539.514,94 | 5,20 | Potensial |
| B | Pertambangan & Penggalian | 1.276.573,86 | 12,27 | Prima |

| | | | | |
|---------|---|--------------|------|--------------------|
| C | Industri Pengolahan | 1.123.237,44 | 5,29 | Potensial |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 4.071,54 | 8,89 | Berkembang |
| E | Pengadaan Air | 7.577,08 | 4,26 | Relatif Tertinggal |
| F | Konstruksi | 579.192,91 | 7,88 | Prima |
| G | Perdagangan& Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 646.255,81 | 6,98 | Prima |
| H | Trasportasi & Pergudangan | 133.842,97 | 5,61 | Relatif Tertinggal |
| I | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 29.857,77 | 9,22 | Berkembang |
| J | Informasi dan Komunikasi | 239.892,37 | 7,19 | Berkembang |
| K | Jasa Keuangan | 165.376,36 | 7,37 | Berkembang |
| L | Real Estate | 112.686,78 | 4,13 | Relatif Tertinggal |
| M,N | Jasa Perusahaan | 6.772,98 | 4,38 | Relatif Tertinggal |
| O | Admnitrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 353.655,79 | 6,96 | Berkembang |
| P | Jasa Pendidikan | 420.709,76 | 5,37 | Relatif Tertinggal |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 115.773,35 | 8,00 | Berkembang |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 101.413,86 | 5,08 | Relatif Tertinggal |
| | Rata-Rata | 520.965,03 | 6,71 | |



KOTA SUNGAI PENUH

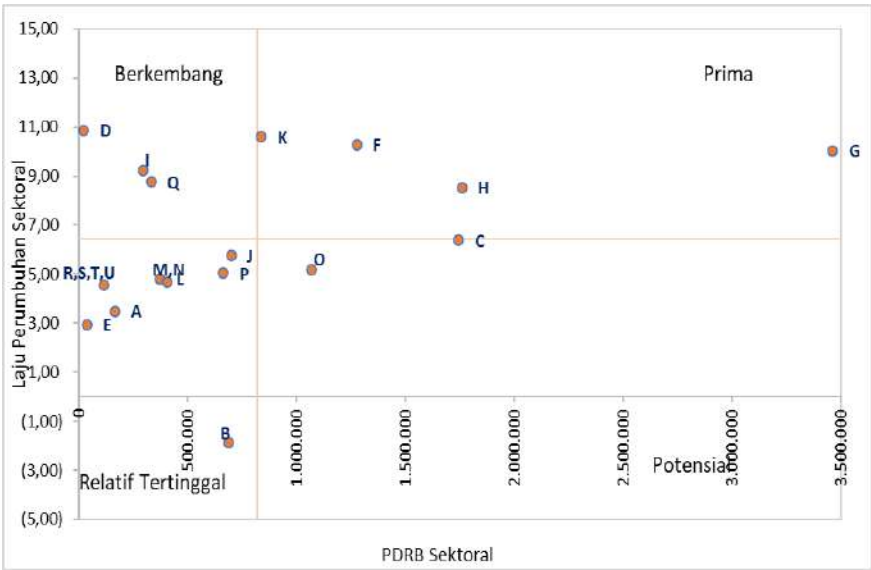
| Klasifikasi | Lapangan Usaha (Jambi) | PDRB Sektoral | Laju Pertumbuhan Sektoral | Keterangan |
|-------------|---|---------------|---------------------------|--------------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 203.595,34 | 5,64 | Potensial |
| B | Pertambangan & Penggalian | 28.295,22 | 5,72 | Relatif Tertinggal |
| C | Industri Pengolahan | 23.528,35 | 7,00 | Berkembang |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 796,78 | 8,87 | Berkembang |
| E | Pengadaan Air | 12.867,61 | 3,02 | Relatif Tertinggal |
| F | Konstruksi | 429.694,44 | 8,35 | Prima |
| G | Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 795.243,30 | 8,82 | Prima |
| H | Transportasi & Pergudangan | 122.124,58 | 6,18 | Relatif Tertinggal |
| I | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 35.809,39 | 8,09 | Berkembang |
| J | Informasi dan Komunikasi | 460.409,80 | 8,03 | Prima |
| K | Jasa Keuangan | 163.935,24 | 10,81 | Berkembang |
| L | Real Estate | 99.247,20 | 3,48 | Relatif Tertinggal |
| M,N | Jasa Perusahaan | 200.804,32 | 4,14 | Potensial |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 188.365,84 | 6,69 | Berkembang |
| P | Jasa Pendidikan | 311.049,41 | 5,35 | Potensial |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 81.414,88 | 8,11 | Berkembang |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 80.278,79 | 5,23 | Relatif Tertinggal |
| | Rata-Rata | 190.438,85 | 6,68 | |



KOTA JAMBI

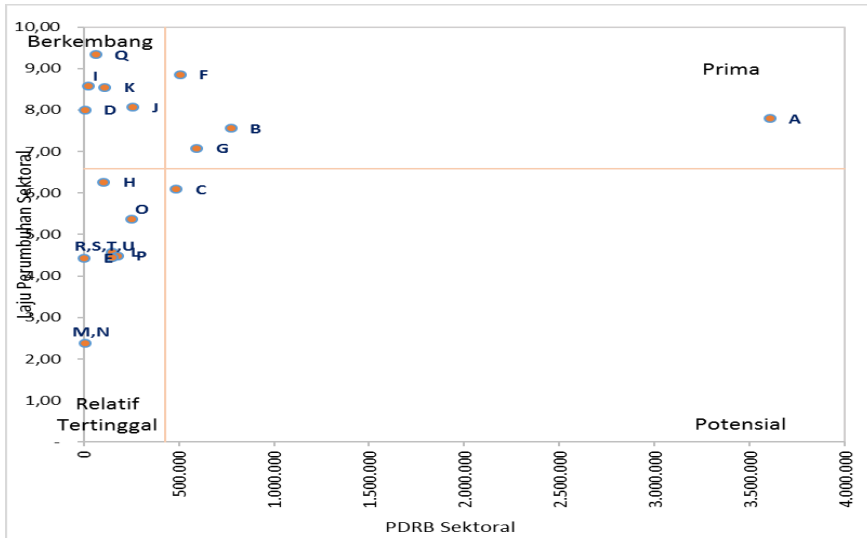
| Klasifikasi | Lapangan Usaha (Jambi) | PDRB Sektoral | Laju Pertumbuhan Sektoral | Keterangan |
|-------------|---|---------------|---------------------------|--------------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 167.351,96 | 3,49 | Relatif Tertinggal |
| B | Pertambangan & Penggalian | 690.912,71 | (1,88) | Relatif Tertinggal |
| C | Industri Pengolahan | 1.746.449,54 | 6,38 | Potensial |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 24.219,98 | 10,87 | Berkembang |
| E | Pengadaan Air | 39.338,79 | 2,94 | Relatif Tertinggal |
| F | Konstruksi | 1.279.709,58 | 10,28 | Prima |
| G | Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3.462.930,99 | 10,04 | Prima |
| H | Transportasi & Pergudangan | 1.760.604,23 | 8,53 | Prima |
| I | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 296.518,87 | 9,23 | Berkembang |
| J | Informasi dan Komunikasi | 700.002,09 | 5,77 | Relatif Tertinggal |

| | | | | |
|---------|--|--------------|-------|--------------------|
| K | Jasa Keuangan | 840.401,70 | 10,61 | Prima |
| L | Real Estate | 373.932,21 | 4,82 | Relatif Tertinggal |
| M,N | Jasa Perusahaan | 407.288,60 | 4,69 | Relatif Tertinggal |
| O | Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 1.067.947,72 | 5,20 | Potensial |
| P | Jasa Pendidikan | 665.647,40 | 5,05 | Relatif Tertinggal |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 333.020,68 | 8,76 | Berkembang |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 114.896,59 | 4,55 | Relatif Tertinggal |
| | Rata-Rata | 821.833,74 | 6,43 | |



KABUPATEN TEBO

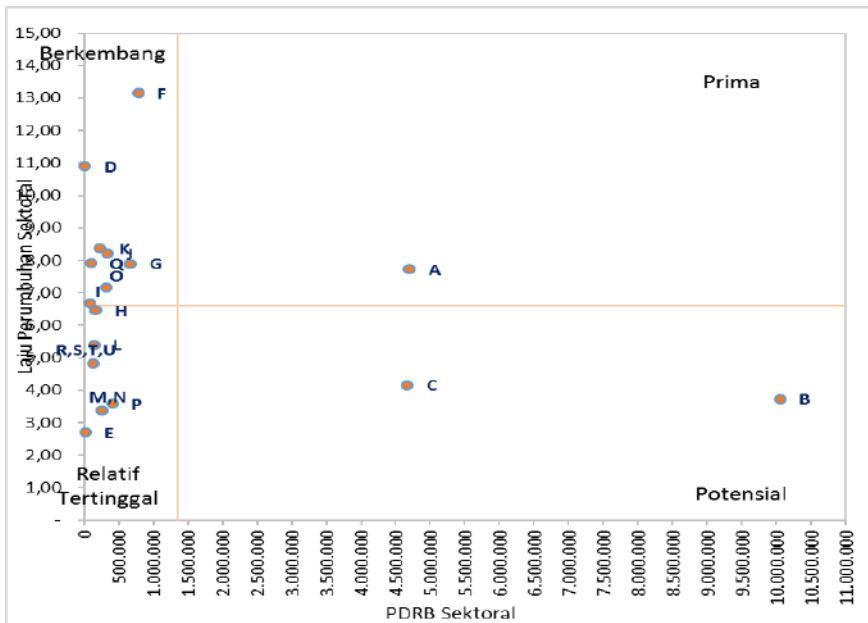
| Klasifikasi | Lapangan Usaha (Jambi) | PDRB Sektoral | Laju Pertumbuhan Sektoral | Keterangan |
|-------------|---|---------------|---------------------------|--------------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 3.745.291,68 | 7,54 | Prima |
| B | Pertambangan & Penggalian | 790.712,73 | 7,20 | Prima |
| C | Industri Pengolahan | 497.341,46 | 5,76 | Potensial |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 4.883,73 | 7,08 | Berkembang |
| E | Pengadaan Air | 3.316,26 | 4,44 | Relatif Tertinggal |
| F | Konstruksi | 528.465,31 | 8,50 | Prima |
| G | Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 616.424,08 | 7,07 | Prima |
| H | Transportasi & Pergudangan | 109.437,55 | 6,41 | Berkembang |
| I | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 25.825,51 | 8,67 | Berkembang |
| J | Informasi dan Komunikasi | 268.899,99 | 8,02 | Berkembang |
| K | Jasa Keuangan | 110.218,65 | 7,72 | Berkembang |
| L | Real Estate | 150.350,71 | 4,50 | Relatif Tertinggal |
| M,N | Jasa Perusahaan | 5.064,96 | 2,40 | Relatif Tertinggal |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 259.695,91 | 4,83 | Relatif Tertinggal |
| P | Jasa Pendidikan | 179.347,98 | 4,46 | Relatif Tertinggal |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 66.155,20 | 8,82 | Berkembang |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 153.269,34 | 4,39 | Relatif Tertinggal |
| | Rata-Rata | 442.041,24 | 6,34 | |



KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| Klasifikasi | Lapangan Usaha (Jambi) | PDRB Sektoral | Laju Pertumbuhan Sektoral | Keterangan |
|-------------|---|---------------|---------------------------|--------------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 4.877.249,33 | 7,44 | Prima |
| B | Pertambangan & Penggalian | 10.193.414,21 | 3,62 | Potensial |
| C | Industri Pengolahan | 4.741.103,94 | 4,01 | Potensial |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 2.857,13 | 9,92 | Berkembang |
| E | Pengadaan Air | 13.235,94 | 2,88 | Relatif Tertinggal |
| F | Konstruksi | 840.023,25 | 12,82 | Berkembang |
| G | Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 685.926,86 | 7,57 | Berkembang |
| H | Trasportasi & Pergudangan | 171.371,67 | 6,54 | Berkembang |
| I | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 90.780,35 | 6,83 | Berkembang |
| J | Informasi dan Komunikasi | 352.971,56 | 8,18 | Berkembang |
| K | Jasa Keuangan | 237.425,52 | 7,81 | Berkembang |
| L | Real Estate | 143.926,64 | 5,52 | Relatif Tertinggal |

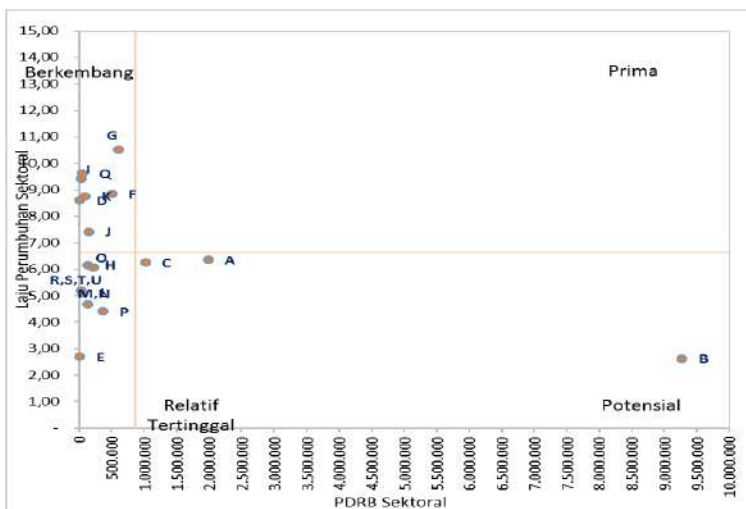
| | | | | |
|---------|--|--------------|------|--------------------|
| M,N | Jasa Perusahaan | 261.497,85 | 3,59 | Relatif Tertinggal |
| O | Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 328.171,28 | 6,70 | Berkembang |
| P | Jasa Pendidikan | 412.620,91 | 3,74 | Relatif Tertinggal |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 96.165,82 | 7,63 | Berkembang |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 128.092,03 | 4,62 | Relatif Tertinggal |
| | Rata-Rata | 1.386.872,60 | 6,44 | |



KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

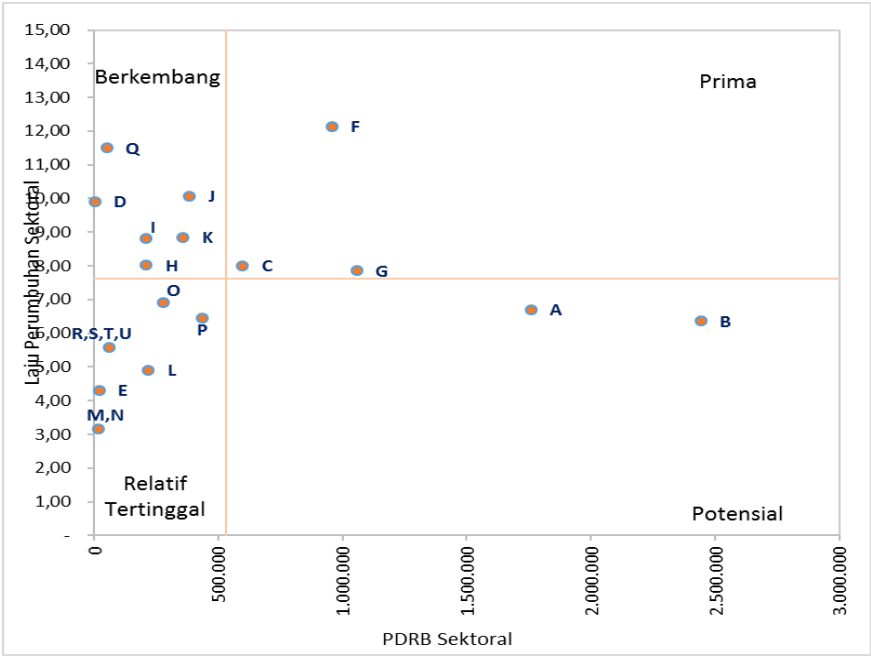
| Klasifikasi | Lapangan Usaha (Jambi) | PDRB Sektoral | Laju Pertumbuhan Sektoral | Keterangan |
|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 2.062.209,06 | 6,37 | Potensial |
| B | Pertambangan & Penggalian | 9.338.221,66 | 2,37 | Potensial |
| C | Industri Pengolahan | 1.038.219,99 | 5,64 | Potensial |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 1.635,04 | 7,67 | Berkembang |

| | | | | |
|---------|--|------------|-------|--------------------|
| E | Pengadaan Air | 8.136,98 | 2,69 | Relatif Tertinggal |
| F | Konstruksi | 529.702,01 | 9,49 | Berkembang |
| G | Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 643.495,67 | 10,12 | Berkembang |
| H | Trasportasi & Pergudangan | 137.461,55 | 6,43 | Relatif Tertinggal |
| I | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 38.532,83 | 9,57 | Berkembang |
| J | Informasi dan Komunikasi | 158.156,59 | 7,45 | Berkembang |
| K | Jasa Keuangan | 94.865,58 | 8,27 | Berkembang |
| L | Real Estate | 68.424,42 | 5,64 | Relatif Tertinggal |
| M,N | Jasa Perusahaan | 141.892,75 | 4,78 | Relatif Tertinggal |
| O | Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 221.072,33 | 5,85 | Relatif Tertinggal |
| P | Jasa Pendidikan | 372.138,12 | 4,64 | Relatif Tertinggal |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 54.463,24 | 9,11 | Berkembang |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 36.782,68 | 5,21 | Relatif Tertinggal |
| | Rata-Rata | 879.141,79 | 6,55 | |



KABUPATEN BUNGO

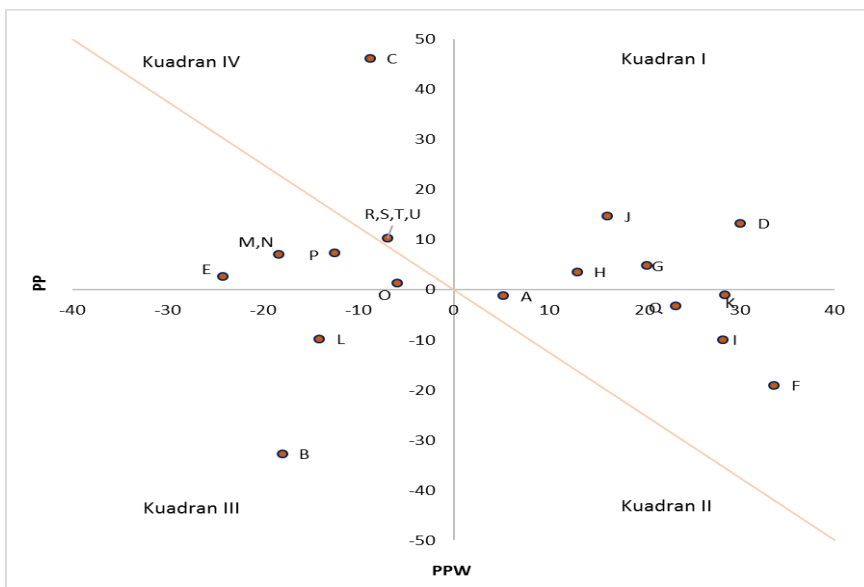
| Klasifikasi | Lapangan Usaha (Jambi) | PDRB Sektoral | Laju Pertumbuhan Sektoral | Keterangan |
|-------------|---|---------------|---------------------------|--------------------|
| A | Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 1.820.208,35 | 6,46 | Potensial |
| B | Pertambangan & Penggalian | 2.490.472,19 | 6,48 | Potensial |
| C | Industri Pengolahan | 618.078,09 | 7,42 | Prima |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 3.648,34 | 9,16 | Berkembang |
| E | Pengadaan Air | 20.434,36 | 4,08 | Relatif Tertinggal |
| F | Konstruksi | 1.009.646,45 | 11,35 | Prima |
| G | Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.096.498,91 | 7,41 | Prima |
| H | Transportasi & Pergudangan | 218.431,86 | 7,94 | Berkembang |
| I | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 217.713,85 | 8,49 | Berkembang |
| J | Informasi dan Komunikasi | 404.870,90 | 9,73 | Berkembang |
| K | Jasa Keuangan | 364.055,81 | 7,76 | Berkembang |
| L | Real Estate | 225.258,28 | 4,96 | Relatif Tertinggal |
| M,N | Jasa Perusahaan | 19.955,95 | 3,16 | Relatif Tertinggal |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 285.788,63 | 6,53 | Relatif Tertinggal |
| P | Jasa Pendidikan | 448.796,05 | 6,31 | Relatif Tertinggal |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 56.686,73 | 10,92 | Berkembang |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 62.066,35 | 5,34 | Relatif Tertinggal |
| | Rata-Rata | 550.741,83 | 7,26 | |



Lampiran 3. Hasil Perhitungan *Shift Share* (SS)

KABUPATEN KERINCI

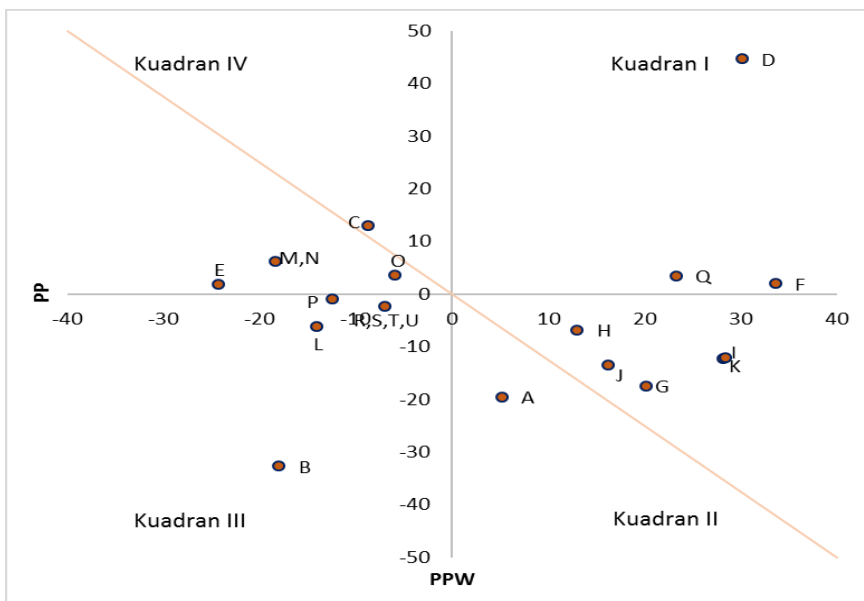
| Klasifikasi | Lapangan Usaha (Kabupaten/Kota) | PP (%) | PPW (%) |
|-------------|---|--------|---------|
| A | Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 5,18 | -1,20 |
| B | Pertambangan & Penggalian | -17,99 | -32,70 |
| C | Industri Pengolahan | -8,78 | 46,21 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 30,14 | 13,30 |
| E | Pengadaan Air | -24,24 | 2,63 |
| F | Konstruksi | 33,67 | -19,01 |
| G | Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 20,24 | 4,83 |
| H | Transportasi & Pergudangan | 12,96 | 3,61 |
| I | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 28,24 | -9,91 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 16,18 | 14,72 |
| K | Jasa Keuangan | 28,46 | -0,98 |
| L | Real Estate | -14,08 | -9,81 |
| M,N | Jasa Perusahaan | -18,40 | 7,12 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | -5,92 | 1,44 |
| P | Jasa Pendidikan | -12,49 | 7,45 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 23,31 | -3,13 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | -6,95 | 10,31 |



KABUPATEN SAROLANGUN

| Klasifikasi | Lapangan Usaha (Kabupaten/Kota) | PP (%) | PPW (%) |
|-------------|---|--------|---------|
| A | Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 5,18 | -19,53 |
| B | Pertambangan & Penggalian | -17,99 | -32,70 |
| C | Industri Pengolahan | -8,78 | 13,08 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 30,14 | 44,68 |
| E | Pengadaan Air | -24,24 | 1,80 |
| F | Konstruksi | 33,67 | 2,00 |
| G | Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 20,24 | -17,40 |
| H | Transportasi & Pergudangan | 12,96 | -6,84 |
| I | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 28,24 | -12,19 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 16,18 | -13,43 |
| K | Jasa Keuangan | 28,46 | -12,02 |
| L | Real Estate | -14,08 | -6,11 |
| M,N | Jasa Perusahaan | -18,40 | 6,28 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | -5,92 | 3,60 |
| P | Jasa Pendidikan | -12,49 | -0,94 |

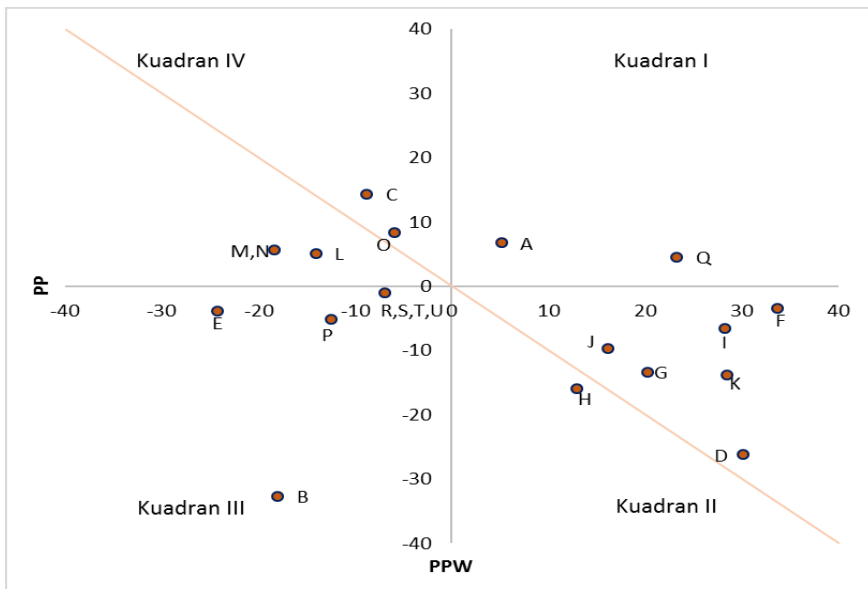
| | | | |
|---------|------------------------------------|-------|-------|
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 23,31 | 3,48 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | -6,95 | -2,27 |



KABUPATEN MUARO JAMBI

| Klasifikasi | Lapangan Usaha (Kabupaten/Kota) | PP (%) | PPW (%) |
|-------------|---|--------|---------|
| A | Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 5,18 | 6,75 |
| B | Pertambangan & Penggalian | -17,99 | -32,70 |
| C | Industri Pengolahan | -8,78 | 14,35 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 30,14 | -26,22 |
| E | Pengadaan Air | -24,24 | -3,87 |
| F | Konstruksi | 33,67 | -3,44 |
| G | Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 20,24 | -13,35 |
| H | Transportasi & Pergudangan | 12,96 | -15,97 |
| I | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 28,24 | -6,59 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 16,18 | -9,63 |
| K | Jasa Keuangan | 28,46 | -13,84 |
| L | Real Estate | -14,08 | 5,12 |
| M,N | Jasa Perusahaan | -18,40 | 5,60 |

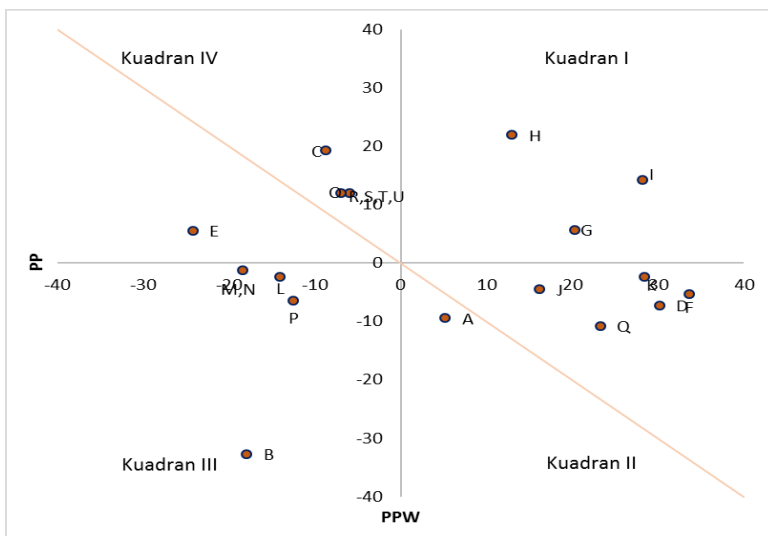
| | | | |
|---------|--|--------|-------|
| O | Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | -5,92 | 8,41 |
| P | Jasa Pendidikan | -12,49 | -5,18 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 23,31 | 4,56 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | -6,95 | -1,06 |



KABUPATEN MERANGIN

| Klasifikasi | Lapangan Usaha (Kabupaten/Kota) | PP (%) | PPW (%) |
|-------------|---|--------|---------|
| A | Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 5,18 | -9,48 |
| B | Pertambangan & Penggalian | -17,99 | -32,70 |
| C | Industri Pengolahan | -8,78 | 19,24 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 30,14 | -7,28 |
| E | Pengadaan Air | -24,24 | 5,50 |
| F | Konstruksi | 33,67 | -5,26 |
| G | Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 20,24 | 5,64 |
| H | Transportasi & Pergudangan | 12,96 | 21,92 |
| I | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 28,24 | 14,26 |

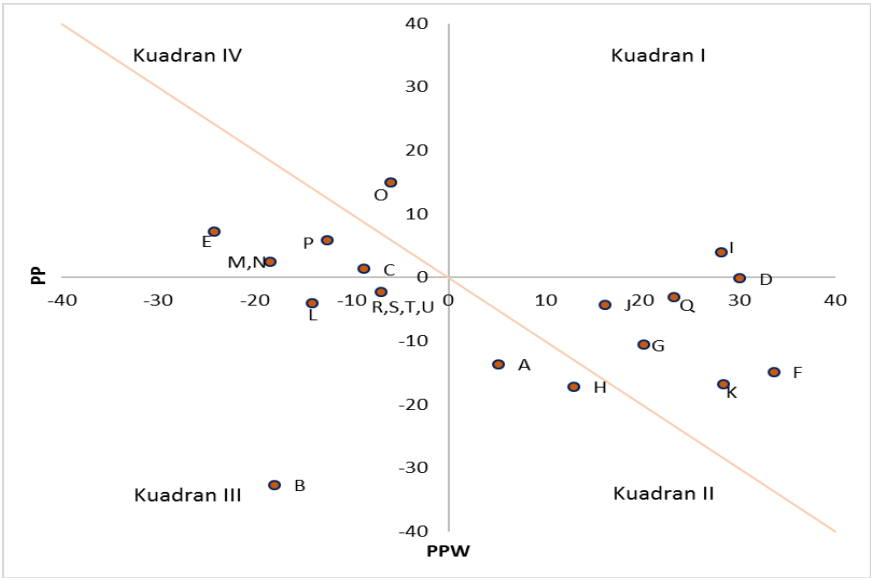
| | | | |
|---------|--|--------|--------|
| J | Informasi dan Komunikasi | 16,18 | -4,53 |
| K | Jasa Keuangan | 28,46 | -2,44 |
| L | Real Estate | -14,08 | -2,33 |
| M,N | Jasa Perusahaan | -18,40 | -1,21 |
| O | Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | -5,92 | 12,00 |
| P | Jasa Pendidikan | -12,49 | -6,50 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 23,31 | -10,81 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | -6,95 | 12,00 |



KABUPATEN BATANG HARI

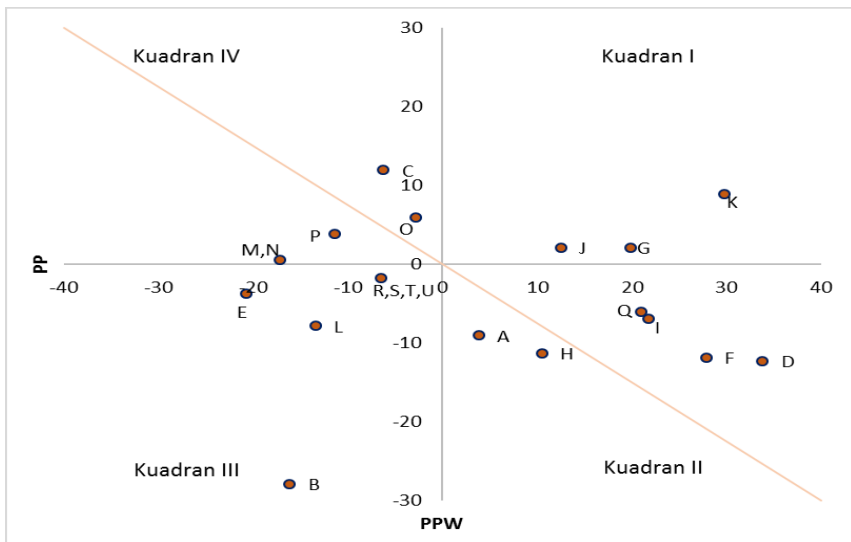
| Klasifikasi | Lapangan Usaha (Kabupaten/Kota) | PP (%) | PPW (%) |
|-------------|---|--------|---------|
| A | Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 5,18 | -13,66 |
| B | Pertambangan & Penggalian | -17,99 | -32,70 |
| C | Industri Pengolahan | -8,78 | 1,33 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 30,14 | -0,18 |
| E | Pengadaan Air | -24,24 | 7,26 |
| F | Konstruksi | 33,67 | -14,89 |
| G | Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 20,24 | -10,62 |

| | | | |
|---------|--|--------|--------|
| H | Transportasi & Pergudangan | 12,96 | -17,22 |
| I | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 28,24 | 3,96 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 16,18 | -4,33 |
| K | Jasa Keuangan | 28,46 | -16,78 |
| L | Real Estate | -14,08 | -4,08 |
| M,N | Jasa Perusahaan | -18,40 | 2,45 |
| O | Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | -5,92 | 14,96 |
| P | Jasa Pendidikan | -12,49 | 5,82 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 23,31 | -3,13 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | -6,95 | -2,28 |



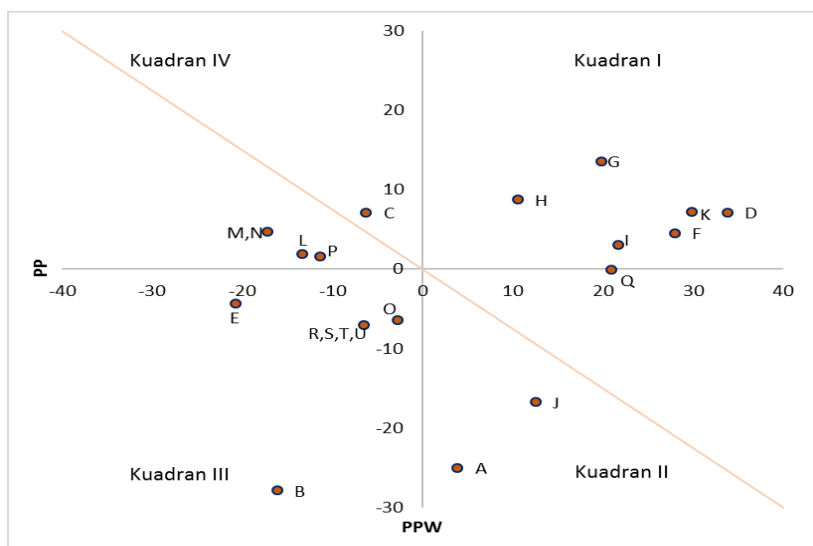
KOTA SUNGAI PENUH

| Klasifikasi | Lapangan Usaha (Kabupaten/Kota) | PP (%) | PPW (%) |
|-------------|--|--------|---------|
| A | Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 3,84 | -9,07 |
| B | Pertambangan & Penggalian | -16,13 | -27,88 |
| C | Industri Pengolahan | -6,26 | 11,90 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 33,80 | -12,29 |
| E | Pengadaan Air | -20,76 | -3,78 |
| F | Konstruksi | 27,93 | -11,85 |
| G | Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 19,83 | 2,08 |
| H | Transportasi & Pergudangan | 10,51 | -11,29 |
| I | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 21,74 | -6,97 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 12,53 | 2,07 |
| K | Jasa Keuangan | 29,82 | 8,91 |
| L | Real Estate | -13,42 | -7,85 |
| M,N | Jasa Perusahaan | -17,20 | 0,58 |
| O | Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | -2,80 | 5,90 |
| P | Jasa Pendidikan | -11,43 | 3,84 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 20,94 | -6,02 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | -6,51 | -1,78 |



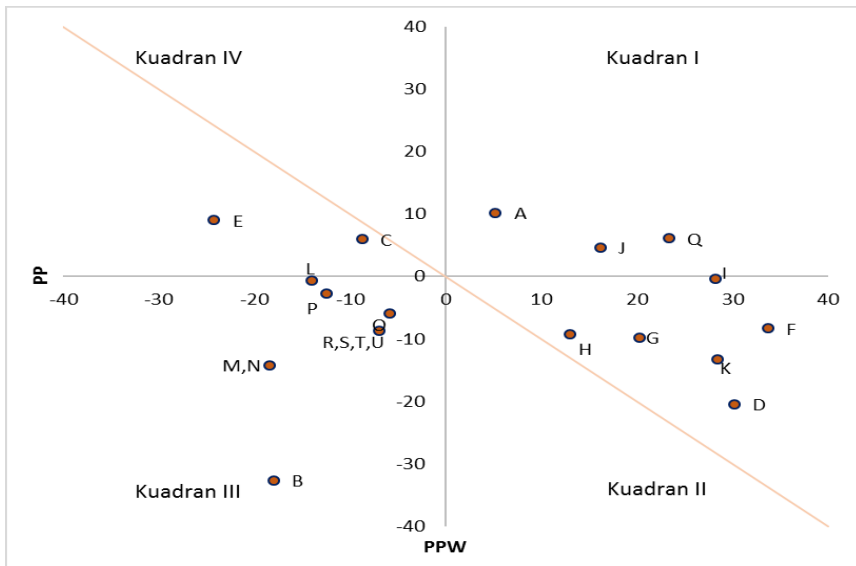
KOTA JAMBI

| Klasifikasi | Lapangan Usaha (Kabupaten/Kota) | PP (%) | PPW (%) |
|-------------|--|--------|---------|
| A | Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 3,84 | -25,06 |
| B | Pertambangan & Penggalian | -16,13 | -27,88 |
| C | Industri Pengolahan | -6,26 | 7,10 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 33,80 | 7,13 |
| E | Pengadaan Air | -20,76 | -4,31 |
| F | Konstruksi | 27,93 | 4,52 |
| G | Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 19,83 | 13,54 |
| H | Transportasi & Pergudangan | 10,51 | 8,72 |
| I | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 21,74 | 3,00 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 12,53 | -16,77 |
| K | Jasa Keuangan | 29,82 | 7,21 |
| L | Real Estate | -13,42 | 1,93 |
| M,N | Jasa Perusahaan | -17,20 | 4,68 |
| O | Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | -2,80 | -6,39 |
| P | Jasa Pendidikan | -11,43 | 1,63 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 20,94 | -0,09 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | -6,51 | -7,02 |



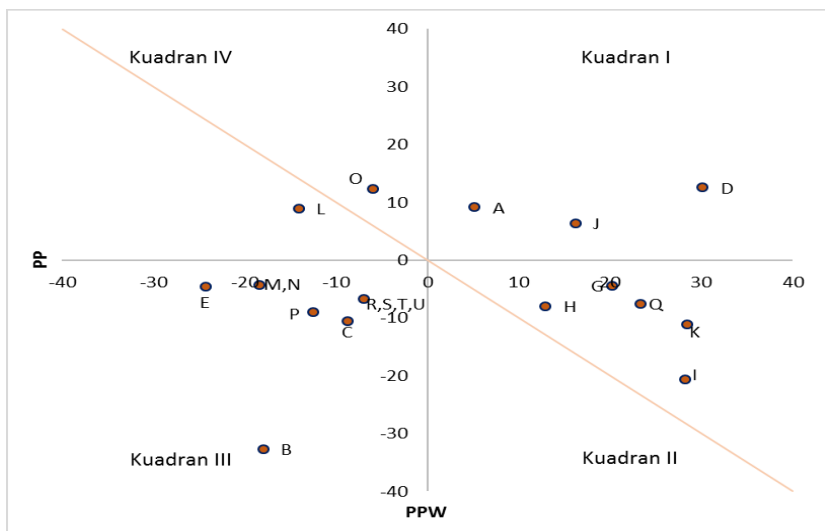
KABUPATEN TEBO

| Klasifikasi | Lapangan Usaha (Kabupaten/Kota) | PP (%) | PPW (%) |
|-------------|--|--------|---------|
| A | Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 5,18 | 10,15 |
| B | Pertambangan & Penggalian | -17,99 | -32,70 |
| C | Industri Pengolahan | -8,78 | 5,96 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 30,14 | -20,48 |
| E | Pengadaan Air | -24,24 | 9,00 |
| F | Konstruksi | 33,67 | -8,35 |
| G | Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 20,24 | -9,75 |
| H | Transportasi & Pergudangan | 12,96 | -9,20 |
| I | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 28,24 | -0,37 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 16,18 | 4,64 |
| K | Jasa Keuangan | 28,46 | -13,33 |
| L | Real Estate | -14,08 | -0,67 |
| M,N | Jasa Perusahaan | -18,40 | -14,23 |
| O | Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | -5,92 | -5,89 |
| P | Jasa Pendidikan | -12,49 | -2,68 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 23,31 | 6,08 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | -6,95 | -8,73 |



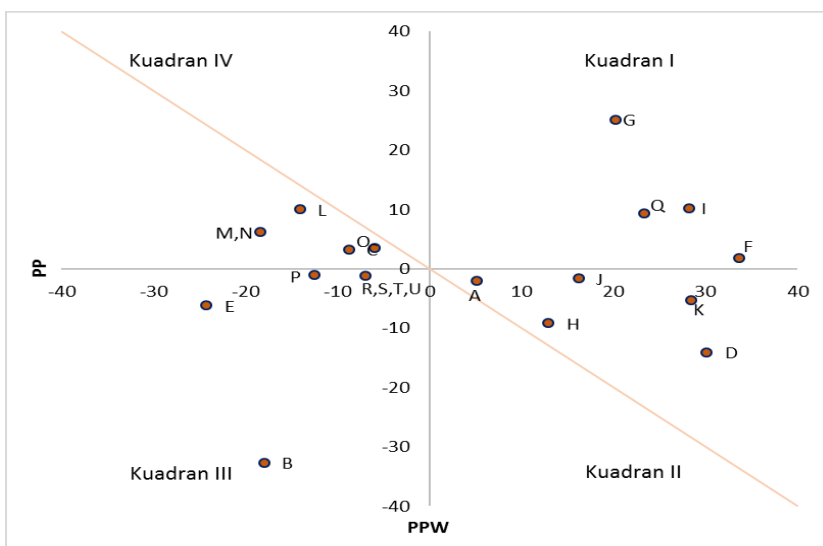
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| Klasifikasi | Lapangan Usaha (Kabupaten/Kota) | PP (%) | PPW (%) |
|-------------|--|--------|---------|
| A | Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 5,18 | 9,16 |
| B | Pertambangan & Penggalian | -17,99 | -32,70 |
| C | Industri Pengolahan | -8,78 | -10,55 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 30,14 | 12,57 |
| E | Pengadaan Air | -24,24 | -4,58 |
| F | Konstruksi | 33,67 | 46,53 |
| G | Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 20,24 | -4,37 |
| H | Trasportasi & Pergudangan | 12,96 | -7,98 |
| I | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 28,24 | -20,63 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 16,18 | 6,38 |
| K | Jasa Keuangan | 28,46 | -11,13 |
| L | Real Estate | -14,08 | 8,94 |
| M,N | Jasa Perusahaan | -18,40 | -4,35 |
| O | Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | -5,92 | 12,39 |
| P | Jasa Pendidikan | -12,49 | -8,96 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 23,31 | -7,50 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | -6,95 | -6,68 |



KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| Klasifikasi | Lapangan Usaha (Kabupaten/Kota) | PP (%) | PPW (%) |
|-------------|--|--------|---------|
| A | Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 5,18 | -1,99 |
| B | Pertambangan & Penggalian | -17,99 | -32,70 |
| C | Industri Pengolahan | -8,78 | 3,21 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 30,14 | -14,11 |
| E | Pengadaan Air | -24,24 | -6,17 |
| F | Konstruksi | 33,67 | 1,77 |
| G | Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 20,24 | 25,17 |
| H | Trasportasi & Pergudangan | 12,96 | -9,15 |
| I | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 28,24 | 10,15 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 16,18 | -1,65 |
| K | Jasa Keuangan | 28,46 | -5,30 |
| L | Real Estate | -14,08 | 9,98 |
| M,N | Jasa Perusahaan | -18,40 | 6,15 |
| O | Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | -5,92 | 3,59 |
| P | Jasa Pendidikan | -12,49 | -0,99 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 23,31 | 9,37 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | -6,95 | -1,16 |



KABUPATEN BUNGO

| Klasifikasi | Lapangan Usaha (Kabupaten/Kota) | PP (%) | PPW (%) |
|-------------|---|--------|---------|
| A | Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 5,18 | -1,00 |
| B | Pertambangan & Penggalian | -17,99 | -32,70 |
| C | Industri Pengolahan | -8,78 | 22,90 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 30,14 | 2,78 |
| E | Pengadaan Air | -24,24 | 5,70 |
| F | Konstruksi | 33,67 | 25,34 |
| G | Perdagangan & Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 20,24 | -6,32 |
| H | Transportasi & Pergudangan | 12,96 | 6,92 |
| I | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 28,24 | -2,40 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 16,18 | 24,56 |
| K | Jasa Keuangan | 28,46 | -12,69 |
| L | Real Estate | -14,08 | 3,63 |
| M,N | Jasa Perusahaan | -18,40 | -8,03 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | -5,92 | 10,60 |
| P | Jasa Pendidikan | -12,49 | 15,04 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 23,31 | 31,77 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | -6,95 | 0,16 |

